



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



2023



LAPORAN KEUANGAN

**Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Eselon I**
Audited



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI I JL LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 PSW.5203, (021) 3440107; FAKS (021) 3846402; SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

DIKETIK OLEH : Melly Yustriana
DIBACA OLEH : Maharrucha Zakka
DIPERIKSA OLEH :
DIKIRIM PADA TANGGAL :

DIAJUKAN LAGI PADA TANGGAL :

HAL : **Penyampaian Laporan Keuangan**
Audited TA 2023 Tingkat Eselon I
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

NOMOR : Jakarta, Mei 2024
NOTA :

Kepala Bagian Keuangan,

Y. Kus Suhanoro

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,

Didyk Choiroel

Ditetapkan:

Direktur Jenderal Perbendaharaan,

Astera Primanto Bhakti

Kp. : Pb.1/Pb.13/2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2024
Direktur Jenderal,

Astera Primanto Bhakti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
RINGKASAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	27
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	46
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	68
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	76
F. Pengungkapan Penting Lainnya	78
VI. LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN UAPPA-E1	
A. LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan	
B. LRA Belanja dan Pengembalian Belanja	
C. LRA Belanja Dalam Rangka COVID-19	
D. Neraca Percobaan Kas dan Akrual	
E. Tindak Lanjut atas Temuan BPK	
F. Daftar Saldo Rekening Pemerintah	
G. Lampiran Pendukung Laporan Keuangan	
H. Daftar Satuan Kerja Lingkup DJPb	
I. Telaah Laporan Keuangan	



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5200 3812436 FAKSIMILE 3846402, SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2024
Direktur Jenderal,

Astera Primanto Bhakti



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN



LAPORAN KEUANGAN TA 2023
UAPPA-E I DITJEN PERBENDAHARAAN
Audited

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan *Audited* Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp35.557.630.163.612,00** atau mencapai 99,07 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp35.889.754.515.000,00**.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp22.480.034.444.624,00** atau mencapai 99,50 persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp22.593.014.070.000,00**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar **Rp78.240.352.961.253,00**; yang terdiri atas: Aset Lancar sebesar **Rp 43.382.841.371.137,00**; Investasi Jangka Panjang (neto) sebesar **Rp10.233.934.609.931,00**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp11.197.274.372.481,00**; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar **Rp34.414.600,00** dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp13.426.268.193.104,00**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp22.556.516.257.477,00** dan **Rp55.683.836.703.776,00**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional. surplus/defisit sebelum pos luar biasa. pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp35.590.590.605.767,00** sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp22.032.368.601.605,00** sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai **Rp13.558.222.004.162,00**. Jumlah surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar surplus **Rp96.867.632.624,00** dan **Rp 0,00** sehingga entitas mengalami surplus-LO sebesar **Rp13.655.089.636.786,00**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp40.653.782.064.617,00 ditambah surplus-LO sebesar 13.655.089.636.786,00. kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas defisit Rp756.477.974,00 ditambah transaksi antar entitas sebesar surplus Rp1.374.208.524.399,00 sehingga Ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp15.030.054.639.159,00 dan Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp55.683.836.703.776,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk per 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN



LAPORAN KEUANGAN TA 2023
UAPPA-E I DITJEN PERBENDAHARAAN
Audited

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2023		% thd Angg 2023	31 DESEMBER 2022	Growth % REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI	
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	35.889.754.515.000	35.557.630.163.612	99,07	36.191.165.857.439	-1,75%
JUMLAH PENDAPATAN		35.889.754.515.000	35.557.630.163.612	99,07	36.191.165.857.439	-1,75%
BELANJA	B.2.					
Belanja Operasi						
Belanja Pegawai	B.3	80.208.189.000	75.324.206.780	93,91	286.815.947.635	-73,74%
Belanja Barang	B.4	22.069.438.989.000	21.967.174.121.431	99,54	37.153.042.889.620	-40,87%
Belanja Modal	B.5	443.366.892.000	437.536.116.413	98,68	171.555.668.757	155,04%
JUMLAH BELANJA		22.593.014.070.000	22.480.034.444.624	99,50	37.611.414.506.012	-40,23%

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



NERACA



LAPORAN KEUANGAN TA 2023
UAPPA-E I DITJEN PERBENDAHARAAN
Audited

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/TURUN	% NAIK (TURUN)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	26,999,593	7,721,142	19,278,451	249.68%
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	9,818,134,618	5,882,390,135	3,935,744,483	66.91%
Kas pada Badan Layanan Umum	C.4	31,805,963,615,669	24,557,304,394,286	7,248,659,221,383	29.52%
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	C.5	8,867,103,195,682	3,057,426,608,776	5,809,676,586,906	190.02%
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)		2,089,282,144,332	1,559,968,031,629	529,314,112,703	33.93%
Uang Muka Belanja (prepayment)		57,197,160	1,019,845,910	(962,648,750)	-94.39%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	587,180,096,355	457,355,338,948	129,824,757,407	28.39%
Piutang Bukan Pajak	C.7	256,205,006	412,966,823	(156,761,817)	-37.96%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.8	(252,138,939)	(129,878,993)	(122,259,946)	94.13%
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		4,066,067	283,087,830	(279,021,763)	-98.56%
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi		12,000,000	12,000,000	-	0.00%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	C.9	(60,000)	(60,000)	-	0.00%
Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi					
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)		11,940,000	11,940,000	-	0.00%
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.11	6,446,545,338	-	6,446,545,338	100.00%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional	C.12	(32,232,727)	-	(32,232,727)	100.00%
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)		6,414,312,611	-	6,414,312,611	100.00%
Persediaan	C.14	16,979,669,050	17,374,861,469	(395,192,419)	-2.27%
Jumlah Aset Lancar		43,382,841,371,137	29,656,634,220,125	13,726,207,151,012	46.28%
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Dana Bergulir	C.15	1,299,899,736,679	1,332,605,202,696	(32,705,466,017)	-2.45%
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum	C.16	8,019,775,521,545	6,640,289,050,977	1,379,486,470,568	20.77%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	C.17	1,237,505,000,000	-	-	-
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	C.18	(261,801,663,542)	(167,148,325,297)	(94,653,338,245)	56.63%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	C.19	(21,071,190,476)	-	-	-
Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih	C.20	(40,372,794,275)	(33,201,445,255)	(7,171,349,020)	21.60%
Jumlah Investasi Jangka Panjang		10,233,934,609,931	7,772,544,483,121	1,244,956,317,286	16.02%
ASET TETAP					
Tanah	C.23	9,179,987,122,830	9,072,828,813,486	107,158,309,344	1.18%
Peralatan dan Mesin	C.24	1,868,094,238,213	1,636,741,890,276	231,352,347,937	14.13%
Gedung dan Bangunan	C.25	2,188,851,669,204	2,061,188,950,999	127,662,718,205	6.19%
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.26	1,114,536,000	1,114,536,000	-	0.00%
Aset Tetap Lainnya	C.27	12,881,015,778	12,056,073,376	824,942,402	6.84%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.28	37,863,584,959	13,133,398,275	24,730,186,684	188.30%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.29	(2,091,517,794,503)	(1,866,450,361,632)	(225,067,432,871)	12.06%
Jumlah Aset Tetap		11,197,274,372,481	10,930,613,300,780	266,661,071,701	2.44%
PIUTANG JANGKA PANJANG					
Piutang Tagihan TP/TGR	C.21	1,862,811,088	1,907,443,863	(44,632,775)	-2.34%
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.22	(1,828,396,488)	(1,639,612,264)	(188,784,224)	11.51%
Jumlah Piutang Jangka Panjang		34,414,600	267,831,599	(233,416,999)	-87.15%
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	C.30	875,112,569,306	846,281,903,677	28,830,665,629	3.41%
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.31	1,348,604,387	-	1,348,604,387	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.32	21,009,926,971	-	21,009,926,971	-
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	C.33	13,112,690,253,718	7,118,197,617,793	5,994,492,635,925	84.21%
Aset Lain-Lain	C.34	30,795,913,946	25,462,113,898	5,333,800,048	20.95%
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.35	(614,689,075,224)	(582,035,565,260)	(32,653,509,964)	5.61%
Jumlah Aset Lainnya		13,426,268,193,104	7,407,906,070,108	6,018,362,122,996	81.24%
JUMLAH ASET		78,240,352,961,253	55,767,965,905,733	21,255,953,245,996	38.11%
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.36	144,007,613,353	21,556,184,910	122,451,428,443	568.06%
Pendapatan Diterima di Muka	C.37	1,186,095,245	1,505,831,273	(319,736,028)	-21.23%
Uang Muka dari KPPN	C.38	26,999,593	7,721,142	19,278,451	249.68%
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.39	1,227,820	22,232,325	(21,004,505)	-94.48%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		145,221,936,011	23,091,969,650	122,129,966,361	528.89%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang jangka panjang BLU kepada BUN	C.40	22,411,294,321,466	15,091,091,871,466	7,320,202,450,000	48.51%
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		22,411,294,321,466	15,091,091,871,466	7,320,202,450,000	48.51%
JUMLAH KEWAJIBAN		22,556,516,257,477.00	15,114,183,841,116	7,442,332,416,361	49.24%
EKUITAS					
Ekuitas	C.41	55,683,836,703,776	40,653,782,064,617	15,030,054,639,159	36.97%
JUMLAH EKUITAS		55,683,836,703,776	40,653,782,064,617	15,030,054,639,159	36.97%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		78,240,352,961,253	55,767,965,905,733	22,472,387,055,520	40.30%



LAPORAN OPERASIONAL



LAPORAN KEUANGAN TA 2023
UAPPA-E I DITJEN PERBENDAHARAAN
Audited

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	35.590.590.605.767	36.218.862.875.413
JUMLAH PENDAPATAN		35.590.590.605.767	36.218.862.875.413
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	220.973.294.660	419.768.971.328
Beban Persediaan	D.3	15.571.035.582	19.128.041.784
Beban Barang dan Jasa	D.4	20.926.320.742.713	33.418.804.649.147
Beban Pemeliharaan	D.5	302.501.989.112	239.957.908.760
Beban Perjalanan Dinas	D.6	150.633.639.040	167.593.547.085
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	312.966.366.427	298.675.373.107
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	103.401.534.071	48.805.993.969
JUMLAH BEBAN		22.032.368.601.605	34.612.734.485.180
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		13.558.222.004.162	1.606.128.390.233
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(3.376.888.240)	(2.764.411.127)
Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		100.244.520.864	98.975.674.437
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9	96.867.632.624	96.211.263.310
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		13.655.089.636.786	1.702.339.653.543
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.10	13.655.089.636.786	1.702.339.653.543

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



LAPORAN KEUANGAN TA 2023
UAPPA-E I DITJEN PERBENDAHARAAN
Audited

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DES 2023	31 DES 2022	NAIK/TURUN	%
EKUITAS AWAL	E.1	40,653,782,064,617	38,057,945,123,283	2,595,836,941,334	6.82%
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	13,655,089,636,786	1,702,339,653,543	11,952,749,983,243	14.24%
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR					
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	e.3	756,477,974	(231,788,347,392)	232,544,825,366	-100.33%
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		(252,230,220)	-	(252,230,220)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		-	117,846,300	(117,846,300)	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		(20,035,435)	(212,827,655,997)	212,807,620,562	-99.99%
LAIN-LAIN		1,028,743,629	(19,078,537,695)	20,107,281,324	-105.39%
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1,374,208,524,399	1,125,285,635,183	248,922,889,216	452.06%
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		15,030,054,639,159	2,595,836,941,334	12,434,217,697,825	20.88%
EKUITAS AKHIR	E.5	55,683,836,703,776	40,653,782,064,617	15,030,054,639,159	36.97%

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



LAPORAN KEUANGAN TA 2023
UAPPA-E I DITJEN PERBENDAHARAAN
Audited

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terbentuknya tidak terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan Negara di Indonesia, ketika semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) digulirkan, Pemerintah Pusat menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi organisasi. Secara paralel, reformasi hukum yang ditandai dengan lahirnya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara diiringi dengan perubahan organisasional di tubuh Kementerian Keuangan guna menyelaraskan perangkat organisasi dengan penegasan fungsi Kementerian Keuangan selaku institusi Pengelola Fiskal.

Selaku institusi Pengelola Fiskal, Kementerian Keuangan membagi pemisahan kewenangan, yang antara lain adalah fungsi-fungsi pengkajian, penganggaran, dan perbendaharaan. Inilah alasan kuat terjadinya penyempurnaan organisasi *reorganisasi* dengan "terbentuknya" tiga organisasi dengan nomenklatur baru, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional, suatu Perubahan organisasi yang ditandai dengan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda namun berada dalam satu naungan organisasi, serta menyatukan fungsi-fungsi yang sama namun tersebar di berbagai unit.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri bukanlah organisasi yang sama sekali baru. "*Core function*"nya tersebar di berbagai unit Eselon I dengan fungsi paling dominan, yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas Negara, pengelolaan barang milik kekayaan Negara, dan pengelolaan hutang luar negeri berada di bawah unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran. Sementara itu, fungsi perbendaharaan lainnya tersebar di beberapa unit Eselon I dan II yaitu fungsi pengelolaan hutang dalam negeri pada Pusat Manajemen Obligasi Negara, pengelolaan penerusan pinjaman dan pengelolaan kasnya pada Ditjen Lembaga Keuangan, dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Badan Akuntansi Keuangan Negara, serta fungsi pengolahan data pada Kantor Pengolahan Data Informasi Keuangan Regional.

Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 303/KMK/2004, secara hukum meleburlah unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri dari 1 Sekretariat Ditjen dan 7 Direktorat teknis pada kantor pusat serta Kantor Wilayah DJPB dan KPPN pada kantor instansi vertikal. Pelantikan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan seluruh pejabat Eselon II pada bulan Oktober 2004 pun merupakan titik awal sinergi organisasi baru tersebut.

Landasan Kegiatan Operasional Direktorat Jenderal Perbendaharaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas bidang perbendaharaan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan

keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkomitmen dengan visi **“Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia”/ “To be a world-class state treasury manager.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan misi sebagai berikut:

- Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang prudent, efisien dan optimal;
- Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel
- Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu;
- Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal, professional dan modern.

Susunan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan strategis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standardisasi, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran.
3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
4. Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
Direktorat Sistem Manajemen Investasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi.
5. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan Badan Layanan Umum.

6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
7. Direktorat Sistem Perbendaharaan;
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan.
8. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.

Selain itu terdapat organisasi vertikal Ditjen Perbendaharaan, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Jumlah entitas akuntansi adalah 216 satuan kerja yang terdiri dari 34 Kantor Wilayah, 98 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1, 81 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2, dan 3 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus. Selain satker vertikal tersebut pada DJPb terdapat juga 4 satker Kantor Pusat dan 3 Satuan Kerja Badan Layanan Umum sehingga total satuan kerja DJPb adalah **223** satuan kerja. Rincian entitas tersebut tersaji dalam lampiran Laporan Keuangan. Tugas unit vertikal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 dan A2;
Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah;
Mempunyai tugas melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran

anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan;
Mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi;
Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya.

Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga terdapat entitas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang koordinasi pelaporan keuangannya dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan mempunyai tugas yaitu:

1. Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN):
Mempunyai tugas menyempurnakan pengelolaan keuangan negara melalui integrasi sistem manajemen keuangan negara, penerapan akuntansi akrual, penyatuan database pengelolaan keuangan negara, dan kemudahan akses bagi pengguna. SPAN akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
2. Satuan Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP):
Mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
3. Satuan Kerja Komite Investasi Pemerintah (KIP)
4. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS):
Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (PIP):

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH):

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Lokasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkedudukan di Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 Jakarta Pusat.

Nilai Kinerja
Organisasi

A.2 Nilai Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2023 terdapat 11 Sasaran Strategis (SS) dan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU), yang diukur pada Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Indeks
Stakeholder (30.00)				114.95
Perbendaharaan Negara yang optimal				114.95
1a-CP	Indeks Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang	3.20	4.00	120.00
1b-CP	Indeks opini BPK atas LKPP	4.00	4.00	120.00
1c-CP	Indeks integritas organisasi	97.69	106.03	108.54
Customer (20.00)				109.27
Dukungan Manajemen yang efektif				113.24
2a-CP	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100.00	115.75	115.75
2b-CP	Tingkat Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara	100.00	120.00	120.00
2c-N	Tingkat Kemandirian BLU	82.50	87.24	105.75
Belanja negara yang berkualitas				105.30
3a-CP	Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah	4.30	4.35	101.16
3b-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90.00	94.17	104.63
3c-N	Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer Ke	90.00	99.27	110.30

	Daerah			
Internal Process (25.00)				113.36
Formulasi kebijakan perbendaharaan yang kredibel				117.96
4a-CP	Tingkat efektivitas implementasi kebijakan	100.00	117.96	117.96
Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD				100.00
5c-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100.00	100.00	100.00
Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif				110.03
6a-CP	Indeks keberhasilan inklusi sektor	100.00	101.87	101.87
6b-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	3.14	3.87	120.00
6c-CP	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90.00	97.43	108.26
Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal				112.09
7a-CP	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas	100.00	112.09	112.09
Learning and Growth (25.00)				115.36
Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif				115.55
8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100.00	117.97	117.97
8b-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92.00	100.00	108.70
8c-N	Tingkat implementasi Penajaman Tugas Treasury, Regional Economist, dan Financial Advisor	80.00	99.53	120.00
Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal				116.18
9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100.00	116.18	116.18
Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif				116.23
10a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	100.00	116.23	116.23
Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif				113.49
11a-CP	Tingkat Pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK	100.00	110.49	110.49
11b-CP	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82.00	95.52	116.49
Nilai Kinerja Organisasi				113.52

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pada tahun 2017 satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan *Piloting* aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 Tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 Tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

SAKTI adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

A.4 Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

A.6.1 Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

A.6.2 Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Pengelolaan BMN
 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

A.6.3 Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

A.6.4 Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

A.6.5 Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

A.6.5.1 Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

A.6.5.2 Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pada tahun 2018 perubahan nilai minimum kapitalisasi aset tetap mengalami perubahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Perubahan pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk per satuan aset tetap renovasi (ATR) peralatan dan mesin pada peraturan sebelumnya tidak diatur menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Pengeluaran untuk per satuan aset tetap renovasi (ATR) gedung dan bangunan pada peraturan sebelumnya tidak diatur menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - e. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Piutang
Jangka
Panjang*

A.6.5.3 Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain

adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Investasi
Jangka
Panjang*

A.6.5.4 Investasi Jangka Panjang

- Investasi Jangka Panjang BLU merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam rangka penugasan sesuai karakteristik BLU.
- Investasi Jangka Panjang Non-Permanen dalam bentuk tagihan atas pemberian pinjaman dan/atau tagihan dana bergulir diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Dana yang diterima oleh BLU dari satuan kerja Bagian Anggaran BUN untuk kegiatan investasi diakui dan dicatat oleh BLU sebagai Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan atau Diinvestasikan dan sekaligus diakui dan dicatat sebagai Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN di Neraca.
- Pengeluaran kas atas Dana Kelolaan BLU untuk kegiatan penginvestasian diakui dan dicatat oleh BLU sebagai

reklasifikasi dari Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan /Diinvestasikan menjadi Investasi Non Permanen Lainnya di Neraca.

Aset Lainnya

A.6.5.5 Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Cara Perolehan Aset Tak Berwujud:

- a. Pembelian;
- b. Pengembangan secara internal;
- c. Pertukaran;
- d. Kerjasama;
- e. Donasi/hibah;
- f. Warisan Budaya/Sejarah.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud:

- a. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat terbatas;
- b. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas.

Amortisasi Aset Tak Berwujud:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP berbasis Akrua dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

A.6.6 Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
- Kewajiban pada satuan kerja BPDP Kelapa Sawit diatur kebijakan sebagai berikut :

- g. Utang atas permintaan kelebihan bayar pungutan oleh eksportir (lebih pungut) diakui apabila telah ada surat ketetapan lebih bayar dari BPD PKS atas permohonan pengembalian kelebihan bayar dari eksportir.
- h. Utang atas penyaluran biodiesel diakui pada saat Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) menyampaikan tagihan kepada BPD PKS yang nilainya telah diverifikasi oleh Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).
- i. Utang terhadap biaya riset diakui pada saat perjanjian riset ditandatangani oleh BPD PKS dan Lembaga riset sebesar pencairan Tahap I. Pengakuan utang atas biaya riset tahap II dan III diakui sebesar hasil monitoring tahap sebelumnya.
- j. Utang terhadap biaya surveyor dicatat apabila telah ada tagihan dari surveyor yang dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS) dan telah diverifikasi oleh PPK.

Ekuitas

A.6.7 Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

A.6.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap

A.6.9 Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual

A.6.10 Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun

2015.

*Akuntansi
Penanganan
Pandemi
COVID-19*

A.7 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi COVID-19, dijelaskan mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam penanganan pandemi COVID-19 sebagai berikut:

1. Akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 menjadi bagian dari laporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan;
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud disusun menggunakan sistem aplikasi pelaporan dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
3. Pencatatan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat;
4. Entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan melakukan pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari peristiwa luar biasa;
5. Dalam hal diperlukan, entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan dapat menyusun laporan manajerial transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 sebagai laporan pendukung dan dapat menjadi bagian dari laporan keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2023, pagu anggaran lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengalami kenaikan yang disebabkan karena adanya kenaikan belanja pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit. Perubahan pagu berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut.

URAIAN	31 Desember 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
Pendapatan		
Pendapatan	Rp 35.649.259.831.000	Rp 35.889.754.515.000
Pendapatan	Rp 35.649.259.831.000	Rp 35.889.754.515.000
Belanja		
Belanja Pegawai	Rp 81.680.789.000	Rp 80.208.189.000
Belanja Barang	Rp 804.632.703.000	Rp 793.368.565.000
Belanja Modal	Rp 320.675.503.000	Rp 382.712.571.000
Jumlah Belanja	Rp 1.206.988.995.000	Rp 1.256.289.325.000
Belanja BLU		
Belanja Barang-BLU	Rp 5.629.937.513.000	Rp 21.276.070.424.000
Belanja Modal-BLU	Rp 5.494.668.000	Rp 60.654.321.000
Jumlah Belanja-BLU	Rp 5.635.432.181.000	Rp 21.336.724.745.000
Total Jumlah Belanja	Rp 6.842.421.176.000	Rp 22.593.014.070.000

Sedangkan perubahan pagu estimasi pendapatan anggaran per kelompok pendapatan dan pagu anggaran belanja per jenis belanja adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

URAIAN	31 Desember 2023		Naik/Turun
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	
Pendapatan			
Pendapatan Jasa Layanan Umum	34.813.360.764.000	34.849.691.684.000	36.330.920.000
Pendapatan Hibah BLU	-	37.921.982.000	37.921.982.000
Pendapatan BLU Lainnya	835.899.067.000	1.002.135.199.000	166.236.132.000
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN Iuran Badan Usaha	-	5.650.000	5.650.000
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan	-	-	0
Pendapatan Denda	-	-	0
Pendapatan Lain-Lain	-	-	0
Pendapatan	35.649.259.831.000	35.889.754.515.000	240.494.684.000

b. Belanja

URAIAN	31 Desember 2023		Naik/Turun
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	
Belanja			
Belanja Pegawai			
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	60.077.748.000	51.890.899.000	-8.186.849.000
Belanja Lembur	21.603.041.000	27.207.290.000	5.604.249.000
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)		1.110.000.000	1.110.000.000
Jumlah Belanja Pegawai	81.680.789.000	80.208.189.000	-1.472.600.000
Belanja Barang Non BLU			
Belanja Barang Operasional	175.987.146.000	185.537.963.000	9.550.817.000
Belanja Barang Non Operasional	47.218.966.000	55.044.179.000	7.825.213.000
Belanja Barang Persediaan	15.981.701.000	16.053.620.000	71.919.000
Belanja Jasa	140.438.606.000	111.635.558.000	-28.803.048.000
Belanja Pemeliharaan	312.623.368.000	301.644.278.000	-10.979.090.000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	111.566.616.000	121.107.641.000	9.541.025.000
Belanja Perjalanan Luar Negeri	816.300.000	2.345.326.000	1.529.026.000
Jumlah Belanja Barang Non BLU	804.632.703.000	793.368.565.000	-11.264.138.000
Belanja Modal Non BLU			
Belanja Modal Tanah		199.903.000	199.903.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	192.539.546.000	195.850.057.000	3.310.511.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.299.960.000	130.850.410.000	31.550.450.000
Belanja Modal Lainnya	28.835.997.000	55.812.201.000	26.976.204.000
Jumlah Belanja Modal Non BLU	320.675.503.000	382.712.571.000	62.037.068.000
Jumlah Belanja Non BLU	1.206.988.995.000	1.256.289.325.000	49.300.330.000
Belanja BLU			
Belanja Barang-BLU	5.629.937.513.000	21.276.070.424.000	15.646.132.911.000
Belanja Modal-BLU	5.494.668.000	60.654.321.000	55.159.653.000
Jumlah Belanja BLU	5.635.432.181.000	21.336.724.745.000	15.701.292.564.000
Total Jumlah Belanja	6.842.421.176.000	22.593.014.070.000	15.750.592.894.000

Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan maka perubahannya adalah sebagai berikut:

KODE	KEGIATAN	31 Desember 2023	
		Anggaran Awal	Anggaran Revisi
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko		
4802	Komunikasi Edukasi dan Standardisasi	905.300.000	855.678.000
4803	Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	6.947.682.000	6.631.417.000
4804	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	4.587.289.000	3.941.155.000
4805	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	33.984.000	33.984.000
4806	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	186.275.000	125.503.000
6212	Komunikasi Edukasi dan Standardisasi	38.167.519.000	36.345.006.000
6213	Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	15.036.520.000	17.221.932.000
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	1.703.691.000	1.619.958.000
6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	3.446.240.000	3.437.361.000
6216	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	9.347.946.000	9.415.473.000
	Jumlah Belanja Program CD	80.362.446.000	79.627.467.000

KODE	KEGIATAN	31 Desember 2023	
		Anggaran Awal	Anggaran Revisi
WA	Program Dukungan Manajemen		
4711	Legislasi dan Litigasi	128.600.000	324.150.000
4715	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	530.105.340.000	610.889.563.000
4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	4.744.186.000	7.275.573.000
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	151.054.279.000	154.417.282.000
4722	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	1.099.800.000	1.237.167.000
4725	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	437.198.344.000	398.076.794.000
	Jumlah Belanja Program WA	1.124.330.549.000	1.172.220.529.000
	Jumlah Rupiah Murni	1.204.692.995.000	1.251.847.996.000
WA	Program Dukungan Manajemen		
4712	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	5.398.363.366.000	20.799.622.540.000
4836	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	21.950.857.000	31.130.201.000
4837	Pengelolaan Organisasi dan SDM	74.349.813.000	76.105.690.000
4838	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	1.718.180.000	1.998.424.000
4839	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	1.981.150.000	1.731.400.000
4713	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	19.896.682.000	19.896.682.000
4714	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	18.359.502.000	221.356.374.000
4716	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	15.524.211.000	63.702.942.000
4717	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	11.942.024.000	18.712.236.000
4720	Pengelolaan Organisasi dan SDM	31.302.667.000	42.808.785.000
4721	Pengelolaan Organisasi dan SDM	33.344.834.000	50.388.946.000
4723	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	442.016.000	442.016.000
4724	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	725.080.000	736.080.000
4726	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	300.000.000	300.000.000
4727	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	436.155.000	1.463.605.000
6886	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	4.795.644.000	6.328.824.000
	Jumlah Belanja BLU	5.635.432.181.000	21.336.724.745.000
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko		
6213	Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	-	1.327.162.000
	Jumlah Belanja Program CD	-	1.327.162.000
WA	Program Dukungan Manajemen		
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	2.296.000.000	3.114.167.000
4725	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	-	-
	Jumlah Belanja Program WA	2.296.000.000	3.114.167.000
	Jumlah Belanja Hibah Luar Negeri	2.296.000.000	4.441.329.000
	Jumlah	6.842.421.176.000	22.593.014.070.000

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan
Rp35.557.630.163.612,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp35.557.630.612,00** atau mencapai **99,07 persen** dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **RP35.889.754.515,00**. Pendapatan lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari Pendapatan Badan Layanan Umum, Pendapatan Pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa, Pendapatan Denda dan Pendapatan Lain-

lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 DESEMBER 2023		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Angg.
Usaha Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	213.849.380	100,0%
Pendapatan dari Penjualan Tanah Gedung dan Bangunan	-	245.770.774	100,0%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1.660.203.565	100,0%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	469.441.673	100,0%
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	5.650.000	1.293.216.202	22888,8%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	-	30.000.000	100,0%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	-	-	100,0%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	309.217.868	100,0%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	255.931.900	100,0%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	391.803.969	100,0%
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	168.910.766	100,0%
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	7.625.560	100,0%
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	686.568.012	100,0%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	301.730.477	100,0%
Sub total	5.650.000	6.034.270.146	106801,2%

Uraian	31 DESEMBER 2023		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa Layanan Umum	252.666.941.000	263.379.033.609	104,2%
Pendapatan Investasi			
Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	34.430.680.000.000	32.393.330.489.134	94,1%
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.002.135.199.900	2.369.305.407.394	236,4%
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	-	100.083.008.053	100,0%
Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	166.344.743.000	204.555.952.778	123,0%
Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	37.921.982.000	224.703.422.899	-
Pendapatan Lain-lain BLU	-	1.697.597.318	100,0%
Jumlah BLU	35.889.748.865.900	35.557.054.911.185	99,1%
Pengembalian Pendapatan	-	5.459.017.719	-
Jumlah Netto	35.889.754.515.900	35.557.630.163.612	99,1%

Realisasi Pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar **1,75 persen** dibandingkan realisasi pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Per Akun

Akun	Uraian Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN)%	Perubahan
424136	Pendapatan Investasi	263.379.033.609,00	212.890.810.827,00	23,72%	50.488.222.782,00
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	32.393.330.489.134,00	34.715.185.248.903,00	-6,69%	- 2.321.854.759.769,00
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	204.555.952.778,00	4.023.291.037,00	4984,29%	200.532.661.741,00
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	224.703.422.899,00	71.485.033.447,00	214,34%	153.218.389.452,00
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	2.369.305.407.394,00	1.073.094.199.995,00	120,79%	1.296.211.207.399,00
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	100.083.008.053,00	99.798.661.210,00	0,28%	284.346.843,00
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	1.697.597.318,00	608.657.277,00	178,91%	1.088.940.041,00
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	213.849.380,00	102.233.000,00	109,18%	111.616.380,00
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	245.770.774,00	30.335.674,00	710,17%	215.435.100,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.660.203.565,00	2.476.184.882,00	-32,95%	- 815.981.317,00
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	469.441.673,00	2.093.793.030,00	-77,58%	- 1.624.351.357,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.293.216.202,00	2.400.258.810,00	-46,12%	- 1.107.042.608,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	30.000.000,00	166.092.939,00	-81,94%	- 136.092.939,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	309.217.868,00	476.100.615,00	-35,05%	- 166.882.747,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	255.931.900,00	333.195.712,00	-23,19%	- 77.263.812,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	391.803.969,00	116.929.180,00	235,08%	274.874.789,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	168.910.766,00	4.436.052.418,00	-96,19%	- 4.267.141.652,00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	7.625.560,00			7.625.560,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	686.568.012,00	1.356.778.483,00	-49,40%	- 670.210.471,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	301.730.477,00	92.000.000,00	227,97%	209.730.477,00
PENGEMBALIAN PENDAPATAN					
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	340.663.719,00			
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	5.118.354.000,00			
Total Pengembalian Pendapatan		5.459.017.719,00			
Total Pendapatan		35.557.630.163.612,00	36.191.165.857.439,00	-1,75%	- 633.535.693.827,00

Penurunan Pendapatan terbanyak berasal dari akun Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Hal ini disebabkan karena perubahan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada

Kementerian Keuangan, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023 ditetapkan tarif terendah USD 0 s.d. 55 untuk pengenaan harga Crude Palm Oil (CPO) dibawah atau sama dengan USD 680/ton dan tarif tertinggi sebesar USD 240 untuk pengenaan harga CPO diatas USD 1430/ton. Adanya perubahan kebijakan dasar penetapan Harga Referensi CPO Kementerian Perdagangan sesuai dengan Permendag Nomor 46 tahun 2022 dimana sebelumnya menggunakan dua harga CPO tertinggi namun sekarang menggunakan harga CPO median dan harga CPO yang paling mendekati median (Harga CPO CIF Rotterdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia) serta perkembangan harga CPO yang cenderung mengalami penurunan karena telah pulihnya suplai minyak nabati pesaing dan penurunan permintaan dari beberapa negara menyebabkan realisasi Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (424138) sebesar Rp32.393.330.489.134,00 atau 94,1 persen dari estimasi pendapatannya. Selain itu, terjadi penurunan pendapatan untuk satuan kerja non BLU merupakan pendapatan bunga pengelolaan rekening perbankan pada satker Kantor Pusat DJPb.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN)%
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	3.882.481.594	7.129.373.167	-45,54%
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan	30.000.000	166.092.939	-81,94%
Pendapatan Denda	309.217.868	476.100.615	-35,05%
Pendapatan Lain-Lain	1.812.570.684	6.366.921.197	-71,53%
Jumlah	6.034.270.146	14.138.487.918	-57,32%
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLU	32.861.265.475.521	34.932.099.350.767	-5,93%
Pendapatan Hibah BLU	224.703.422.899	71.485.033.447	214,34%
Pendapatan BLU Lainnya	2.471.086.012.765	1.173.501.518.482	110,57%
Jumlah BLU	35.557.054.911.185	36.177.085.902.696	-1,71%
Pengembalian Pendapatan	5.459.017.719	58.533.175	-
Jumlah Netto	35.557.630.163.612	36.191.165.857.439	-1,75%

Realisasi Belanja Per Kegiatan per 31 Desember 2023

B.2. REALISASI BELANJA

Realisasi Belanja
Rp22.480.034.444.624,00

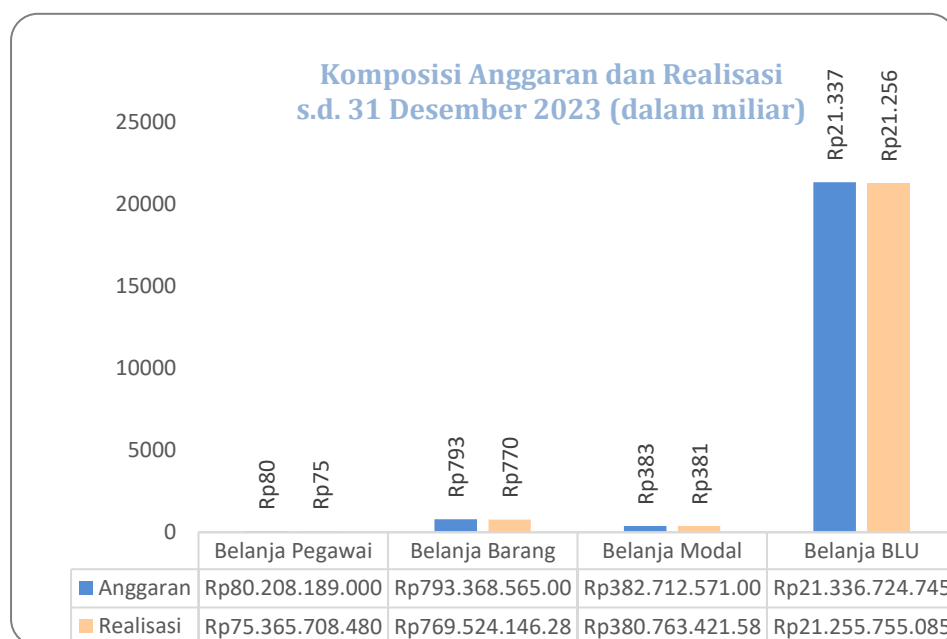
Realisasi Belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp22.480.034.444.624,00** atau **99,5 persen** (termasuk realisasi belanja satker BLU) dari anggaran belanja sebesar **Rp22.593.014.070.000,00**. Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah pengembalian belanja Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebesar **Rp1.374.016.894,00**.

Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2023		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	80.208.189.000	75.365.708.480	93,96
Belanja Barang	793.368.565.000	769.524.146.280	96,99
Belanja Modal	382.712.571.000	380.763.521.587	99,49
Jumlah	1.256.289.325.000	1.225.653.376.347	97,56
Belanja Barang-BLU	21.276.070.424.000	21.198.274.724.570	99,63
Belanja Modal-BLU	60.654.321.000	57.480.360.598	94,77
Jumlah BLU	21.336.724.745.000	21.255.755.085.168	99,62
Pengembalian Belanja	-	1.374.016.894	100,00
Total Belanja	22.593.014.070.000	22.480.034.444.624	99,50

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Terhadap pagu dan realisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan tersebut, terdapat pagu anggaran sebesar **Rp255.351.000,00** dan realisasi anggaran sebesar **Rp101.474.351,00** atau **39,74 persen** dari anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 yang telah menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19 dengan rincian sebagai berikut.

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Khusus Penanganan COVID-19
per 31 Desember 2023*

URAIAN	31 DESEMBER 2023		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	75.996.000	66.837.270	87,95
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	10.546.000	10.165.680	96,39
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	34.054.000	12.123.800	35,60
Jumlah	120.596.000	89.126.750	73,91
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	50.742.000	12.347.601	24,33
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	84.013.000	-	
Jumlah BLU	134.755.000	12.347.601	9,16
Pengembalian Belanja	-	-	-
Total Belanja	255.351.000	101.474.351	39,74

Sedangkan realisasi belanja Direktorat Jenderal Perbendaharaan menurut sumber dana/program/kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Per Kegiatan per 31 Desember 2023

KODE	KEGIATAN	31 Desember 2023	
		Anggaran Awal	Realisasi
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko		
4802	Komunikasi Edukasi dan Standardisasi	855.678.000	807.027.200
4803	Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	6.631.417.000	6.304.277.114
4804	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	3.941.155.000	3.807.214.587
4805	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	33.984.000	30.044.000
4806	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	125.503.000	113.372.000
6212	Komunikasi Edukasi dan Standardisasi	36.345.006.000	34.899.947.174
6213	Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	17.221.932.000	16.376.506.790
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	1.619.958.000	1.433.765.369
6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	3.437.361.000	3.247.232.633
6216	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	9.415.473.000	9.060.983.422
	Jumlah Belanja Program CD	79.627.467.000	76.080.370.289

KODE	KEGIATAN	31 Desember 2023	
		Anggaran Awal	Realisasi
WA	Program Dukungan Manajemen		
4711	Legislasi dan Litigasi	324.150.000	283.548.200
4715	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	610.889.563.000	594.388.933.133
4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	7.275.573.000	6.690.784.924
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	154.417.282.000	146.985.103.073
4722	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	1.237.167.000	1.113.601.355
4725	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	398.076.794.000	397.041.995.703
	Jumlah Belanja Program WA	1.172.220.529.000	1.146.503.966.388
	Jumlah Rupiah Murni	1.251.847.996.000	1.222.584.336.677
WA	Program Dukungan Manajemen		
4712	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	20.799.622.540.000	20.748.770.766.043
4836	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	31.130.201.000	30.395.696.467
4837	Pengelolaan Organisasi dan SDM	76.105.690.000	65.347.176.132
4838	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	1.998.424.000	1.922.481.811
4839	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	1.731.400.000	1.727.431.329
4713	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	19.896.682.000	19.629.831.768
4714	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	221.356.374.000	216.392.520.213
4716	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	63.702.942.000	60.369.870.286
4717	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	18.712.236.000	17.003.379.616
4720	Pengelolaan Organisasi dan SDM	42.808.785.000	41.229.919.727
4721	Pengelolaan Organisasi dan SDM	50.388.946.000	48.149.216.647
4723	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	442.016.000	360.780.039
4724	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	736.080.000	342.131.758
4726	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	300.000.000	299.977.500
4727	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	1.463.605.000	1.457.310.017
6886	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	6.328.824.000	2.356.595.824
	Jumlah Belanja BLU	21.336.724.745.000	21.255.755.085.177
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko		
6213	Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	1.327.162.000	959.417.770
	Jumlah Belanja Program CD	1.327.162.000	959.417.770
WA	Program Dukungan Manajemen		
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	3.114.167.000	735.605.000
4725	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	-	-
	Jumlah Belanja Program WA	3.114.167.000	735.605.000
	Jumlah Belanja Hibah Luar Negeri	4.441.329.000	1.695.022.770
	Jumlah	22.593.014.070.000	22.480.034.444.624

Realisasi belanja netto sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 40,23 persen dari realisasi belanja netto sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Realisasi Belanja mengalami penurunan yang signifikan pada Belanja pegawai dan belanja barang BLU.

Penurunan realisasi belanja tersebut disebabkan karena realisasi penyaluran belanja penyaluran insentif biodiesel mengalami penurunan. Pada tahun 2023 selisih kurang Harga Indeks Pasar (HIP) minyak solar dengan HIP biodiesel mengalami penurunan. Selisih HIP biodiesel dan HIP solar bulan Desember 2023 mulai mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya menjadi sebesar

Rp672,14/liter (diluar Ongkos Angkut dan Pajak Pertambahan Nilai), namun jumlah pembayaran insentif biodiesel tahun 2023 mengalami penurunan. Volume penyaluran biodiesel s.d. 31 Desember 2023 sebesar 12.263.783 kiloliter dimana volume biodiesel yang dibayar mencapai 8.687.761 kiloliter. Penyaluran selisih harga biodiesel ini bermanfaat dalam penyerapan CPO pada tingkat hulu dan mengurangi impor minyak solar sehingga diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit dan terealisasinya salah satu kebijakan nasional utama Pemerintah yaitu Mandatori Biodiesel. Selama kurun waktu delapan tahun terakhir, tingkat pencampuran biodiesel terus ditingkatkan dari 15 persen (B15) pada tahun 2015, 20 persen (B20) pada tahun 2016, dan 30 persen (B30) pada tahun 2020. Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah dalam mempercepat transisi energi inklusif dan berkelanjutan, mulai 1 Februari 2023 tingkat campuran mandatori biodiesel kembali dinaikkan menjadi 35 persen (B35). Namun demikian, implementasi B35 tersebut belum dilakukan secara penuh karena masih memerlukan relaksasi sehingga implementasi B35 baru dimulai efektif per 1 Agustus 2023. Kebijakan B35 tersebut diharapkan dapat menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel bagi industri dalam negeri. Implementasi kebijakan juga diperkirakan akan menghemat devisa sebesar USD 10,75 miliar dan meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar Rp16,76 triliun. Kebijakan B35 juga diproyeksikan akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO₂.

Perbandingan realisasi belanja Direktorat Jenderal Perbendaharaan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	75.365.706.480	286.876.871.853	-73,73%
Belanja Barang	769.524.146.280	706.380.398.640	8,94%
Belanja Modal	380.763.521.587	166.163.164.864	129,15%
Jumlah	1.225.653.374.347	1.159.420.435.357	5,71%
Belanja Barang BLU	21.198.274.724.570	36.446.898.436.930	-41,84%
Belanja Modal BLU	57.480.360.598	5.392.503.893	965,93%
Jumlah BLU	21.255.755.085.168	36.452.290.940.823	-41,69%
Pengembalian Belanja	1.374.016.894	296.870.161	-
Jumlah Netto	22.480.034.442.621	37.611.414.506.019	-40,23%

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp75.324.206,780

Realisasi belanja pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp75.324.206.780,00** Dan **Rp286.815.947.635,00**. Realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar **73,74 persen** dari realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Penurunan realisasi tersebut disebabkan karena pengalihan gaji terpusat periode tahun 2023.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	Rp -	Rp 165.431.434.320	-100,00%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp -	Rp 2.810.136	-100,00%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	Rp -	Rp 10.501.265.768	-100,00%
Belanja Tunj. Anak PNS	Rp -	Rp 3.088.146.514	-100,00%
Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp -	Rp 9.836.030.000	-100,00%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp -	Rp 1.491.560.000	-100,00%
Belanja Tunj. PPh PNS	Rp -	Rp 454.219.505	-100,00%
Belanja Tunj. Beras PNS	Rp -	Rp 8.676.278.340	-100,00%
Belanja Uang Makan PNS	Rp 49.569.790.430	Rp 54.577.732.970	-9,18%
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	Rp -	Rp 40.025.000	-100,00%
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	Rp -	Rp 714.560.000	-100,00%
Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp -	Rp 6.110.805.000	-100,00%
Belanja Uang Lembur	Rp 25.795.918.050	Rp 25.952.004.300	-0,60%
Jumlah Belanja Kotor	Rp 75.365.708.480	Rp 286.876.871.853	-73,73%
Pengembalian Belanja Pegawai	Rp 41.501.700	Rp 60.924.218	-31,88%
Jumlah Belanja	Rp 75.324.206.780	Rp 286.815.947.635	-73,74%

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp21.967.174.121.430,00

Realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp21.967.174.121.430,00** dan **Rp37.153.042.889.627,00**.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	Rp 177.857.258.393	Rp 172.733.136.787	2,97%
Belanja Barang Non Operasional	Rp 52.054.257.899	Rp 35.118.973.883	48,22%
Belanja Persediaan	Rp 15.686.598.322	Rp 18.232.914.977	-13,97%
Belanja Jasa	Rp 105.957.924.700	Rp 97.645.613.318	8,51%
Belanja Pemeliharaan	Rp 300.299.224.948	Rp 237.676.918.681	26,35%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 115.062.305.281	Rp 143.565.883.082	-19,85%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp 2.150.487.399	Rp 1.406.957.906	-
Jumlah Belanja	Rp 769.068.056.942	Rp 706.380.398.634	8,87%
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	Rp -	Rp -	0,00%
Belanja Barang BLU	Rp 21.198.730.813.910	Rp 36.446.898.436.936	-41,84%
Jumlah Belanja BLU	Rp 21.198.730.813.910	Rp 36.446.898.436.936	-41,84%
Pengembalian Belanja	Rp 624.749.422	Rp 235.945.943	164,78%
Jumlah Belanja	Rp 21.967.174.121.430	Rp 37.153.042.889.627	-40,87%

Realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan 40,87 persen dibandingkan realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Penurunan realisasi belanja tersebut disebabkan karena realisasi penyaluran belanja penyaluran insentif biodiesel mengalami penurunan. Pada tahun 2023 selisih kurang Harga Indeks Pasar (HIP) minyak solar dengan HIP biodiesel mengalami penurunan. Selisih HIP biodiesel dan HIP solar bulan Desember 2023 mulai mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya menjadi sebesar Rp672,14/liter (diluar Ongkos Angkut dan Pajak Pertambahan Nilai), namun jumlah pembayaran insentif biodiesel tahun 2023 mengalami penurunan. Volume penyaluran biodiesel s.d. 31 Desember 2023 sebesar 12.263.783 kiloliter dimana volume biodiesel yang dibayar mencapai 8.687.761 kiloliter. Penyaluran selisih harga biodiesel ini bermanfaat dalam penyerapan CPO pada tingkat hulu dan mengurangi impor minyak solar sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit dan terealisasinya salah satu kebijakan nasional utama Pemerintah yaitu Mandatori Biodiesel. Selama kurun waktu delapan tahun terakhir, tingkat pencampuran biodiesel terus ditingkatkan dari 15 persen (B15) pada tahun 2015, 20 persen (B20) pada tahun 2016, dan 30 persen (B30) pada tahun 2020. Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah dalam mempercepat transisi energi inklusif dan berkelanjutan, mulai 1 Februari 2023 tingkat campuran mandatori biodiesel kembali dinaikkan

menjadi 35 persen (B35). Namun demikian, implementasi B35 tersebut belum dilakukan secara penuh karena masih memerlukan relaksasi sehingga implementasi B35 baru dimulai efektif per 1 Agustus 2023. Kebijakan B35 tersebut diharapkan dapat menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel bagi industri dalam negeri. Implementasi kebijakan juga diperkirakan akan menghemat devisa sebesar USD 10,75 miliar dan meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar Rp16,76 triliun. Kebijakan B35 juga diproyeksikan akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO₂.

Selain itu, realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp101.474.351,00 atau 39,74 persen dari pagu anggaran sebesar Rp255.351.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Barang Khusus Penanganan COVID-19
Per 31 Desember 2023*

URAIAN	31 DESEMBER 2023		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	75.996.000	66.837.270	87,95
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	10.546.000	10.165.680	96,39
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	34.054.000	12.123.800	35,60
Jumlah	120.596.000	89.126.750	73,91
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	50.742.000	12.347.601	24,33
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	84.013.000	-	-
Jumlah BLU	134.755.000	12.347.601	9,16
Pengembalian Belanja	-	-	-
Total Belanja	255.351.000	101.474.351	39,74

B.4.1 Belanja Barang BLU

Belanja Barang BLU
Rp21.198.274.724.579,00

Realisasi belanja barang BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp Rp21.198.274.724.579,00** dan **Rp36.446.898.436.936,00**. Realisasi belanja barang BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar **41,84 persen** dibandingkan realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Penurunan realisasi belanja tersebut disebabkan karena realisasi penyaluran belanja penyaluran insentif biodiesel mengalami penurunan. Pada tahun 2023 selisih kurang Harga Indeks Pasar (HIP) minyak solar dengan HIP biodiesel mengalami penurunan. Selisih HIP biodiesel dan HIP solar bulan Desember 2023 mulai mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya menjadi sebesar Rp672,14/liter (diluar Ongkos Angkut dan Pajak Pertambahan Nilai), namun jumlah pembayaran insentif biodiesel tahun 2023 mengalami penurunan. Volume penyaluran biodiesel s.d. 31 Desember 2023 sebesar 12.263.783 kiloliter dimana volume biodiesel yang dibayar mencapai 8.687.761 kiloliter. Penyaluran selisih harga biodiesel ini bermanfaat dalam penyerapan CPO pada tingkat hulu dan mengurangi impor minyak solar sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit dan terealisasinya salah satu kebijakan nasional utama Pemerintah yaitu Mandatori Biodiesel. Selama kurun waktu delapan tahun terakhir, tingkat pencampuran biodiesel terus ditingkatkan dari 15 persen (B15) pada tahun 2015, 20 persen (B20) pada tahun 2016, dan 30 persen (B30) pada tahun 2020. Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah dalam mempercepat transisi energi inklusif dan berkelanjutan, mulai 1 Februari 2023 tingkat campuran mandatori biodiesel kembali dinaikkan menjadi 35 persen (B35). Namun demikian, implementasi B35 tersebut belum dilakukan secara penuh karena masih memerlukan relaksasi sehingga implementasi B35 baru dimulai efektif per 1 Agustus 2023. Kebijakan B35 tersebut diharapkan dapat menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel bagi industri dalam negeri. Implementasi kebijakan juga diperkirakan akan menghemat devisa sebesar USD 10,75 miliar dan meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar Rp16,76 triliun. Kebijakan B35 juga diproyeksikan akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO₂.

Perbandingan Belanja Barang BLU 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 145.698.826.680	Rp 133.899.241.143	8,81%
Belanja Barang	Rp 11.301.528.454	Rp 9.295.209.503	21,58%
Belanja Jasa	Rp 46.948.434.957	Rp 50.184.304.088	-6,45%
Belanja Pemeliharaan	Rp 1.510.255.263	Rp 1.535.835.224	-1,67%
Belanja Perjalanan	Rp 36.060.685.265	Rp 22.636.819.400	59,30%
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp 20.749.226.038.375	Rp 36.164.055.179.838	-42,62%
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	Rp -	Rp -	-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	Rp 566.216.415	Rp 603.914.790	-6,24%
Belanja Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup	Rp 207.406.480.901	Rp 64.427.184.472	221,92%
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 12.347.601	Rp 133.466.478	-90,75%
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp -	Rp 127.282.000	-100,00%
Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja	Rp 21.198.730.813.911	Rp 36.446.898.436.936	-41,8%
Pengembalian Belanja	Rp 456.089.332		-
Jumlah Belanja	Rp 21.198.274.724.579	Rp 36.446.898.436.936	-41,84%

Selain itu, realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 pada satuan kerja BLU lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19 sebesar **Rp12.347.601,00** atau **9,16 persen** dari pagu anggaran sebesar **Rp134.755.000,00** dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Barang Khusus Penanganan COVID-19 Per 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2023		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 50.742.000	Rp 12.347.601	24,33
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID	Rp 84.013.000	Rp -	-
Total Belanja	Rp 134.755.000	Rp 12.347.601	9,16

B.5 Belanja Modal

Realisasi belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp437.536.116.413,00** dan **Rp171.555.668.757,00**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Belanja Modal
Rp437.536.116.413,00

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	Rp 199.773.000	Rp -	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 195.294.503.102	Rp 73.363.622.899	166,20%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp -	Rp -	-
Belanja Pemasangan Nilai Peralatan dan Mesin		Rp 4.910.000	
Belanja Perjalanan Nilai Peralatan dan Mesin		Rp 1.238.000	
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp 182.867.283	Rp 34.844.000	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 54.844.936.119	Rp 14.339.979.684	282,46%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp 74.664.460.233	Rp 50.794.161.822	46,99%
Belanja Modal Lainnya	Rp 54.639.603.954	Rp 26.290.590.750	107,83%
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	Rp 937.377.896	Rp 1.333.817.709	-29,72%
Jumlah Belanja	Rp 380.763.521.587	Rp 166.163.164.864	129,15%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	Rp 17.240.566.051	Rp 3.188.136.023	440,77%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	Rp 37.364.274.160		
Belanja Modal Lainnya BLU	Rp 2.875.520.387	Rp 2.204.367.870	30,45%
Jumlah Belanja BLU	Rp 57.480.360.598	Rp 5.392.503.893	965,93%
Pengembalian Belanja	Rp 707.765.772	Rp -	-
Jumlah Belanja Total	Rp 437.536.116.413	Rp 171.555.668.757	155,04%

Realisasi belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar **155,04 persen** dibandingkan realisasi belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan realisasi belanja modal secara umum disebabkan karena kenaikan belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal Gedung dan Bangunan

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal Tanah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp199.773.000** dan **Rp0,00**. Terdapat kenaikan Belanja Modal Tanah di KPPN Gorontalo.

Belanja Modal Tanah
Rp199.773.000,00

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	Rp 199.773.000	Rp -	-
Jumlah Belanja Kotor	Rp 199.773.000	Rp -	-
Pengembalian Belanja Modal	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja	Rp 199.773.000	Rp -	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
Rp195.477.370.385,00

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp195.477.370.385,00** dan **Rp73.404.614.899,00**. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar **166,33 persen** dibandingkan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan ini disebabkan karena adanya belanja peralatan komputer terbesar pada satker Kantor Pusat DJPb.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 195.294.503.102	Rp 73.363.622.899	166,20%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp -	Rp -	-
Belanja Pemasangan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp 4.910.000	-
Belanja Perjalanan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp 1.238.000	-
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp 182.867.283	Rp 34.844.000	424,82%
Jumlah Belanja Kotor	Rp 195.477.370.385	Rp 73.404.614.899	166,30%
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja	Rp 195.477.370.385	Rp 73.404.614.899	166,30%

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan Rp
Rp128.801.630.580,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp128.801.630.580,00** dan **Rp65.134.141.506,00**. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar **97,75 persen** dibandingkan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan ini disebabkan karena adanya pembangunan gedung lingkup DJPb yang terbesar pada satuan kerja Kanwil DJPb Prov Kalimantan Utara, KPPN Sumbawa Besar dan satker KPPN Balige, serta belanja renovasi untuk gedung satker lingkup DJPb.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 54.844.936.119	Rp 14.339.979.684	282,46%
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp 74.664.460.233	Rp 50.794.161.822	46,99%
Jumlah Belanja Kotor	Rp 129.509.396.352	Rp 65.134.141.506	98,83%
Pengembalian Belanja	Rp 707.765.772	Rp -	-
Jumlah Belanja	Rp 128.801.630.580	Rp 65.134.141.506	97,75%

B.5.4 Belanja Modal Lainnya

*Belanja Modal Lainnya
Rp55.576.981.850,00*

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp55.576.981.850,00** dan **Rp27.624.408.459,00**. Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar **101,198 persen** dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	Rp 54.639.603.954	Rp 26.290.590.750	100,00%
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	Rp 937.377.896	Rp 1.333.817.709	-29,72%
Jumlah Belanja Kotor	Rp 55.576.981.850	Rp 27.624.408.459	101,19%
Pengembalian Belanja Modal	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja	Rp 55.576.981.850	Rp 27.624.408.459	101,19%

B.5.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU
Rp17.240.566.051,00*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp17.240.566.051,00** dan **Rp3.188.136.023,00**. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar **440,77 persen** dibandingkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan belanja ini disebabkan karena peningkatan kebutuhan peralatan dan mesin dalam rangka operasional perkantoran.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	Rp 17.240.566.051	Rp 3.188.136.023	440,77%
Jumlah Belanja Kotor	Rp 17.240.566.051	Rp 3.188.136.023	441%
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	0,00%
Jumlah Belanja	Rp 17.240.566.051	Rp 3.188.136.023	440,77%

B.5.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU

Realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp37.364.274.160,00** dan **Rp0,00**. Terjadi peningkatan belanja modal Gedung dan Bangunan BLU di Tahun 2023 karena Pembangunan Gedung kantor Pusat Investasi Pemerintah yang berlokasi di Jalan Dr.GSSJ Ratulangi No.17 Gondangdia, Mentang, Jakarta Pusat.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan-BLU
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan-BLU
Rp37.364.274.160,00

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	Rp 37.364.274.160	Rp -	-
Jumlah Belanja Kotor	Rp 37.364.274.160	Rp -	0%
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	0,00%
Jumlah Belanja	Rp 37.364.274.160	Rp -	-

B.5.7 Belanja Lainnya BLU

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp2.875.520.387,00** dan **Rp2.204.367.870,00**. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar **30,45 persen** dibandingkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Lainnya-BLU
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Belanja Lainnya - BLU
Rp2.875.520.387,00

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya BLU	Rp 2.875.520.387	Rp 2.204.367.870	30,45%
Jumlah Belanja Kotor	Rp 2.875.520.387	Rp 2.204.367.870	30%
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	0,00%
Jumlah Belanja	Rp 2.875.520.387	Rp 2.204.367.870	30,45%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp26.999.593,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp26.999.593,00** dan **Rp7.721.142,00**.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian per satker disajikan dalam lampiran Laporan keuangan.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada KPPN Tanjung Redep per 31 Desember 2023 dan 2022 masing masing adalah sebesar Rp26.999.593 dan Rp7.721.142 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	Rp 26.999.593	Rp 7.721.142
Jumlah	Rp 26.999.593	Rp 7.721.142

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp9.818.134.618,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp9.818.134.618,00** dan **Rp5.882.390.135,00**.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berasal dari pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor dan GUP-Kartu Kredit Pemerintah yang belum dibayarkan ke Bank Penerbit KKP.

Rincian per satker disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan ini. Rekapitulasi rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp 56.293.769	Rp 4.842.284.230
Kas lainnya di BLU	Rp 9.761.840.849	Rp 1.040.105.905
Total	Rp 9.818.134.618	Rp 5.882.390.135

C.3 Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada BLU
Rp31.805.963.615.669,00

Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp31.805.963.615.669,00** dan **Rp24.557.304.394.286,00**. Kas pada Badan Layanan Umum merupakan kas tunai (yang sudah disahkan BUN maupun yang belum disahkan) dan kas pada rekening Bank yang berada pada Badan Layanan Umum BPDP Kelapa Sawit, Pusat Investasi Pemerintah dan BPD Lingkungan Hidup.

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas dan Bank BLU	Rp 2.668.363.615.669	Rp 1.526.704.394.286
Setara Kas Lainnya - BLU	Rp 29.137.600.000.000	Rp 23.030.600.000.000
Jumlah	Rp 31.805.963.615.669	Rp 24.557.304.394.286

Rincian per satker Kas pada badan layanan umum disajikan sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2023
Kas dan Bank - BLU	
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Rp 2.149.863.002.696
BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP	Rp 87.639.043.227
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	Rp 430.861.569.746
Jumlah	Rp 2.668.363.615.669
Setara kas Lainnya - BLU	
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Rp 27.770.000.000.000
BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP	Rp 1.367.600.000.000
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	
Jumlah	Rp 29.137.600.000.000
Total	Rp 31.805.963.615.669

C.4 Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek -
BLU
Rp8.867.103.195.682,00

Saldo Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp8.867.103.195.682,00** dan **Rp3.057.426.608.776,00**. Investasi Jangka Pendek – BLU merupakan pengelolaan kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan operasional BLU dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga maupun bagi hasil dan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Investasi dapat dicairkan/dikonversi dalam bentuk uang dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan;

- b. Investasi memiliki tingkat risiko rendah; dan
- c. Investasi ditujukan dalam rangka manajemen kas.

Saldo Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum terdiri dari:

- a. Pada bulan Desember 2019, BPDPKS melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) tradeable seri FR0063 dan FR0065 dengan nilai penempatan Rp190.700.000.000,00. Kemudian pada awal tahun 2020 melakukan pembelian SBN tradeable seri FR0064, FR0065, FR0076, FR0080, FR0082, dan FR0083 dengan nilai penempatan Rp1.003.206.376.776,00. Pada tahun 2022 BPDPKS melakukan pembelian kembali SBN tradeable seri FR0070, FR0077, FR0091 dan FR0093 dengan nilai penempatan Rp492.173.300.000,00 dan pada tahun 2023 melakukan pembelian SBN tradeable seri FR0056, FR0070, FR0077, FR0082, FR0084, FR0095, FR0096 dan FR0098 dengan nilai penempatan Rp2.353.435.918.906,00. Pada tahun 2023 BPDPKS melakukan penjualan SBN tradeable seri FR0063, FR0064, FR0065, FR0076, FR0080, FR0082 dan FR0083 dengan nilai sebesar Rp934.907.400.000,00 melalui Bank Rakyat Indonesia sebagai bank kustodian sehingga total SBN yang dimiliki menjadi Rp3.104.608.195.682,00. Atas penempatan tersebut, dicatat sebagai SBN available for sale. Deposito dengan jangka waktu s.d. 6 bulan sebesar Rp5.800.000.000.000,00 ditempatkan pada BRI.
- b. Nilai Investasi Jangka Pendek - BLU PIP per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.200.000.000.000 berbentuk deposito dengan jangka waktu 12 bulan.

*Rincian Investasi Jangka Pendek-BLU
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Satker	31 Desember 2023	31 Desember 2022
BPDP Kelapa Sawit	7.667.103.195.682	2.000.580.076.776
Pusat Investasi Pemerintah	1.200.000.000.000	1.056.846.532.000
Jumlah	8.867.103.195.682	3.057.426.608.776

C.5 Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar Di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp2.089.282.144.332,00** dan **Rp1.559.968.031.629,00**. Belanja di bayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa belum diterima

*Belanja Dibayar Dimuka
Rp2.089.282.144.332,00*

seluruhnya. Rekapitulasi Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	Rp 2.089.282.144.332	Rp 1.557.868.953.830
Belanja Modal yang Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	Rp -	Rp 2.099.077.799
Jumlah	Rp 2.089.282.144.332	Rp 1.559.968.031.629

C.6 Uang Muka Belanja (*prepayment*)

Uang Muka Belanja
(*prepayment*)
Rp57.197.160,00

Saldo Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp57.197.160,00** dan **Rp1.019.845.910,00**. Uang Muka Belanja merupakan pembayaran dimuka atas belanja yang diberikan terlebih dahulu sebelum pegawai/rekanan menyerahkan hasil pekerjaan/jasa. Transaksi uang muka belanja pada Ditjen Perbendaharaan merupakan transaksi persekot gaji hasil reklasifikasi akun Belanja Pegawai dibayar dimuka (*prepaid*). Pengertian dari Persekot Gaji adalah pinjaman uang tidak berbunga yang diberikan kepada pegawai yang dipindahkan/ dimutasi untuk kepentingan dinas. Pedoman pembayaran persekot gaji sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran nomor SE-125/A/621/1095 tanggal 3 Oktober 1995 hal Persekot/Panjar Gaji bagi Pegawai Negeri. Sehubungan dengan pelaksanaan sentralisasi pembayaran gaji pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan PER-41/PB/2016 tanggal 19 Oktober 2016, maka transaksi Uang Muka Belanja (*prepayment*) hanya pada satker Kantor Pusat DJPb.

*Rincian Uang Muka Belanja (*prepayment*)
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Satker	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kantor Pusat DJPb	57.197.160	1.019.845.910
Jumlah	57.197.160	1.019.845.910

C.7 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih
harus diterima
Rp587.180.096.355,00

Pendapatan yang masih harus diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp587.180.096.355,00** dan **Rp457.355.338.948,00**. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rekapitulasi Saldo Pendapatan yang masih harus diterima disajikan sebagai berikut:

Satker	31 Desember 2023	31 Desember 2023
BPD Perkebunan Kelapa Sawit	Rp 151.821.150.415	Rp 123.487.459.403
Pusat Investasi Pemerintah	Rp 22.669.258.455	Rp 18.544.307.936
BPD Lingkungan Hidup	Rp 412.678.574.318	Rp 315.319.780.609
Kanwil DJPb Jawa Tengah	Rp 5.219.000	Rp 3.791.000
KPPN Purworejo	Rp 139.500	Rp -
Kanwil DJPb Kalimantan Timur	Rp 5.754.667	Rp -
Jumlah	Rp 587.180.096.355	Rp 457.355.338.948

C.8 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak
Rp256.205.006,00

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp256.205.006,00** dan **Rp412.966.823,00**. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang Bukan Pajak berasal dari Piutang PNPB sebesar **Rp256.205.006,00** dan Piutang Lainnya sebesar **Rp0,00**. Rekapitulasi Saldo Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Satker	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau	Rp 121.627.095	Rp 117.540.595
KPPN Tangerang	Rp 134.577.911	Rp 10.915.846
Jumlah	Rp 256.205.006	Rp 128.456.441

C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih –Piutang Bukan
Pajak defisit
Rp252.138.939

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp252.138.939,00** dan **Rp129.878.993,00**. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang bukan pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rekapitulasi Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	Rp -	0,5%	Rp -
Kurang Lancar	Rp -	10%	Rp -
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp 252.138.939	100%	Rp 252.138.939
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp 252.138.939		Rp 252.138.939

Bagian Lancar TP/TGR
Rp12.000.000,00

C.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp12.000.000,00** dan **Rp12.000.000,00**. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rekapitulasi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) disajikan sebagai berikut:

Satker	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KPPN Cirebon	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
Jumlah	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR defisit
Rp60.000,00

C.11 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp60.000,00** dan **Rp60.000,00**.

Penyisihan piutang tak tertagih – Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) disajikan sebagai berikut:

Satker	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	Rp 60.000	Rp 60.000
Jumlah	Rp 60.000	Rp 60.000

Piutang dari kegiatan operasional Badan Layanan Umum
Rp6.446.545.338,00

C.12 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Piutang dari kegiatan operasional badan layanan umum per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp6.446.545.338,00** dan **Rp0,00**. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah

diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rekapitulasi Saldo Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum disajikan sebagai berikut:

Satker	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	Rp 6.446.545.338	Rp -
Jumlah	Rp 6.446.545.338	Rp -

C.13 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari kegiatan Operasional BLU

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-Piutang
dari Kegiatan
Operasional BLU
Rp32.232.727,00

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp32.232.727,00** dan **Rp0,00**. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rekapitulasi Saldo Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Satker	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang - Piutang dari kegiatan Operasional BLU	Rp 32.232.727	Rp -
Jumlah	Rp 32.232.727	Rp -

C.14 Persediaan

Persediaan
Rp16.979.669.050,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp16.979.669.050,00** dan **Rp17.374.861.469,00**. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	Rp 16.618.765.911	Rp 16.980.555.095
Barang untuk Pemeliharaan	Rp 360.903.139	Rp 394.306.374
Persediaan Lainnya	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 16.979.669.050	Rp 17.374.861.469

C.15 Dana Bergulir

Dana Bergulir

Rp1.299.899.736.679,00

Saldo Dana Bergulir Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp1.299.899.736.679,00** dan **Rp1.332.605.202.696,00**. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Saldo Dana Bergulir ini merupakan milik satuan kerja BLU BPD Lingkungan Hidup.

Satker	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Dana Bergulir	Rp 1.299.899.736.679	Rp 1.332.605.202.696
Jumlah	Rp 1.299.899.736.679	Rp 1.332.605.202.696

C.16 Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum

Investasi Non Permanen

BLU

Rp8.019.775.521.545,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp8.019.775.521.545,00** dan **Rp6.640.289.050.977,00**. Investasi jangka panjang non permanen lainnya adalah penanaman dana untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak secara berkelanjutan, dengan tujuan untuk memberikan penghasilan tetap. Saldo Investasi Jangka Panjang ini merupakan milik satuan kerja Pusat Investasi Pemerintah yang berupa penyaluran dana bergulir kepada Lembaga Penyalur/*Linkage* untuk pembiayaan ultra mikro yang dijamin dengan piutang secara fidusia. Terdapat selisih **Rp27** karena pembulatan yang tidak bisa masuk dalam aplikasi SAKTI. Rincian Investasi Non Permanen Lainnya pada Satker Pusat Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

LKBB / Linkage	31 Desember 2023
Pegadaian	Rp 25.592.859.683
PNM	Rp 7.235.632.183.898
Koperasi Syariah Annisa	Rp 40.000.000
KSPPS Bhakti Huria Syariah	Rp 200.000.000
KSPPS Mandiri Sejahtera	Rp 466.666.666
KSP Karya Baitul Mandiri	Rp 41.400.000.001
Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia	Rp 12.898.210.561
LKMA Mojo Agung	Rp 405.000.000
LKMA Tani Makmur	Rp 225.000.000
PT LKMS MAHIRAH MUAMALAH (Syariah)	Rp 2.776.666.663
KSPPS BMT AL AMANAH SINJAI (Syariah)	Rp 443.333.337
Kopdit Pelangi Kasih	Rp 4.986.666.667
Koperasi Al Manar	Rp 1.550.000.000
KSPPS RAYA BANDA MADANI	Rp 27.850.000.003
KSPPS Artha Bahana Syariah	Rp 8.027.586.209
KSP Jujur Utama Mandiri	Rp 857.142.857
KSP Sila Mukti	Rp 1.371.428.572
KSP Sari Sedana Bali	Rp 1.714.285.714
KSP KUD Mintorogo	Rp 8.000.000.000
KSPPS Abdi Kerta Rahaja	Rp 3.733.333.334
KSP GUNA PRIMA DANA	Rp 3.266.666.666
PT LKM Gentha Persada	Rp 232.000.000
KSPPS BMT Mitra Umat	Rp 2.320.000.000
KSU Gapoktan AI Basiko II	Rp 1.200.000.000
KSPPS BMT Jati	Rp 500.000.000
PT LKM Batang	Rp 7.000.000.000
KSPPS Benteng Mikro Indonesia	Rp 60.000.000.000
KSPPS Mitra Dhuafa Syariah	Rp 32.000.000.000
Koperasi Jasa Karya Abadi	Rp 4.500.000.000
KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi	Rp 11.680.000.000
KSP Permata Siaga	Rp 800.000.000
KSPPS BMT Al Ishlah	Rp 150.000.000
KSPPS BMT Ibaadurrahman	Rp 3.080.000.000
Koperasi Konsumen Central Utama Mandiri	Rp 400.000.000
KSPPS BMT Bina Auladi Mandiri	Rp 510.000.000
KSPPS BMT Ayyasi	Rp 380.000.000
BMT Niaga Utama	Rp 1.200.000.000
BMT Al Hidayah Ummat Sejahtera	Rp 600.000.000
KSP Karya Mandiri	Rp 625.000.000
BAV	Rp 511.141.490.743
Direct Lending	Rp 20.000.000
Jumlah	Rp 8.019.775.521.572

C.17 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang
Non Permanen Lainnya
Rp8.019.775.521.545,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp1.237.505.000.000,00** dan **Rp0,00**. Investasi jangka panjang non permanen lainnya adalah aset yang tidak dimiliki secara berkelanjutan atau dengan jangka waktu tidak lebih dari lima tahun. Saldo Investasi Jangka Panjang ini merupakan milik satuan kerja BPD PKS yang berupa Investasi pada Surat Utang Negara (SUN) dengan kategori Hold to Maturity (HTM) senilai Rp1.237.505.000.000,00. SUN dengan kategori HTM diniatkan untuk dimiliki sampai jatuh tempo, dimana sebesar Rp1.028.105.000.000,00 jatuh tempo pada tahun 2024 dan senilai Rp209.400.000.000,00 akan jatuh tempo pada tahun 2026.

C.18 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir
Diragukan Tertagih
defisit
Rp261.801.663.542,00

Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp261.801.663.542,00** dan **Rp167.148.325.297,00**. Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih ini merupakan milik satuan kerja BLU BPD Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Dana Bergulir	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	Rp 712.554.991.866	0,5%	Rp 3.562.774.959,3
Kurang Lancar	Rp 23.141.634.008	10%	Rp 2.314.163.401
Diragukan	Rp (9.011.634.414)	50%	Rp (4.505.817.207)
Macet	Rp 260.430.542.389	100%	Rp 260.430.542.389
Lunas Pokok	Rp (31.295.137)		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp 987.084.238.712		Rp 261.801.663.542

Dana DNS dalam keadaan macet sebagai penambah akumulasi penyisihan piutang tak tertagih dan pengurang ekuitas (tidak menambah Beban Penyisihan) yang dicatat sesuai dengan Nota Dinas Direktur APK nomor ND-1102/PB.6/2022 tanggal 9 November 2022 Nilai ini meliputi penyisihan untuk piutang pembiayaan FDB Sektor Kehutanan dan dana DNS eks KLH.

Atas beberapa piutang yang macet tersebut, telah dilakukan pengajuan penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebanyak 472 Debitur dengan jumlah nilai Rp128.124.895.418 dengan rincian nilai pokok Rp91.874.084.708, bunga Rp34.952.310.972, dan denda Rp1.298.499.737.

C.19 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya

Investasi Jangka Panjang
Non Permanen Lainnya
Diragukan Realisasinya
Rp21.071.190.476,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp21.071.190.476,00** dan **Rp0,00**. Saldo Investasi Jangka Panjang ini merupakan milik satuan kerja BPDPKS yang berupa Investasi pada Surat Utang Negara (SUN).

C.20 Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih

Investasi Non Permanen
BLU Bentuk Tagihan
Diragukan Tertagih
defisit
Rp40.372.794.275,00

Saldo Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar defisit **Rp40.372.794.275,00** dan **Rp33.201.445.255,00**. Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum diragukan tertagih merupakan estimasi penyisihan tidak tertagih atas penyaluran pembiayaan Ultra Mikro kepada penyalur maupun *linkage*. Saldo ini merupakan milik satuan kerja BLU PIP dengan rincian penyisihan dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021 sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Investasi	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	Rp 8.016.892.188.238	0,5%	Rp 40.084.460.941,2
Kurang Lancar	Rp 2.883.333.334	10%	Rp 288.333.333,4
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp -	100%	Rp -
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp 8.019.775.521.572		Rp 40.372.794.274,6

C.21 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan TP/TGR
Rp1.862.811.088,00

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp1.862.811.088,00** dan **Rp1.907.443.863,00**. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian per

debitur disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan sedangkan Rekapitulasi Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut:

No	Satker	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Kantor Pusat DJPb	Rp 1.845.811.088	Rp 1.878.443.863
2	KPPN Cirebon	Rp 17.000.000	Rp 29.000.000
Jumlah		Rp 1.862.811.088	Rp 1.907.443.863

C.22 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp1.828.396.488,00** dan **Rp1.639.612.264,00**. Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan Tagihan Penjualan Angsuran yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian per debitur disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan sedangkan Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih - TP/TGR
defisit
Rp1.828.396.488,00

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	Rp 17.000.000	0,5%	Rp 85.000
Kurang Lancar	Rp -	10%	Rp -
Diragukan	Rp 34.999.200	50%	Rp 17.499.600
Macet	Rp 1.810.811.888	100%	Rp 1.810.811.888
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp 1.862.811.088		Rp 1.828.396.488

C.23 Tanah

Saldo aset tetap tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Perbendaharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp9.179.987.122.830,00** dengan kuantitas **1,723,797m²** dan **Rp9.072.828.813.486,00** dengan kuantitas **1,722,925m²**. Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara dengan rekapitulasi mutasi adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	3.000.000.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	3.075.000.000

Tanah

Rp9.179.987.122.830,00

Mutasi Kurang:	
Revaluasi Aset	(125.000.000)
Penghapusan	
Saldo Per 31 Desember 2023	5.950.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	5.950.000.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 Desember 2023	
			BERTAMBAH		BERKURANG			
	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tanah	1.722.925	9.072.828.813.486	20.112	121.884.346.544	19.240	14.726.037.200	1.723.797	9.179.987.122.830
TANAH PERSIL	1.692.377	9.025.605.925.486,00	19.886	121.684.573.544	19.240	14.726.037.200	1.693.023	9.132.564.461.830,00
TANAH NON PERSIL	23.555	34.558.987.000,00	6	-	-	-	23.561	34.558.987.000,00
LAPANGAN	6.993	12.663.901.000,00	220	199.773.000	-	-	7.213	12.863.674.000,00

C.24 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp1.868.094.238.213,00** dan **Rp1.636.741.890.276,00**. Mutasi Peralatan dan Mesin per tanggal pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JAN 2023		BERTAMBAH		BERKURANG		SALDO PER 31 Desember 2023	
	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
Peralatan dan Mesin	164.794	1.636.741.890.276	21.163	395.977.843.972	12.048	164.625.496.035	173.909	1.868.094.238.213
ALAT BESAR DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAT BANTU	541	58.562.654.080	38	4.078.342.779	37	2.795.246.450	542	59.845.750.409
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1.199	181.706.926.860	181	58.495.307.512	150	36.351.698.371	1.230	203.850.536.001
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	184	292.060.427	61	135.273.999	48	101.123.214	197	326.211.212
ALAT BENGKEL BERMESIN	29	2.049.225.506	1	4.518.314.400	-	-	30	6.567.539.906
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	57	133.580.636	1	1.155.000	1	181.000	57	134.554.636
ALAT UKUR	477	1.338.154.445	17	49.890.000	12	35.640.000	482	1.352.404.445
ALAT PENGOLAHAN	-	-	7	43.656.000	7	43.656.000	-	-
ALAT KANTOR	29.849	122.016.563.634	812	8.866.074.292	805	4.477.570.023	29.856	126.405.067.903
ALAT RUMAH TANGGA	97.050	292.152.866.748	7.321	48.036.205.379	3.628	11.673.159.812	100.743	328.515.912.315
ALAT STUDIO	4.463	115.215.062.278	658	54.669.868.049	439	21.925.685.981	4.682	147.959.244.346

Peralatan dan Mesin

Rp1.868.094.238.213,00

URAIAN	SALDO PER 1 JAN 2023		BERTAMBAH		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
ALAT KOMUNIKASI	1.266	5.825.383.832	51	635.425.090	31	87.849.340	1.286	6.372.959.582
PERALATAN PEMANCAR	112	28.842.206.064	31	10.997.685.000	23	6.771.975.986	120	33.067.915.078
PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAT KEDOKTERAN	152	561.327.695	115	359.449.531	105	318.236.501	162	602.540.725
ALAT KESEHATAN UMUM	8	19.181.080	4	174.870.550	4	176.689.550	8	17.362.080
UNIT ALAT LABORATORIUM	-	-	32	76.342.290	32	76.342.290	-	-
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	-	1	438.450.000	1	438.450.000	-	-
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-
SENJATA API	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	-	12	159.077.990	12	159.077.990	-	-
KOMPUTER UNIT	17.193	225.688.224.551	9.711	119.953.460.471	5.651	66.765.833.994	21.253	278.875.851.028
PERALATAN KOMPUTER	12.101	601.573.198.965	1.994	82.938.794.486	992	11.681.890.469	13.103	672.830.102.982
ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAT PENGEBORAN NON MESIN	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMUR	4	172.326.000	-	-	-	-	4	172.326.000
ALAT DETEKSI	-	-	1	3.401.193	1	3.401.193	-	-
ALAT PELINDUNG	10	10.450.000	-	-	-	-	10	10.450.000
ALAT SAR	19	98.310.000	19	58.875.000	15	45.000.000	23	112.185.000
ALAT KERJA PENERBANGAN	-	-	47	641.080.071	47	641.080.071	-	-
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	6	55.207.800	6	55.207.800	-	-
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-
PERALATAN OLAH RAGA	80	484.187.475	42	591.637.090	1	500.000	121	1.075.324.565
TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-

Aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak sesuai tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan telah direklasifikasi ke kode barang yang sesuai. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

C.25 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp2.188.851.669.204,00

Saldo Aset Tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah **Rp2.188.851.669.204,00** dan **Rp2.061.188.950.999,00**. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
	JUMLAH	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		JUMLAH	NILAI
			JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gedung dan Bangunan	4.066	2.061.188.950.999	81	163.721.525.276	82	36.058.807.071	4.065	2.188.851.669.204
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	907	1.450.963.629.152,00	15	93.872.217.865	17	15.796.253.534	905	1.529.039.593.483,00
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	2.958	571.082.488.944,00	61	68.450.395.173	61	20.012.859.537	2.958	619.520.024.580,00
TUGU/TANDA BATAS	201	39.142.832.903,00	5	1.398.912.238	4	249.694.000	202	40.292.051.141,00

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp1.114.536.000,00

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp1.114.536.000,00** dan **Rp1.114.536.000,00**. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
			BERTAMBAH		BERKURANG			
	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI
JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	1.463.887	1.114.536.000	-	-	-	-	1.463.887	1.114.536.000
Jalan dan Jembatan	1.463.875	479.879.000	-	-	-	-	1.463.875	479.879.000
JALAN	1.463.801	479.879.000	-	-	-	-	1.463.801	479.879.000
JEMBATAN	74		-	-	-	-	74	-
Irigasi	7	133.819.000	-	-	-	-	7	133.819.000
BANGUNAN AIR IRIGASI	3	26.979.000	-	-	-	-	3	26.979.000
BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	1	4.671.000	-	-	-	-	1	4.671.000
BANGUNAN AIR KOTOR	3	102.169.000	-	-	-	-	3	102.169.000
Jaringan	5	500.838.000	-	-	-	-	5	500.838.000
INSTALASI GARDU LISTRIK	3	463.219.000	-	-	-	-	3	463.219.000
JARINGAN AIR MINUM	2	37.619.000	-	-	-	-	2	37.619.000

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

C.27 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp12.881.015.778,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah **Rp12.881.015.778,00** dan **Rp12.056.073.376,00**. Rincian Aset Tetap Lainnya terdiri dari Aset Tetap Renovasi sebesar Rp11.490.150.385,00 dan Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp1.390.865.393,00. Aset Tetap Renovasi adalah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari pengakuan belanja modal atas biaya renovasi aset yang bukan milik satuan kerja. Mutasi transaksi aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
			BERTAMBAH		BERKURANG			
	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI
ASET TETAP LAINNYA	5.743	12.056.073.376	13	5.795.299.474	30	4.970.357.072	5.726	12.881.015.778
Aset Tetap Renovasi	30	10.675.172.282	10	5.785.335.175	30	4.970.357.072	10	11.490.150.385
PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI							-	-
GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	26	5.033.694.826	6	5.109.197.922	25	4.766.719.702	7	5.376.173.046
JALAN IRIGASI DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	2	144.058.750			2	144.058.750	-	-
ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	2	5.497.418.706	4	676.137.253	3	59.578.620	3	6.113.977.339
Aset Tetap Lainnya	5.713	1.380.901.094	3	9.964.299	-	-	5.716	1.390.865.393
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	5.509	729.592.244	-	-			5.509	729.592.244
KARTOGRAFI NASKAH DAN LUKISAN	105	233.149.900	-	-			105	233.149.900
BARANG BERCORAK KESENIAN	93	352.230.550	3	9.964.299			96	362.194.849
ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	6	65.928.400	-	-	-	-	6	65.928.400

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

C.28 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp
37.863.584.959,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp37.863.584.959,00** dan **Rp13.133.398.275,00**. Saldo konstruksi dalam pengerjaan yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1	Kanwil Prov Papua Barat	Rp 564.401.362
2	Kantor Pusat DJPb	Rp 1.899.768.753
3	KPPN Jakarta I	Rp 394.193.149
4	KPPN Surakarta	Rp 69.247.000
5	KPPN Sumbawa Besar	Rp 6.481.368.109
6	Kanwil DJPb Prov NTT	Rp 31.931.346
7	Kanwil DJPb Prov Kalimantan Timur	Rp 28.422.675.240
Jumlah		Rp 37.863.584.959

C.29 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap defisit
Rp2.091.517.794.503,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing defisit **Rp2.091.517.794.503,00** dan **Rp1.866.450.361.632,00**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian Saldo sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset

Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 9.072.828.813.486	Rp 1.487.452.858.179	Rp 7.585.375.955.307,00
2	Gedung dan Bangunan	Rp 1.636.741.890.276	Rp 603.296.768.540	Rp 1.033.445.121.736,00
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 1.114.536.000	Rp 652.491.209	Rp 462.044.791,00
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 12.056.073.376	Rp 115.676.575	Rp 11.940.396.801,00
Akumulasi Penyusutan		Rp 10.722.741.313.138	Rp 2.091.517.794.503	Rp 8.631.223.518.635,00

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

C.30 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp875.112.569.306,00

Saldo perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah **Rp875.112.569.306,00** dan **Rp846.281.903.677,00**. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Penyusutan Aset Tak Berwujud berdasarkan PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 berlaku mulai TA 2016. Rekapitulasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	846.281.903.677
Mutasi tambah:	
Pembelian	55.270.971.621
Saldo Per 31 Desember 2023	901.552.875.298
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	26.440.305.992
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	875.112.569.306

No.	Uraian	Nilai
1	Software	Rp 349.569.740.580
2	Lisensi	Rp 525.497.939.726
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 44.889.000
Jumlah		Rp 875.112.569.306

Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	1 JANUARI 2023		MUTASI				PER 31 DESEMBER 2023	
	JML	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		JML	NILAI
			JML	NILAI	JML	NILAI		
ASET TAK BERWUJUD	7.791	846.281.903.677	30	55.270.971.621	82	26.440.305.992	7.739	875.112.569.306
Software	358	372.679.933.752	2	1.962.036.000	80	25.072.229.172	280	349.569.740.580
ASET TAK BERWUJUD	358	372.679.933.752	2	1.962.036.000	80	25.072.229.172	280	349.569.740.580
Lisensi	7.432	473.557.080.925	28	53.308.935.621	2	1.368.076.820	7.458	525.497.939.726
ASET TAK BERWUJUD	7.432	473.557.080.925	28	53.308.935.621	2	1.368.076.820	7.458	525.497.939.726
Aset Tak Berwujud Lainnya	1	44.889.000	-	-	-	-	1	44.889.000
ASET TAK BERWUJUD	1	44.889.000	-	-	-	-	1	44.889.000

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara.

Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan
Rp1.348.604.387,00

C.31 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah **Rp1.348.604.387,00** dan **Rp0,00**.

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp21.009.926.971,00

C.32 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana Kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp21.009.926.971,00** dan **Rp0,00**.

Dana Kelolaan Badan
Layanan Umum
Rp13.112.690.253.718,00

C.33 Dana Kelolaan Badan Layanan Umum

Saldo Dana Kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp13.112.690.253.718,00** dan **Rp7.118.197.617.793,00**. Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2023 berasal dari Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan, yaitu dana yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU. Rekapitulasi Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023
1	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	Rp 12.317.687.803.718
2	Dana Cadangan Pemerintah yang Dikelola BLU	Rp 795.002.450.000
Jumlah		Rp 13.112.690.253.718

C.34 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain

Rp30.795.913.946,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah **Rp30.795.913.946,00** dan **Rp25.462.113.898,00**. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta dalam proses penghapusan dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap. Mutasi aset lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	1 JANUARI 2023		MUTASI				PER 31 DESEMBER 2023	
	JML	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		JML	NILAI
			JML	NILAI	JML	NILAI		
ASET LAIN-LAIN	3.251	25.462.113.898	4.851	71.432.746.541	4.912	40.272.967.258	3.190	56.621.893.181
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	3.249	25.264.635.498	4.769	44.992.440.549	4.855	39.461.162.101	3.163	30.795.913.946
TANAH PERSIL			200	92.228.000			200	92.228.000
ALAT BANTU	6	66.664.000	23	1.149.979.518	14	727.045.344	15	489.598.174
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	10	736.139.501	71	7.472.774.872	61	6.362.769.660	20	1.846.144.713
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	3	4.733.740	2	1.015.300	3	2.565.200	2	3.183.840
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	3	4.635.000	1	181.000	1	181.000	3	4.635.000
ALAT UKUR	1	1.650.000	-	-	1	1.650.000	-	-
ALAT KANTOR	714	3.647.741.971	565	2.912.281.952	688	2.944.004.937	591	3.616.018.986
ALAT RUMAH TANGGA	1.744	4.720.830.243	2.158	5.469.656.267	2.424	4.994.822.090	1.478	5.195.664.420
ALAT STUDIO	73	6.387.472.271	209	3.159.551.517	200	2.324.363.807	82	7.222.659.981
ALAT KOMUNIKASI	220	422.273.147	31	87.849.340	42	123.133.152	209	386.989.335
PERALATAN PEMANCAR	-	-	1	935.000	1	935.000	-	-
ALAT KEDOKTERAN	1	200.000	-	-	1	200.000	-	-
ALAT KESEHATAN UMUM	-	-	1	3.500.000	1	3.500.000	-	-
KOMPUTER UNIT	207	4.179.233.907	905	10.298.616.807	857	9.867.957.794	255	4.609.892.920
PERALATAN KOMPUTER	222	4.444.529.488	579	5.170.167.476	543	4.712.976.617	258	4.901.720.347
PERALATAN OLAH RAGA	-	-	1	500.000	1	500.000	-	-
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3	409.980.000	6	6.442.680.000	5	5.070.103.000	4	1.782.557.000
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	7	179.300.000	16	2.730.523.500	12	2.324.454.500	11	585.369.000
JARINGAN LISTRIK	1	13.397.000	-	-	-	-	1	13.397.000
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	30	1.930.230	-	-	-	-	30	1.930.230
BARANG BERCORAK KESENIAN	4	43.925.000	-	-	-	-	4	43.925.000

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara.

C.35 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp614.689.075.224,00** dan **Rp582.035.565.260,00**. Rekapitulasi akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan

dan Amortisasi Aset

Lainnya defisit

Rp614.689.075.224,00

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2023*

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Software	Rp 372.679.933.752	Rp 347.909.783.524	Rp 24.770.150.228
Lisensi	Rp 473.557.080.925	Rp 237.718.201.889	Rp 235.838.879.036
Jumlah	Rp 846.237.014.677	Rp 585.627.985.413	Rp 260.609.029.264
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp 25.264.635.498	Rp 29.061.089.811	Rp (3.796.454.313)
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp 197.478.400	Rp -	Rp 197.478.400
Jumlah	Rp 25.462.113.898	Rp 29.061.089.811	Rp (3.598.975.913)
Total	Rp 871.699.128.575	Rp 614.689.075.224	Rp 257.010.053.351

C.36 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp144.007.613.353,00

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp144.007.613.353,00** dan **Rp21.556.184.910,00**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rekapitulasi Utang kepada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	Rp 257.173.200	Rp 306.095.000
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	Rp 119.661.380.738	Rp 15.391.572.100
3	Belanja Modal yang masih harus dibayar	Rp -	Rp -
4	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar		
5	Utang kepada Pihak Ketiga BLU		
6	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp 14.327.218.566	Rp 4.840.706.630
7	Dana Pihak Ketiga		
8	Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	Rp 9.761.840.849	Rp 897.231.766
Total		Rp 144.007.613.353	Rp 21.435.605.496

C.37 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di
Muka
Rp1.186.095.245,00

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp1.186.095.245,00** dan **Rp1.505.831.273,00**. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan diterima dimuka pada Direktorat Jenderal

Perbendaharaan per tanggal pelaporan disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

Uang Muka dari KPPN
Rp26.999.593,00

C.38 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp26.999.593,00** dan **Rp7.721.142,00**. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian Uang Muka dari KPPN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp1.227.820,00

C.39 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp1.227.820,00** dan **Rp22.232.325,00**. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pajak tersebut yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran per 30 September 2023. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

Utang Jangka Panjang
BLU kepada BUN
Rp22.411.294.321.466,00

C.40 Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN

Saldo Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp22.411.294.321.466,00** dan **Rp15.091.091.871.466,00**.

Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN merupakan kewajiban atas penerimaan Dana Kelolaan dari BA BUN 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah. Rincian Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Satker BLU	31 Desember 2023	31 Desember 2022
BPD Lingkungan Hidup	Rp (12.411.294.321.466)	Rp 5.091.091.871.466
Pusat Investasi Pemerintah	Rp (10.000.000.000.000)	Rp 10.000.000.000.000
Jumlah	Rp (22.411.294.321.466)	Rp 15.091.091.871.466

Ekuitas

Rp55.683.703.776,00

C.41 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp55.683.836.703.776,00** dan **Rp40.653.782.064.617,00**.

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp
35.590.590.605.767,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Saldo Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp 35.590.590.605.767,00** dan **Rp36.218.770.875.413,00**. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari layanan yang dikendalikan oleh pemerintah, dan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. PNBP pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Investasi	348.480.003.336	248.166.567.502	40,42%
Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	32.399.764.962.743	34.715.185.248.903	-6,67%
Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	212.684.886.916	12.899.080.777	1548,84%
Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha -	224.703.422.899	71.485.033.447	214,34%
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	2.401.961.676.116	1.165.508.058.454	106,09%
Pendapatan Lain-lain BLU	550.581.635	2.082.015.800	-73,56%
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	213.849.380	102.233.000	109,18%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.620.274.397	2.893.104.686	-44,00%
Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		- 26.567.771	-100,00%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	309.217.868	476.100.615	-35,05%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	301.730.477	92.000.000	227,97%
Jumlah	35.590.590.605.767	36.218.862.875.413	-1,73%

Realisasi Pendapatan PNBP sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar **1,73 persen** dibandingkan realisasi pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Penurunan nilai pendapatan mayoritas berasal dari turunnya pendapatan dana perkebunan kelapa sawit.

Hal ini disebabkan karena perubahan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023 ditetapkan tarif terendah USD 0 s.d. 55 untuk pengenaan harga *Crude Palm Oil* (CPO) dibawah atau sama dengan USD

680/ton dan tarif tertinggi sebesar USD 240 untuk pengenaan harga CPO diatas USD 1430/ton. Adanya perubahan kebijakan dasar penetapan Harga Referensi CPO Kementerian Perdagangan sesuai dengan Permendag Nomor 46 tahun 2022 dimana sebelumnya menggunakan dua harga CPO tertinggi namun sekarang menggunakan harga CPO median dan harga CPO yang paling mendekati median (Harga CPO CIF Rotterdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia) serta perkembangan harga CPO yang cenderung mengalami penurunan karena telah pulihnya suplai minyak nabati pesaing dan penurunan permintaan dari beberapa negara menyebabkan realisasi Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (424138) menurun menjadi sebesar **Rp32.399.764.962.743,00** atau turun **6,67** persen dari estimasi pendapatan tahun lalu.

Selain itu, terjadi kenaikan pendapatan untuk satuan kerja non BLU merupakan pendapatan bunga pengelolaan rekening perbankan pada satker Kantor Pusat DJPb.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp220.973.294.660,00

Saldo Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp220.973.294.660,00** dan **Rp419.768.971.328,00**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)%
Beban Gaji Pokok PNS		164.762.397.720	-100,00%
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS		- 38.842.500	-100,00%
Beban Pembulatan Gaji PNS		2.801.184	-100,00%
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		- 26.070	-100,00%
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS		- 79.652	-100,00%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS		10.437.787.648	-100,00%
Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS		- 738.846	-100,00%
Beban Tunj. Anak PNS		3.066.623.786	-100,00%
Beban Tunj. Struktural PNS		9.836.030.000	-100,00%
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS		- 2.140.000	-100,00%
Beban Tunj. Fungsional PNS		1.491.560.000	-100,00%
Beban Tunj. PPh PNS		454.219.505	-100,00%

Beban Tunj. Beras PNS		8.676.278.340	-100,00%
Beban Uang Makan PNS	49.468.474.430	54.382.776.920	-9,04%
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	- 12.999.350	- 6.856.800	89,58%
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS		40.025.000	-100,00%
Pengembalian Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil		- 150.000	-100,00%
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS		714.560.000	-100,00%
Pengembalian Beban Tunjangan Khusus Papua PNS		- 1.120.000	-100,00%
Beban Tunjangan Umum PNS		6.110.805.000	-100,00%
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS		- 7.850.000	-100,00%
Pengembalian Beban Uang Lembur	- 28.502.350	- 3.120.350	813,43%
Beban Uang Lembur	25.848.312.250	25.954.789.300	-0,41%
Beban Gaji dan Tunjangan	145.698.009.680	133.899.241.143	8,81%
Jumlah	220.973.294.660	419.768.971.328	-47,36%

D.3 Beban Persediaan

Saldo Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp15.571.035.582,00** dan **Rp19.128.041.784,00**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Beban Persediaan
Rp15.571.035.582,00

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	15.571.035.582	19.128.041.784	-18,60%
Jumlah	15.571.035.582	19.128.041.784	-18,60%

D.4 Beban Barang dan Jasa

Saldo Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp20.926.320.742.713,00** dan **Rp33.418.804.649.147,00**. Beban barang dan jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa
Rp20.926.320.742.713,00

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	120.136.613.862	114.253.300.163	5,15%
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	-1.999.298	-10.012.876	-80,03%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	5.798.193.359	0	100,00%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.911.327.432	1.995.728.898	45,88%
Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-89.000	-910.000	-90,22%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	29.940.349.200	31.261.520.750	-4,23%
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-9.803.300	-70.000	13904,71%
Beban Barang Operasional Lainnya	19.001.171.369	23.755.679.636	-20,01%
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	-445.280	-1.283.144	-65,30%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	66.837.270	1.467.554.020	-95,45%
Beban Bahan	42.774.838.140	27.693.773.791	54,46%
Pengembalian Beban Bahan	-1.380.500	-10.000	13705,00%
Beban Honor Output Kegiatan	4.616.330.000	4.944.525.000	-6,64%
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	-72.547.500	-33.115.000	119,08%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	4.376.276.509	2.006.211.113	118,14%
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	-3.300.000	-550.401	499,56%
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	286.813.250	473.593.979	-39,44%
Beban Langganan Listrik	36.833.315.173	33.302.115.795	10,60%
Pengembalian Beban Langganan Listrik	-1.097.452	-38.625.552	-97,16%
Beban Langganan Telepon	3.934.535.975	3.826.463.349	2,82%
Pengembalian Beban Langganan Telepon	-53.391	-1.542.012	-96,54%
Beban Langganan Air	3.016.453.293	2.760.990.267	9,25%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	523.185.898	1.641.639.285	-68,13%
Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya		-5.863.328	-100,00%
Beban Jasa Konsultan	75.750.000	6.105.452.000	-98,76%
Beban Sewa	5.364.261.697	3.722.133.142	44,12%
Beban Jasa Profesi	5.307.194.895	4.557.971.250	16,44%
Pengembalian Beban Jasa Profesi	-855.000	-1.133.500	-24,57%
Beban Jasa Lainnya	52.361.731.989	40.838.938.353	28,22%
Pengembalian Beban Jasa Lainnya		-115.500.000	-100,00%
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	12.123.800	841.337.404	-98,56%
Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		-900.000	-100,00%
Beban Barang	11.717.658.497	9.477.893.256	23,63%
Beban Jasa	47.944.587.402	53.109.668.396	-9,73%
Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	20.321.993.935.922	32.986.289.742.163	-38,39%
Beban Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup	207.406.480.901	64.427.184.472	221,92%
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	12.347.601	133.466.478	-90,75%
Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19		127.282.000	-100,00%
Jumlah	20.926.320.742.713	33.418.804.649.147	-37,38%

Realisasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar **37,38 persen** dibandingkan realisasi per 31 Desember 2022. Di dalam Beban Barang dan Jasa tersebut terdapat beban untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar **Rp79.184.871,00**. Rincian beban untuk penanganan pandemi COVID-19 sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2023
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 66.837.270
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp -
Jumlah	Rp 66.837.270
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 12.347.601
Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp -
Jumlah BLU	Rp 12.347.601
Pengembalian Beban	Rp -
Total Belanja	Rp 79.184.871

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp302.501.989.112,00

Saldo Beban pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp302.501.989.112,00** dan **Rp239.957.908.760,00**. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar **26,06 persen** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)%
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-9.000.972	100,00%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	53.138.417.123	51.584.004.950	3,01%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	3.241.181.441	3.583.197.194	-9,54%
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-100.000	100,00%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	243.919.626.384	182.508.216.537	33,65%
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.819.000	-1.215.855	-543,09%
Beban Pemeliharaan	1.570.750.263	1.535.835.224	2,27%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	639.832.901	756.971.682	-15,47%
Jumlah	302.501.989.112	239.957.908.760	26,06%

Beban Perjalanan Dinas
Rp150.633.639.040,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Saldo Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp150.633.639.040,00** dan **Rp167.593.547.085,00**. Beban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)%
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	- 54.056.569	-8.833.303	511,96%
Beban Perjalanan Biasa	93.179.075.051	84.269.997.518	10,57%
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	- 1.098.000	-890.000	23,37%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.076.805.160	3.652.248.000	39,00%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.715.197.770	33.234.590.755	-67,76%
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	- 7.470.000	-4.590.000	62,75%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.091.227.300	22.409.046.809	-72,82%
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	- 560.000	-1.800.000	-68,89%
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2.150.487.399	1.406.957.906	52,85%
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	- 5.685.800	0	-
Beban Perjalanan	33.489.716.729	22.636.819.400	47,94%
Jumlah	150.633.639.040	167.593.547.085	-10,12%

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar **10,12 persen** dibandingkan realisasi per 31 Desember 2022 dikarenakan berkurangnya kegiatan paket *meeting* dalam kota dan luar kota

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp312.966.366.427,00

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp312.966.366.427,00** dan **Rp298.675.373.107,00**. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	162.570.810.647	147.764.727.471	10,02%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	95.161.513.076	95.742.643.688	-0,61%
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	34.781.749	79.937.565	-56,49%
Beban Penyusutan Irigasi	4.386.459	6.272.367	-30,07%
Beban Penyusutan Jaringan	12.834.442	12.834.442	0,00%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.491.075	2.830.000	-11,98%
Beban Amortisasi Software	4.177.059.966	9.056.049.641	-53,88%
Beban Amortisasi Lisensi	50.749.126.065	45.799.845.528	10,81%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	67.908.841	0	
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	185.454.107	210.232.405	-11,79%
Jumlah	312.966.366.427	298.675.373.107	4,78%

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak tertagih
Rp103.401.534.071,00

Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp103.401.534.071,00** dan **Rp48.805.993.969,00**. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)%
Beban Penyisihan Piutang PNPB	-	7.489.859	-100,00%
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	- 1.402.119	722.062	-294,18%
Beban Penyisihan Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	95.995.937.444	50.639.834.696	89,57%
Beban Penyisihan Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	32.172.368	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan	60.359		
Beban Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan	7.171.349.020	1.757.891.953	-507,95%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -	203.416.999	84.160.695	-341,70%
Jumlah	103.401.534.071	48.805.993.969	111,86%

D.9 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Surplus
Rp96.867.632.624,00

Saldo Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar surplus **Rp96.867.632.624,00** dan surplus **Rp96.211.263.310,00**. Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2.375.416.012	4.600.313.586	-48,36%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	245.770.774	30.335.674	710,17%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.660.203.565	2.476.184.882	-32,95%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	469.441.673	2.093.793.030	-77,58%
Beban dari Pelepasan Aset Non Lancar	-5.752.304.252	-7.364.724.713	-21,89%
Beban Pelepasan Aset	-5.752.304.252	-7.364.724.713	-21,89%
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-3.376.888.240	-2.764.411.127	22,16%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	100.433.320.167	100.363.623.208	0,07%
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang	100.016.253.800	99.637.531.993	0,38%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	277.144.640	-100,00%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	255.816.900	331.282.395	-22,78%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	149.333.057	116.929.180	27,71%
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	735.000	-100,00%
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	7.625.560	0	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	4.290.850	0	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-188.799.303	-1.387.948.771	-86,40%
Beban Persediaan Rusak/Usang	-188.722.903	-1.387.948.771	-86,40%
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-76.400	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	100.244.520.864	98.975.674.437	1,28%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	96.867.632.624	96.211.263.310	0,68%

Surplus/Defisit LO Rp
13.655.089.636.786,00

D.10 SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Saldo Surplus/Defisit Laporan Operasional untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing surplus sebesar **Rp13.655.089.636.786,00** dan surplus sebesar **Rp1.702.339.653.543,00**. Pos Surplus/Defisit Laporan Operasional merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional serta Pos Luar Biasa.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal

Rp40.653.782.064.617,00

Saldo Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp40.653.782.064.617,00** dan **Rp38.057.945.123.283,00**.

E.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO Defisit

Rp13.655.089.636.786,00

Saldo Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp13.655.089.636.786,00** dan surplus sebesar **Rp1.702.339.653.543,00**. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang/lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Yang

Menambah/Mengurangi

Ekuitas Rp756.477.974,00

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Saldo Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar defisit **Rp756.477.974,00** dan **Rp(231.788.347.392,00)**. Koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp756.477.974,00 merupakan koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar Rp(20.035.435,00) dan koreksi kurang nilai persediaan sebesar Rp(252.230.220,00) serta lain-lain sebesar Rp1.028.743.629,00.

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar Entitas
surplus*

Rp1.374.208.524.399,00

Nilai Transaksi Antar Entitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar surplus **Rp1.374.208.524.399,00** dan **Rp1.125.285.635.183,00**. Rincian Transaksi Antar Entitas sebagai berikut.

No	Uraian Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp 1,224,279,359,447	Rp 1,159,123,565,190
2	Diterima dari Entitas Lain	Rp (6,034,270,146)	Rp (14,079,954,743)
3	Transfer Keluar	Rp (112,143,874,183)	Rp (64,855,459,022)
4	Transfer Masuk	Rp 266,395,049,193	Rp 45,081,248,658
5	Pengesahan Hibah Langsung	Rp 1,712,260,088	Rp 16,235,100
Jumlah		Rp 1,374,208,524,399	Rp 1,125,285,635,183

Penjelasan akun-akun Transaksi Antar Entitas:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan nilai realisasi netto belanja;
2. Diterima dari Entitas Lain merupakan nilai realisasi netto PNBPN namun tidak termasuk realisasi PNBPN BPDP Kelapa sawit dan BPD Lingkungan Hidup;
3. Transfer Keluar merupakan nilai transaksi transfer keluar BMN dan persekot gaji (rincian per satker disajikan dalam lampiran);
4. Transfer Masuk merupakan nilai transaksi transfer masuk BMN dan persekot gaji (rincian per satker disajikan dalam lampiran);
5. Pengesahan Hibah Langsung sebesar **Rp1.712.260.088,00** merupakan nilai realisasi pada satuan kerja Kanwil DJPb Prov Riau, Kanwil DJPb Prov Riau dan Kantor Pusat DJPb.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir

Rp55.683.836.703.776,00

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp55.683.836.703.776,00** dan **Rp40.653.782.064.617,00**.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Daftar temuan dan tindak lanjut temuan BPK RI pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan sampai dengan Triwulan IV TA 2023 terlampir.

F.2 Sensus BMN

Pada tahun 2023, Kementerian Keuangan melakukan kegiatan Sensus BMN. Sensus BMN dilaksanakan dengan harapan bahwa nantinya setiap satker dapat melakukan pencatatan BMN yang sesuai dengan ketentuan dan aturan sehingga dapat menghasilkan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang wajar dan validitas data BMN dapat terwujud. Pelaksanaan sensus BMN ini berguna untuk mengetahui kondisi, nilai, dan jumlah BMN dengan cara catatan BMN yang ada dibandingkan dengan keberadaan seluruh BMN yang ada dalam penguasaan dalam hal tertib administrasi BMN. Kemudian, tindak lanjut dari hasil kegiatan inventarisasi BMN pun akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan BMN yang harus ditindaklanjuti dengan koreksi pencatatan.
2. BMN yang belum tercatat sehingga harus ditindaklanjuti dengan pencatatan.
3. BMN yang tidak ditemukan ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Pelaksanaan sensus BMN pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2023 dilakukan untuk BMN ber KIB berupa gedung dan bangunan, tanah, dan kendaraan bermotor. Sedangkan Sensus BMN untuk Peralatan dan Mesin akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Hasil dari Sensus BMN pada pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2023 yaitu terdapat selisih antara nilai aset Gedung dan Bangunan pada aplikasi sakti dan menurut hasil inventarisasi sensus bmn sebesar Rp4.078.469.511,-. Selisih tersebut disebabkan karena ditemukannya 4 nup gedung bangunan yang belum tercatat pada satker Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta. Atas hasil sensus BMN tersebut, Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta akan menindaklanjuti dengan melakukan pencatatan atas 4 NUP Gedung bangunan tersebut pada tahun 2024.

F.3 Pencapaian Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I dan III dengan rincian sebagai berikut.

1. PN I : Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pagu Anggaran PN I adalah **Rp18.722.549.687.000,-** dan total realisasi sebesar **Rp18.716.020.997.278,-**. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN I antara lain sebagai berikut:

No	Program Prioritas / Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian Negara/Lembaga	Rp95.710.000	Rp 91.925.824	96,05	Dokumen	3.000	3.000	100
2	Penajaman Metode Analytical BLU	Rp333.450.000	Rp291.347.000	87,37	Unit Kerja	1	1	100
3	Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir	Rp8.420.708.000	Rp5.866.666.632	67,08	Orang	2.500	3.256	130,2
4	Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang terfasilitasi Dana Program Lingkungan Hidup	Rp208.797.289.000	Rp208.553.067.587	8,21	Milyar	62 M	207,41 M	334,53
5	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel	Rp18.504.577.836.000	Rp18.501.217.990.235	99,98	Kilo Liter	11.180.000	12104512	108,27
Jumlah		Rp18.722.549.687.000	Rp18.716.020.997.278	99,97				

1. PN III: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pagu Anggaran PN III adalah **Rp21.140.558.000,-** dan total realisasi sebesar **Rp14.967.876.209,-**. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN III antara lain sebagai berikut:

No	Program Prioritas / Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Rekomendasi Hasil Uji Dampak Pembiayaan UMi	Rp1.052.800.000	Rp1.042.065.477	98,98	Rekomendasi	2	2	100
2	Implementasi Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial	Rp262.356.000	Rp259.398.487	98,87	Rekomendasi	1	1	100
3	Pendanaan untuk Usaha mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan Umi	Rp19.824.602.000	Rp 13.666.412.245	68,94	Usaha Mikro	2.200.000	2.200.000	100
Jumlah		Rp21.140.558.000	Rp14.967.876.209	70,80				

F.4 Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran

Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atau disebut RPATA adalah rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d. tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. RPATA diatur dalam PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada akhir tahun Anggaran. Pada tahun Anggaran 2023, terdapat 13 satuan kerja lingkup DJPb yang mempunyai pekerjaan yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada Tahun anggaran berikutnya. Daftar Satuan Kerja Lingkup DJPb yang mempunyai pekerjaan dan dibayarkan melalui mekanisme RPATA adalah sebagai berikut:

No	Nama Satker	Jumlah
1	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat	712.308.700
2	Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara	2.367.630.000
3	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	9.366.076.160
4	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang	206.858.552
5	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balikpapan	169.208.671
6	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahuna	804.867.060
7	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Toli Toli	184.606.144
8	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumbawa Besar	2.707.204.910
9	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong	684.249.833
10	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Merauke	559.775.537
11	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wamena	56.433.500
12	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu	406.803.600
13	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara	2.783.904.304
Jumlah		21.009.926.971

F.5 Aset dimanfaatkan Pihak Lain

Terdapat 2 bidang tanah beserta Gedung dan bangunan sebesar Rp409.856.590.000,00 dengan NUP 3 dan NUP 4 pada Kanpus DJPb dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Atas aset tersebut, Kantor Pusat DJPb telah melakukan upaya pengamanan aset dimaksud antara lain:

- 1) melakukan pencarian dan penelusuran dokumen-dokumen terkait bukti kepemilikan atas tanah
- 2) melakukan perbaikan pada laporan barang atau koreksi luasan pada Aplikasi SAKTI

- 3) melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Jakarta Pusat sekaligus menegaskan klaim kepemilikan atas tanah dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah
- 4) melalui Surat Kepala Bagian Umum Nomor S-1/PB.1/PB.14/2024 tanggal 12 Januari 2023 telah disampaikan informasi dan konfirmasi terkait BMN berupa tanah Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan di Cempaka Baru
- 5) menolak permohonan rekomendasi dalam rangka persertifikatan Hak Milik atas tanah yang dimohonkan oleh para warga yang menguasai tanah dimaksud.



LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN



LAPORAN KEUANGAN TA 2023
UAPPA-E I DITJEN PERBENDAHARAAN
Audited

**DAFTAR SATUAN KERJA
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

3

No	Kode Satker	Kode Kanwil	Kewenangan	Uraian Satker
1	409999	-	KP	BPD SAWIT
2	439039	-	KP	BPD LH
3	439165	-	KP	KSAP
4	439171	-	KP	SPAN
5	440781	-	KP	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
6	615081	-	KP	KOMITE INVESTASI PEMERINTAH
7	527010	-	KP	KP DJPB
8	527556	001	KD	KANWIL DJPB PROVINSI ACEH
9	527560	001	KD	KPPN BANDA ACEH
10	527577	001	KD	KPPN MEULABOH
11	527581	001	KD	KPPN LANGSA
12	527598	001	KD	KPPN TAPAK TUAN
13	527603	001	KD	KPPN LHOEK SEUMAWE
14	527610	001	KD	KPPN KUTACANE
15	527624	001	KD	KPPN TAKENGON
16	451562	002	KD	KPPN MEDAN II
17	527645	002	KD	KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA
18	527652	002	KD	KPPN MEDAN I
19	527666	002	KD	KPPN PEMATANG SIANTAR
20	527670	002	KD	KPPN PADANG SIDEMPUN
21	527687	002	KD	KPPN GUNUNG SITOLI
22	527691	002	KD	KPPN TANJUNG BALAI ASAHAN
23	527709	002	KD	KPPN RANTAU PRAPAT
24	527713	002	KD	KPPN SIBOLGA
25	527734	002	KD	KPPN SIDIKALANG
26	527741	002	KD	KPPN TEBING TINGGI
27	527755	002	KD	KPPN BALIGE
28	527776	003	KD	KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA BARAT
29	527780	003	KD	KPPN PADANG
30	527797	003	KD	KPPN BUKITTINGGI
31	527802	003	KD	KPPN SIJUNJUNG
32	527819	003	KD	KPPN SOLOK
33	527823	003	KD	KPPN LUBUK SIKAPING
34	634409	003	KD	KPPN PAINAN
35	527844	004	KD	KPPN PEKANBARU
36	527865	004	KD	KPPN RENGAT
37	527872	004	KD	KPPN DUMAI
38	613739	004	KD	KANWIL DJPB PROVINSI RIAU
39	527890	005	KD	KPPN JAMBI
40	527908	005	KD	KPPN SUNGAI PENUH
41	527912	005	KD	KPPN MUARA BUNGO
42	613743	005	KD	KANWIL DJPB PROVINSI JAMBI
43	634497	005	KD	KPPN KUALA TUNGKAL
44	648762	005	KD	KPPN BANGKO
45	527933	006	KD	KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA SELATAN
46	527940	006	KD	KPPN PALEMBANG
47	527961	006	KD	KPPN LUBUK LINGGAU
48	527975	006	KD	KPPN BATURAJA
49	634530	006	KD	KPPN LAHAT
50	648779	006	KD	KPPN SEKAYU
51	528001	007	KD	KANWIL DJPB PROVINSI LAMPUNG
52	528015	007	KD	KPPN BANDAR LAMPUNG
53	528022	007	KD	KPPN KOTABUMI
54	528036	007	KD	KPPN METRO LAMPUNG
55	634572	007	KD	KPPN LIWA
56	445371	008	KD	KPPN MUKO MUKO
57	528785	008	KD	KPPN BENGKULU
58	528792	008	KD	KPPN MANNA
59	613750	008	KD	KANWIL DJPB PROVINSI BENGKULU
60	634608	008	KD	KPPN CURUP
61	527954	009	KD	KPPN PANGKAL PINANG
62	527982	009	KD	KPPN TANJUNG PANDAN
63	634256	009	KD	KANWIL DJPB PROVINSI BANGKA BELITUNG
64	527162	010	KD	KPPN SERANG
65	634260	010	KD	KANWIL DJPB PROVINSI BANTEN
66	634633	010	KD	KPPN TANGERANG
67	648783	010	KD	KPPN RANGKASBITUNG
68	015114	011	KD	KPPN JAKARTA VI
69	015115	011	KD	KPPN JAKARTA VII
70	015116	011	KD	KPPN KHUSUS PENERIMAAN

No	Kode Satker	Kode Kanwil	Kewenangan	Uraian Satker
71	015117	011	KD	KPPN KHUSUS INVESTASI
72	527027	011	KD	KANWIL DJPb PROVINSI DKI JAKARTA
73	527031	011	KD	KPPN JAKARTA I
74	527048	011	KD	KPPN JAKARTA II
75	527052	011	KD	KPPN JAKARTA III
76	531293	011	KD	KPPN JAKARTA IV
77	579330	011	KD	KPPN JAKARTA V
78	613811	011	KD	KPPN JAKARTA KHUSUS PINJAMAN dan HIBAH
79	451531	012	KD	KPPN BANDUNG II
80	527094	012	KD	KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
81	527102	012	KD	KPPN BANDUNG I
82	527120	012	KD	KPPN CIREBON
83	527137	012	KD	KPPN BOGOR
84	527141	012	KD	KPPN TASIKMALAYA
85	527158	012	KD	KPPN PURWAKARTA
86	527183	012	KD	KPPN KARAWANG
87	527205	012	KD	KPPN GARUT
88	527230	012	KD	KPPN SUKABUMI
89	634661	012	KD	KPPN KUNINGAN
90	648790	012	KD	KPPN SUMEDANG
91	652449	012	KD	KPPN BEKASI
92	451547	013	KD	KPPN SEMARANG II
93	527268	013	KD	KANWIL DJPb PROVINSI JAWA TENGAH
94	527272	013	KD	KPPN SEMARANG I
95	527289	013	KD	KPPN SURAKARTA
96	527293	013	KD	KPPN PURWOREJO
97	527301	013	KD	KPPN PURWOKERTO
98	527315	013	KD	KPPN PEKALONGAN
99	527322	013	KD	KPPN PATI
100	527336	013	KD	KPPN KUDUS
101	527340	013	KD	KPPN MAGELANG
102	527357	013	KD	KPPN TEGAL
103	527361	013	KD	KPPN CILACAP
104	634722	013	KD	KPPN KLATEN
105	648805	013	KD	KPPN SRAGEN
106	648812	013	KD	KPPN PURWODADI
107	648826	013	KD	KPPN BANJARNEGARA
108	497587	014	KD	KPPN WATES
109	527399	014	KD	KPPN YOGYAKARTA
110	634277	014	KD	KANWIL DJPb PROVINSI DI YOGYAKARTA
111	634792	014	KD	KPPN WONOSARI
112	451553	015	KD	KPPN SURABAYA II
113	527411	015	KD	KANWIL DJPb PROVINSI JAWA TIMUR
114	527425	015	KD	KPPN SURABAYA I
115	527432	015	KD	KPPN MALANG
116	527446	015	KD	KPPN KEDIRI
117	527450	015	KD	KPPN MADIUN
118	527467	015	KD	KPPN BONDOWOSO
119	527471	015	KD	KPPN PAMEKASAN
120	527488	015	KD	KPPN BOJONEGORO
121	527492	015	KD	KPPN BANYUWANGI
122	527500	015	KD	KPPN MOJOKERTO
123	527514	015	KD	KPPN PACITAN
124	527521	015	KD	KPPN JEMBER
125	634860	015	KD	KPPN BLITAR
126	648830	015	KD	KPPN SIDOARJO
127	648889	015	KD	KPPN TUBAN
128	528057	016	KD	KANWIL DJPb PROVINSI KALIMANTAN BARAT
129	528061	016	KD	KPPN PONTIANAK
130	528078	016	KD	KPPN SINTANG
131	528082	016	KD	KPPN KETAPANG
132	528099	016	KD	KPPN SINGKAWANG
133	528104	016	KD	KPPN PUTUSSIBAU
134	648893	016	KD	KPPN SANGGAU
135	528125	017	KD	KPPN PALANGKARAYA
136	528146	017	KD	KPPN BUNTOK
137	528150	017	KD	KPPN PANGKALAN BUN
138	613764	017	KD	KANWIL DJPb PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
139	648868	017	KD	KPPN SAMPIT
140	528171	018	KD	KANWIL DJPb PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
141	528188	018	KD	KPPN BANJARMASIN
142	528192	018	KD	KPPN KOTABARU
143	528200	018	KD	KPPN BARABAI
144	634963	018	KD	KPPN TANJUNG

No	Kode Satker	Kode Kanwil	Kewenangan	Uraian Satker
145	648872	018	KD	KPPN PELEHARI
146	528221	019	KD	KPPN SAMARINDA
147	528242	019	KD	KPPN BALIKPAPAN
148	613771	019	KD	KANWIL DJPb PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
149	634934	019	KD	KPPN TANJUNG REDEP
150	528544	020	KD	KANWIL DJPb PROVINSI BALI
151	528551	020	KD	KPPN DENPASAR
152	528565	020	KD	KPPN SINGARAJA
153	635045	020	KD	KPPN AMLAPURA
154	528586	021	KD	KPPN MATARAM
155	528590	021	KD	KPPN BIMA
156	528608	021	KD	KPPN SUMBAWA BESAR
157	613785	021	KD	KANWIL DJPb PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
158	648847	021	KD	KPPN SELONG
159	528629	022	KD	KANWIL DJPb PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
160	528633	022	KD	KPPN KUPANG
161	528640	022	KD	KPPN ENDE
162	528654	022	KD	KPPN WAINGAPU
163	528661	022	KD	KPPN RUTENG
164	652453	022	KD	KPPN ATAMBUA
165	662770	022	KD	KPPN LARANTUKA
166	451578	023	KD	KPPN MAKASSAR II
167	497593	023	KD	KPPN SINJAI
168	528366	023	KD	KANWIL DJPb PROVINSI SULAWESI SELATAN
169	528370	023	KD	KPPN MAKASAR I
170	528387	023	KD	KPPN PARE PARE
171	528391	023	KD	KPPN BANTAENG
172	528409	023	KD	KPPN PALOPO
173	528420	023	KD	KPPN WATAMPONE
174	635120	023	KD	KPPN BENTENG
175	648851	023	KD	KPPN MAKALE
176	528310	024	KD	KPPN PALU
177	528324	024	KD	KPPN LUWUK
178	528331	024	KD	KPPN POSO
179	528345	024	KD	KPPN TOLI TOLI
180	613807	024	KD	KANWIL DJPb PROVINSI SULAWESI TENGAH
181	528441	025	KD	KPPN KENDARI
182	528455	025	KD	KPPN BAU BAU
183	613792	025	KD	KANWIL DJPb PROVINSI SULAWESI TENGGARA
184	635155	025	KD	KPPN RAHA
185	635162	025	KD	KPPN KOLAKA
186	497622	026	KD	KPPN MARISA
187	528281	026	KD	KPPN GORONTALO
188	648741	026	KD	KANWIL DJPb PROVINSI GORONTALO
189	497607	027	KD	KPPN BITUNG
190	528260	027	KD	KANWIL DJPb PROVINSI SULAWESI UTARA
191	528277	027	KD	KPPN MANADO
192	528298	027	KD	KPPN TAHUNA
193	635197	027	KD	KPPN KOTAMUBAGU
194	452878	028	KD	KPPN TOBELO
195	528497	028	KD	KPPN TERNATE
196	662787	028	KD	KANWIL DJPb PROVINSI MALUKU UTARA
197	528476	029	KD	KANWIL DJPb PROVINSI MALUKU
198	528480	029	KD	KPPN AMBON
199	528502	029	KD	KPPN TUAL
200	528519	029	KD	KPPN SAUMLAKI
201	652460	029	KD	KPPN MASOHI
202	528682	030	KD	KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA
203	528696	030	KD	KPPN JAYAPURA
204	528701	030	KD	KPPN BIAK
205	528743	030	KD	KPPN MERAUKE
206	528750	030	KD	KPPN NABIRE
207	528764	030	KD	KPPN WAMENA
208	539049	030	KD	KPPN SERUI
209	613832	030	KD	KPPN TIMIKA
210	325237	031	KD	KANWIL DJPb PROVINSI KEPULAUAN RIAU
211	527851	031	KD	KPPN TANJUNG PINANG
212	539032	031	KD	KPPN BATAM
213	340249	032	KD	KANWIL DJPb PROVINSI SULAWESI BARAT
214	451604	032	KD	KPPN MAMUJU
215	528413	032	KD	KPPN MAJENE
216	330171	033	KD	KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA BARAT
217	528718	033	KD	KPPN MANOKWARI
218	528722	033	KD	KPPN SORONG

No	Kode Satker	Kode Kanwil	Kewenangan	Uraian Satker
219	528739	033	KD	KPPN FAK FAK
220	528235	034	KD	KPPN TARAKAN
221	634991	034	KD	KPPN NUNUKAN
222	662788	034	KD	KANWIL DJPb PROVINSI KALIMANTAN UTARA
223	662789	034	KD	KPPN TANJUNG SELOR

NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL
LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
(BA 015.08)TAHUN 2023
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN 2023 (AUDITED)

Nomor : NKF- /015.08/PB.6/2024

Pada hari ini, Senin tanggal 6 Mei 2024, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak secara Online** untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (BA 015.08) Tahun 2023, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, sebagai bentuk asersi final atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (BA 015.08) Tahun 2023 dan untuk dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023 (Audited).

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Penyesuaian angka-angka pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (*Unaudited*) dilakukan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Barang Milik Negara). Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi dari K/L dan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan yang telah disetujui dan disepakati bersama.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menyetujui akan memproses angka asersi final untuk selanjutnya menyampaikan Perbaikan Laporan Keuangan Tahun 2023 beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam **Lampiran Nota Kesepakatan** ini kepada Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal dan menyampaikan Laporan BMN kepada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal **paling lambat tanggal 8 Mei 2024**.

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kementerian Keuangan (BA015)
Biro Perencanaan dan Keuangan

Unit Eselon I
Kepala Bagian Keuangan

Unit Eselon I
Kepala Bagian Umum



Ditandatangani secara elektronik
Eko Kusdaryanto



Ditandatangani secara elektronik
Y. Kus Suhantoro



Ditandatangani secara elektronik
Adi Nugroho

Biro Manajemen BMN dan
Pengadaan

Tim Reviu LK BA 015

MENGETAHUI

Tim Auditor BPK



Ditandatangani secara elektronik
Ery Sunandar



Ditandatangani secara elektronik
Gengem P. Sianturi

Rio Hariuno Aryo

Theresa Yulia

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

JURNAL KOREKSI KEKEMENTERIAN

Kementerian Negara : (015) Keuangan Republik Indonesia

: : 31 Desember 2023
: 2023

Periode (Bulan) : Desember 2023
Keterangan :
X Periode Berjalan
Periode Sebelumnya

No	Jenis Koreksi	Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Akun Akruai	Uraian Akun Akruai	Kode Pos Akruai	Akun Kas	Uraian Akun Kas	Kode Anggaran	Kode Pos Kas	Debit	Kredit	Keterangan
1	N	01508	527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	NC2121			99	0099	9.490.539,00		Jurnal Koreksi Belanja Listrik yang masih harus dibayar
	N	01508	527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	522111	Beban Langganan Listrik	LO1213			99	0099		9.490.539,00	Jurnal Koreksi Belanja Listrik yang masih harus dibayar
2	N	01508	527709	KPPN Rantau Prapat	522111	Beban Langganan Listrik	LO1213			99	0099	9.490.539,00		Jurnal Koreksi Belanja Listrik yang masih harus dibayar
	N	01508	527709	KPPN Rantau Prapat	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	NC2121			99	0099		9.490.539,00	Jurnal Koreksi Belanja Listrik yang masih harus dibayar
3	N	01508	440781	Pusat Investasi Pemerintah	111826	Kas Lainnya di BLU	NC1118			99	0099	24.449.412,00		Pencantuman Kas lainnya atas potongan BPJS belum disetorkan (periode berjalan)
	N	01508	440781	Pusat Investasi Pemerintah	212193	Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	NC2121			99	0099		24.449.412,00	Pencantuman Kas lainnya atas potongan BPJS belum disetorkan (periode berjalan)
4	N	01508	440781	Pusat Investasi Pemerintah	391119	Koreksi Lainnya	LP3006			99	0099	63.059.501,00		Koreksi atas pendapatan yang masih harus diterima tahun 2022 dari denda akad syariah yang seharusnya tidak boleh diakui sebagai pendapatan (periode sebelumnya)
	N	01508	440781	Pusat Investasi Pemerintah	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	NC1143			99	0099		63.059.501,00	Koreksi atas pendapatan yang masih harus diterima tahun 2022 dari denda akad syariah yang seharusnya tidak boleh diakui sebagai pendapatan (periode sebelumnya)
5	N	01508	440781	Pusat Investasi Pemerintah	219913	Utang Jangka Pendek Lain-lain	NC2199			99	0099	65.978.850,00		Koreksi penggunaan akun kewajiban dari 219913 menjadi 212193. Penggunaan akun 219913 menyebabkan arus kas tidak masuk LAK dan terjadi selisih antara Saldo kas dan rincian saldo.
	N	01508	440781	Pusat Investasi Pemerintah	111826	Kas Lainnya di BLU	NC1118			99	0099		65.978.850,00	Koreksi penggunaan akun kewajiban dari 219913 menjadi 212193. Penggunaan akun 219913 menyebabkan arus kas tidak masuk LAK dan terjadi selisih antara Saldo kas dan rincian saldo.
6	N	01508	440781	Pusat Investasi Pemerintah	111826	Kas Lainnya di BLU	NC1118			99	0099	65.978.850,00		Koreksi penggunaan akun kewajiban dari 219913 menjadi 212193. Penggunaan akun 219913 menyebabkan arus kas tidak masuk LAK dan terjadi selisih antara Saldo kas dan rincian saldo.
	N	01508	440781	Pusat Investasi Pemerintah	212193	Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	NC2121			99	0099		65.978.850,00	Koreksi penggunaan akun kewajiban dari 219913 menjadi 212193. Penggunaan akun 219913 menyebabkan arus kas tidak masuk LAK dan terjadi selisih antara Saldo kas dan rincian saldo.
7	N	01508	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	NC1143			99	0099	42.739.718,00		Jurnal Koreksi atas Akruai Pendapatan Jasa Layanan Perbankan yang menjadi hak Tahun 2023 sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Deposito dengan Pihak Perbankan
	N	01508	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	LO1123			99	0099		42.739.718,00	Jurnal Koreksi atas Akruai Pendapatan Jasa Layanan Perbankan yang menjadi hak Tahun 2023 sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Deposito dengan Pihak Perbankan
8	N	01508	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	NC1143			99	0099	39.896.214,00		Jurnal Koreksi atas Akruai Pendapatan Penghasilan Dana Khusus Lainnya (Imbal Hasil Dana Pooling Fund Bencana) yang menjadi hak Tahun 2023 sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Deposito dengan Pihak Perbankan

No	Jenis Koreksi	Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Akun Akrual	Uraian Akun Akrual	Kode Pos Akrual	Akun Kas	Uraian Akun Kas	Kode Anggaran	Kode Pos Kas	Debit	Kredit	Keterangan
	N	01508	439039	Badan Pengelola Dana Ungkungan Hidup	424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	LO1123			99	0099		39.896.214,00	Jurnal Koreksi atas Akrual Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya (Imbal Hasil Dana Pooling Fund Bencana) yang menjadi hak Tahun 2023 sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Deposito dengan Pihak Perbankan
9	N	01508	439039	Badan Pengelola Dana Ungkungan Hidup	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	NC1143			99	0099	8.501.550,00		Jurnal Koreksi atas Akrual Pendapatan Investasi atas transaksi pengembalian dana Fasilitas Dana Bergulir yang telah dilakukan proses persetujuan restrukturisasi yang menjadi hak bulan Desember 2023
	N	01508	439039	Badan Pengelola Dana Ungkungan Hidup	424136	Pendapatan Investasi	LO1113			99	0099		8.501.550,00	Jurnal Koreksi atas Akrual Pendapatan Investasi atas transaksi pengembalian dana Fasilitas Dana Bergulir yang telah dilakukan proses persetujuan restrukturisasi yang menjadi hak bulan Desember 2023
10	N	01508	439039	Badan Pengelola Dana Ungkungan Hidup	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	NC1213			99	0099	8.501.550,00		Jurnal Koreksi untuk menyesuaikan saldo dana bergulir atas pengembalian yang telah dilakukan proses persetujuan restrukturisasi bulan Desember 2023
	N	01508	439039	Badan Pengelola Dana Ungkungan Hidup	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NC1651			99	0099		8.501.550,00	Jurnal Koreksi untuk menyesuaikan saldo dana bergulir atas pengembalian yang telah dilakukan proses persetujuan restrukturisasi bulan Desember 2023
11	N	01508	439039	Badan Pengelola Dana Ungkungan Hidup	594632	Beban Penyisihan Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	LO1222			99	0099	563.682.375,00		Jurnal Koreksi atas Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih (Penyisihan Piutang) yang semula Rp261.237.981,167 (unaudited 2023) menjadi Rp261.801.663,542 (audited 2023)
	N	01508	439039	Badan Pengelola Dana Ungkungan Hidup	123112	Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Kementerian Negara/Lembaga	NC1231			99	0099		563.682.375,00	Jurnal Koreksi atas Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih (Penyisihan Piutang) yang semula Rp261.237.981,167 (unaudited 2023) menjadi Rp261.801.663,542 (audited 2023)
12	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	NC1141			99	0099	334.296.898,00		Jurnal koreksi saldo BDDM PSR berupa penambahan sebesar Rp334.296.898 (saldo semula Rp2.074.569.680.303, saldo menjadi Rp2.074.903.977.201)
	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	LO1213			99	0099		334.296.898,00	Jurnal koreksi saldo BDDM Sampras berupa pengurangan sebesar Rp13.890.449.958 (saldo semula Rp24.473.332.241, menjadi Rp10.582.882.282). Hal ini dikarenakan terdapat Jurnal koreksi lebih saja piutang atas kurang bayar piugutan ekspor sebesar Rp259.935.000 (semula menjadi Rp32.172.368). Untuk kurang bayar Rp6.694.408.609 seharusnya Rp6.434.473.609).
13	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	NC1141			99	0099	13.890.449.958,00		Jurnal koreksi atas penyisihan piutang tidak tertagih akibat adanya penyesuaian saldo piutang kurang bayar piugutan ekspor (semula Rp33.472.043 menjadi Rp32.172.368). Untuk kurang bayar sebesar Rp12.071.729 dan harus dikembalikan ke rekening BPDPKS.
	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	115739	Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	NC1157			99	0099		259.935.000,00	Jurnal koreksi atas penyisihan piutang tidak tertagih akibat adanya penyesuaian saldo piutang kurang bayar piugutan ekspor (semula Rp33.472.043 menjadi Rp32.172.368). Untuk kurang bayar sebesar Rp12.071.729 dan harus dikembalikan ke rekening BPDPKS.
15	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	116639	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	NC1166			99	0099	1.299.675,00		Jurnal koreksi atas penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang sisa UM dengan kualitas lancar 0,5% x Rp12.071.729 = Rp60.359
	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	594639	Beban Penyisihan Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	LO1222			99	0099		1.299.675,00	Jurnal koreksi atas penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang sisa UM dengan kualitas lancar 0,5% x Rp12.071.729 = Rp60.359
16	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	115791	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	NC1157			99	0099	12.071.729,00		Jurnal koreksi atas penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang sisa UM dengan kualitas lancar 0,5% x Rp12.071.729 = Rp60.359
	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	LO1213			99	0099		12.071.729,00	Jurnal koreksi atas penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang sisa UM dengan kualitas lancar 0,5% x Rp12.071.729 = Rp60.359
17	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	594641	Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya	LO1222			99	0099	60.359,00		Jurnal koreksi atas penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang sisa UM dengan kualitas lancar 0,5% x Rp12.071.729 = Rp60.359
	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	116691	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya	NC1166			99	0099		60.359,00	Jurnal koreksi atas penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang sisa UM dengan kualitas lancar 0,5% x Rp12.071.729 = Rp60.359
18	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	111911	Kas dan Bank - BLU	NC1119			99	0099	19.308.062,00		Jurnal koreksi kas dan bank BLU atas dana pihak ketiga pada rekening PUM dan rekening induk yang telah diakhiskan sebagai belanja sebesar Rp19.308.062
	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	212193	Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	NC2121			99	0099		19.308.062,00	Jurnal koreksi kas dan bank BLU atas dana pihak ketiga pada rekening PUM dan rekening induk yang telah diakhiskan sebagai belanja sebesar Rp19.308.062
19	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	111826	Kas Lainnya di BLU	NC1118			99	0099	19.308.062,00		Jurnal koreksi kas dan bank BLU atas dana pihak ketiga pada rekening PUM dan rekening induk yang telah diakhiskan sebagai belanja sebesar Rp19.308.062
	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	111911	Kas dan Bank - BLU	NC1119			99	0099		19.308.062,00	Jurnal koreksi kas dan bank BLU atas dana pihak ketiga pada rekening PUM dan rekening induk yang telah diakhiskan sebagai belanja sebesar Rp19.308.062
20	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	111911	Kas dan Bank - BLU	NC1119			99	0099	200.050.018,00		Jurnal koreksi kas dan bank BLU atas dana pihak ketiga uji coba host to host LP PSR Rp200.050.018
	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	212193	Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	NC2121			99	0099		200.050.018,00	Jurnal koreksi kas dan bank BLU atas dana pihak ketiga uji coba host to host LP PSR Rp200.050.018

No	Jenis Koreksi	Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Akun Akrual	Uraian Akun Akrual	Kode Pos Akrual	Akun Kas	Uraian Akun Kas	Kode Anggaran Kas	Debit	Kredit	Keterangan
21	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	111826	Kas Lainnya di BLU	NC1118			0099	200.050.018,00		Jurnal koreksi kas lainnya di BLU atas dana pihak ketiga uji coba host to host LP PSR Rp200.050.018
			409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	111911	Kas dan Bank - BLU	NC1119			0099		200.050.018,00	
22	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	162151	Software	NC1621			0099	240.870.000,00		Jurnal koreksi nilai aset berupa software dilemakan terdapat belanja/beban barang yang seharusnya
			409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	LP3005			0099		240.870.000,00	dikapitalisasi senilai Rp240.870.000
23	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	LP3005			0099	240.870.000,00		Jurnal koreksi atas nilai aset lainnya non revaluasi berupa software dilemakan terdapat belanja/beban barang yang seharusnya dikapitalisasi
			409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	LO1213			0099		240.870.000,00	senilai Rp240.870.000
24	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	162151	Software	NC1621			0099	184.260.000,00		Jurnal koreksi nilai aset berupa software dilemakan terdapat belanja/beban barang yang seharusnya dikapitalisasi senilai Rp184.260.000
			409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	LP3005			0099		184.260.000,00	
25	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	LP3005			0099	184.260.000,00		Jurnal koreksi atas nilai aset lainnya non revaluasi berupa software dilemakan terdapat belanja/beban barang yang seharusnya dikapitalisasi
			409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525113	Beban Jasa	LO1213			0099		184.260.000,00	senilai Rp184.260.000
26	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	592115	Beban Amortisasi Software	LO1221			0099	286.935.000,00		Jurnal koreksi atas penambahan nilai ATB sebesar Rp425.130.000 (Rp240.870.000 + Rp184.260.000) nilai akumulasi amortisasi software mengalami kenaikan sebesar Rp286.935.000 (semula
			409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525112	Beban Barang	LO1213			0099		286.935.000,00	Jurnal reklasifikasi beban (LO vs LBA). Koreksi ini tidak berdampak pada nilai yang disajikan dalam LO, karena semua beban tersebut tersaji dalam Pos Beban Barang dan Jasa
27	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525115	Beban Perjalanan	LO1215			0099	370.065.004,00		Jurnal reklasifikasi beban (LO vs LBA). Koreksi ini tidak berdampak pada nilai yang disajikan dalam LO, karena semua beban tersebut tersaji dalam Pos Beban Barang dan Jasa
			409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525113	Beban Jasa	LO1213			0099		370.065.004,00	Jurnal reklasifikasi beban (LO vs LBA). Koreksi ini tidak berdampak pada nilai yang disajikan dalam LO, karena semua beban tersebut tersaji dalam Pos Beban Barang dan Jasa
28	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525115	Beban Perjalanan	LO1215			0099	1.278.803.414,00		Jurnal reklasifikasi beban (LO vs LBA). Koreksi ini tidak berdampak pada nilai yang disajikan dalam LO, karena semua beban tersebut tersaji dalam Pos Beban Barang dan Jasa
			409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525114	Beban Pemeliharaan	LO1214			0099		1.278.803.414,00	Jurnal reklasifikasi beban (LO vs LBA). Koreksi ini tidak berdampak pada nilai yang disajikan dalam LO, karena semua beban tersebut tersaji dalam Pos Beban Barang dan Jasa
29	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525115	Beban Perjalanan	LO1215			0099	60.495.000,00		Jurnal reklasifikasi beban (LO vs LBA). Koreksi ini tidak berdampak pada nilai yang disajikan dalam LO, karena semua beban tersebut tersaji dalam Pos Beban Barang dan Jasa
			409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	LO1213			0099		60.495.000,00	Jurnal reklasifikasi beban (LO vs LBA). Koreksi ini tidak berdampak pada nilai yang disajikan dalam LO, karena semua beban tersebut tersaji dalam Pos Beban Barang dan Jasa
30	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525115	Beban Perjalanan	LO1215			0099	861.605.118,00		Jurnal koreksi melalui pengesahan SP38 berupa pengurangan pendapatan atas kelebihan
			409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	LO1123			4210		861.605.118,00	Jurnal koreksi melalui pengesahan SP38 berupa pengurangan pendapatan (accrued interest) senilai Rp5.118.354.000,00 dan pengurangan pengembalian
31	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	111911	Kas dan Bank - BLU	NC1119			3110	5.118.354.000,00		Jurnal koreksi melalui pengesahan SP38 berupa pengurangan pendapatan atas kelebihan
			409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	LO1123			4210		5.118.354.000,00	Jurnal koreksi melalui pengesahan SP38 berupa pengembalian belanja riset TAB senilai Rp150.544.750 yang terlanjur disahkan sebagai pendapatan (suara pemberitahuan pengembalian
32	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	111911	Kas dan Bank - BLU	NC1119			3110	340.663.719,00		Jurnal koreksi melalui pengesahan SP38 atas pengembalian UM berupa pengurangan senilai Rp5.800,00
			409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	LO1213			5210		340.663.719,00	Jurnal koreksi melalui pengesahan SP38 berupa pengembalian UM berupa pengurangan senilai Rp5.800,00
33	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	111911	Kas dan Bank - BLU	NC1119			3110	817.000,00		Jurnal koreksi melalui pengesahan SP38 berupa pengembalian UM berupa pengurangan senilai Rp5.800,00
			409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	LO1213			5210		817.000,00	Jurnal koreksi melalui pengesahan SP38 berupa pengembalian UM berupa pengurangan senilai Rp5.800,00
34	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	LO1211			3110	452.960,00		Jurnal koreksi melalui pengesahan SP38 berupa pengembalian UM berupa pengurangan senilai Rp452.960
			409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525112	Beban Barang	LO1213			5210		452.960,00	Jurnal koreksi melalui pengesahan SP38 berupa pengembalian UM berupa pengurangan senilai Rp452.960
35	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	111911	Kas dan Bank - BLU	NC1119			3110	4.680.161,00		Jurnal koreksi melalui pengesahan SP38 berupa pengembalian UM berupa pengurangan senilai Rp4.680.161
			409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525115	Beban Perjalanan	LO1215			3110		4.680.161,00	Jurnal koreksi melalui pengesahan SP38 berupa pengembalian UM berupa pengurangan senilai Rp4.680.161
36	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	111911	Kas dan Bank - BLU	NC1119			3110	455.266.532,00		Jurnal koreksi melalui pengesahan SP38 berupa pengembalian UM berupa pengurangan senilai Rp455.266.532,00
			409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	LO1213			5210		455.266.532,00	Jurnal koreksi melalui pengesahan SP38 berupa pengembalian UM berupa pengurangan senilai Rp455.266.532,00
37	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	111911	Kas dan Bank - BLU	NC1119			3110	1.068.999,00		Jurnal koreksi melalui pengesahan SP38 berupa pengembalian UM berupa pengurangan senilai Rp1.068.999,00
			409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525115	Beban Perjalanan	LO1215			3110		1.068.999,00	Jurnal koreksi melalui pengesahan SP38 berupa pengembalian UM berupa pengurangan senilai Rp1.068.999,00
38	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	111911	Kas dan Bank - BLU	NC1119			3110			Jurnal koreksi melalui pengesahan SP38 berupa pengembalian UM berupa pengurangan senilai Rp1.068.999,00
			409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	LO1213			5210			Jurnal koreksi melalui pengesahan SP38 berupa pengembalian UM berupa pengurangan senilai Rp1.068.999,00

No	Jenis Koreksi	Eselon I	Kode Satker	Urusan Satker	Akun Akrua	Ururan Akun Akrua	Kode Pos Akrua	Akun Kas	Ururan Akun Kas	Kode Anggaran	Kode Pos Kas	Debit	Kredit	Keterangan
				Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	LO2131	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	10	4210		1.088.999,00	BLU TAYL pengembalian swakelola PSR 2022 senilai Rp1.088.999
39	N	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	LO1213			99	0099	129.560,00		Jurnal koreksi melalui pengesahan SP3B berupa penambahan pendapatan jasa layanan perbankan BLU 424911 sebesar Rp129.560
				Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Kelapa Sawit	LO1123			99	0099		129.560,00	Jurnal koreksi melalui pengesahan SP3B berupa penambahan pendapatan jasa layanan perbankan BLU 424911 sebesar Rp129.560
40	B	01508	662788	KANWIL DIPK PROVINSI KALIMANTAN UTARA	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LP3005			99	0099			Jurnal koreksi penunruangan KDP sebesar Rp4.086.500,00 karena terdapat penyeteroran sesuai TP
				KANWIL DIPK PROVINSI KALIMANTAN UTARA	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	NC1361			99	0099	4.086.500,00		Jurnal koreksi penunruangan KDP sebesar Rp4.086.500,00 BPK RI nomor KTP 8.2.5.
41	B	01508	662788	KANWIL DIPK PROVINSI KALIMANTAN UTARA	115212	Piutang Lainnya	NC1152			99	0099			Jurnal koreksi pengakuan piutang atas penyeteroran pada 8 Mei 2024 sebesar Rp4.086.500 sesuai TP BPK
				KANWIL DIPK PROVINSI KALIMANTAN UTARA	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LP3005			99	0099	4.086.500,00		Ri nomor KTP 8.2.5.
42	B	01508	662788	KANWIL DIPK PROVINSI KALIMANTAN UTARA	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	LO1222			99	0099	20.433,00		Jurnal koreksi pengakuan penyisihan piutang atas penyeteroran pada 8 Mei 2024 sebesar Rp4.086.500 sesuai TP BPK RI nomor KTP 8.2.5.
				KANWIL DIPK PROVINSI KALIMANTAN UTARA	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	NC1162			99	0099		20.433,00	
43	B	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	111911	Kas dan Bank - BLU	NC1119			99	0099	1.237.505.000.000,00		Reklasifikasi Investasi Jangla Pendek ke Investasi Jangla Panjang
				Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	113311	Deposito dan Investasi Jangla Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Dihasilkan	NC1133			99	0099		1.237.505.000.000,00	Reklasifikasi Investasi Jangla Pendek ke Investasi Jangla Panjang
44	B	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	311315	Penyesuaian SAL BLU	LP3006			99	0099	1.237.505.000.000,00		Reklasifikasi Investasi Jangla Pendek ke Investasi Jangla Panjang
				Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	111911	Kas dan Bank - BLU	NC1119			99	0099		1.237.505.000.000,00	Reklasifikasi Investasi Jangla Pendek ke Investasi Jangla Panjang
45	B	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	121911	Investasi Jangla Panjang Non Permanen Lainnya	NC1219			99	0099	1.237.505.000.000,00		Reklasifikasi Investasi Jangla Pendek ke Investasi Jangla Panjang
				Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	221511	Utang Jangla Panjang BLU kepada BUN	NC2215			99	0099		1.237.505.000.000,00	Reklasifikasi Investasi Jangla Pendek ke Investasi Jangla Panjang
46	B	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NC1651			99	0099	21.071.190.476,00		Penyesuaian untuk amortisasi yang memenuhi karakteristik HTM diperoleh secara premium
				Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	123211	Investasi Jangla Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasi	NC1232			99	0099		21.071.190.476,00	Penyesuaian untuk amortisasi yang memenuhi karakteristik HTM diperoleh secara premium
47	B	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	221511	Utang Jangla Panjang BLU kepada BUN	NC2215			99	0099	1.237.505.000.000,00		Jurnal Baik Investasi Jangla Panjang ke Urang Kelapa Sawit
				Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	121911	Investasi Jangla Panjang Non Permanen Lainnya	NC1219			99	0099		1.237.505.000.000,00	Jurnal Baik Investasi Jangla Panjang ke Urang Kelapa Sawit
48	B	01508	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	121911	Investasi Jangla Panjang Non Permanen Lainnya	NC1219			99	0099	1.237.505.000.000,00		Reklasifikasi Investasi Jangla Pendek ke Investasi Jangla Panjang
				Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	391119	Koreksi Lainnya	LP3006			99	0099		1.237.505.000.000,00	Reklasifikasi Investasi Jangla Pendek ke Investasi Jangla Panjang
												6.234.072.585.053,00	6.234.072.585.053,00	

Keterangan
N : Jurnal koreksi internal
B : Jurnal koreksi dari BPK

Kode Anggaran
6
01: Realisasi
11: Realisasi Pengembalian
99: Tidak Terjadi Baku Besar Kas

Jakarta,-.....-2024
Kepala Bagian Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan



Edo Kusdaryanto
Ditandatangani secara elektronik

Kepala Bagian Keuangan DJPB



Y. Kus Sunantoro
Ditandatangani secara elektronik

Tim Reviu Inspektorat
Jenderal



Gomgom P. Sinturi
Ditandatangani secara elektronik



No	Jenis Koreksi	Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Akun AkruaI	Uraian Akun AkruaI	Kode Pos AkruaI	Akun Kas	Uraian Akun Kas	Kode Anggaran	Kode Pos Kas	Debit	Kredit	Keterangan
----	---------------	----------	-------------	---------------	-------------	--------------------	-----------------	----------	-----------------	---------------	--------------	-------	--------	------------

Kepala Bagian Penatausahaan
BMN



Dilandatangani secara elektronik
Ery Sunandar

Kepala Bagian Umum DJPb



Dilandatangani secara elektronik
Adi Nugroho

Ketua Tim Auditor BPK



Rio Harjuno Ayo Sakti

Ketua Tim Auditor BPK



Therezia Yulia Barlianti



LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/EMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ESELON I : 015.08 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NO	URAUAN	ANGGARAN UNAUDITED		KOREKSI INTERNAL		REALISASI UNAUDITED	KOREKSI INTERNAL		KOREKSI BPK		ANGGARAN SETELAH DISESUAIKAN	REALISASI ANGGARAN SETELAH DISESUAIKAN
		3	4	DEBIT	KREDIT		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT		
1	2				5	6	7	8	9	10	11	12
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH											
	I. Penerimaan Perpajakan											
	Pajak Dalam Negeri											
	Pajak Perdagangan Internasional											
	II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	35.889.754.515.000				35.563.088.112.332	5.459.017.719	1.068.999			35.889.754.515.000	35.557.630.163.612
	Pendapatan Sumber Daya Alam											
	Pendapatan dan Kekayaan Negara Dipisahkan											
	Pendapatan BLU	35.889.748.865.000				35.557.063.842.186	5.459.017.719	1.068.999			35.889.748.865.000	35.551.595.893.466
	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.650.000				6.034.270.146					5.650.000	6.034.270.146
	III. Pendapatan Hibah											
B	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A1 + A11 + A	35.889.754.515.000				35.563.088.112.332	5.459.017.719	1.068.999			35.889.754.515.000	35.557.630.163.612
	BELANJA NEGARA											
	I. Belanja Pemerintah Pusat											
	1. Belanja Pegawai	22.593.014.070.000				22.480.485.400.835	5.133.121	456.089.332			22.593.014.070.000	22.480.034.444.624
	80.208.189.000					75.324.206.780					80.208.189.000	75.324.206.780
	2. Belanja Barang	22.069.438.989.000				21.967.625.077.642	5.133.121	456.089.332			22.069.438.989.000	21.967.174.121.431
	3. Belanja Modal	443.366.892.000				437.536.116.413					443.366.892.000	437.536.116.413
	4. Belanja Pembayaran Bunga Utang											
	5. Belanja Subsidi											
	6. Belanja Hibah											
C	II. Transfer ke Daerah											
	a. Dana Perimbangan											
	1. Dana Transfer Umum											
	a. Dana Bagi Hasil											
	b. Dana Alokasi Umum											
	2. Dana Transfer Khusus											
	a. Dana Alokasi Khusus Fisik											
	b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik											
	b. Dana Insentif Daerah											
	c. Dana Keistimewaan DIY											
D	d. Dana Otonomi Khusus											
	2. Dana Desa											
	3. Hibah Kepada Daerah											
	Jumlah Belanja Negara (B1 + B11)	22.593.014.070.000				22.480.485.400.835	5.133.121	456.089.332			22.593.014.070.000	22.480.034.444.624
	PEMBAYARAN											
	Pembayaran Dalam Negeri											
	Pembayaran Luar Negeri											
	Jumlah Pembayaran (C1 + C2)											

Jakarta, 2024

Kepala Bagian Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Kepala Bagian Keuangan DJPb
Tim Reviu Inspektorat
Jenderal



Ditandatangani secara elektronik
Eko Kusdaryanto



Ditandatangani secara elektronik
Y. Kus Suhanoro



Ditandatangani secara elektronik
Gongom P. Slanturi



LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ESELON I : 015.08 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NO	URAIAN	ANGGARAN UNAUDITED	KOREKSI INTERNAL		REALISASI UNAUDITED	KOREKSI INTERNAL		KOREKSI BPK		ANGGARAN SETELAH DISESUAIKAN	REALISASI ANGGARAN SETELAH DISESUAIKAN
			DEBIT	KREDIT		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala Bagian Penatausahaan
BMN



Ditandatangani secara elektronik
Ery Sunandar

Kepala Bagian Umum DJPb



Ditandatangani secara elektronik
Adi Nugroho

Ketua Tim Auditor BPK



Rio Harjuno Aryo Sakti

Ketua Tim Auditor BPK



Theresa Yulia Baniarti



LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ESELON I : 015,08 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

URAIAN	LO UNAUDITED	KOREKSI INTERNAL		KOREKSI BPK		LO AUDITED
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	
1	2	3	4	5	6	7
KEGIATAN OPERASIONAL						
PENDAPATAN OPERASIONAL						
PENDAPATAN PERPAJAKAN						
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK						
Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	35,596,218,291,444	5,718,952,719	91,267,042	-	-	35,590,590,605,767
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	35,596,218,291,444					35,590,590,605,767
PENDAPATAN HIBAH						
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	35,596,218,291,444					35,590,590,605,767
BEBAN OPERASIONAL						
Beban Pegawai	220,974,111,660	-	817,000	-	-	220,973,294,660
Beban Persediaan	15,571,035,582	-	-	-	-	15,571,035,582
Beban Barang dan Jasa	20,911,146,007,658	16,410,996,553	1,236,261,498	-	-	20,926,320,742,713
Beban Pemeliharaan	302,441,494,112	60,495,000	-	-	-	302,501,989,112
Beban Perjalanan Dinas	153,199,927,415	4,680,161	2,570,968,536	-	-	150,633,639,040
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-
Beban Bunga	-	-	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	312,679,431,427	286,935,000	-	-	-	312,966,366,427
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	102,839,070,579	563,742,734	1,299,675	20,433	-	103,401,534,071
Beban Transfer	-	-	-	-	-	-
Beban Lain-Lain	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	22,018,851,078,433					22,032,368,601,605
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	13,577,367,213,011					13,558,222,004,162
KEGIATAN NON OPERASIONAL						
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR						
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2,375,416,012	-	-	-	-	2,375,416,012
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	5,752,304,252	-	-	-	-	5,752,304,252
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(3,376,888,240)					(3,376,888,240)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-					-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA						
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	100,432,251,168	-	1,068,999	-	-	100,433,320,167
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	188,799,303	-	-	-	-	188,799,303
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	100,243,451,865					100,244,520,864
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	96,866,563,625					96,867,632,624
POS LUAR BIASA						
Beban Luar Biasa	-	-	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-					-
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	13,674,233,776,636	23,045,802,167	3,901,682,750	20,433	-	13,655,089,636,786

Jakarta, 2024
Kepala Bagian Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan

Kepala Bagian Keuangan
DJPb

Tim Reviu Inspektorat
Jenderal



Ditandatangani secara elektronik
Eko Kusdaryanto



Ditandatangani secara elektronik
Y. Kus Suhantero



Ditandatangani secara elektronik
Gomgom P. Sianturi



URAIAN	LO UNAUDITED	KOREKSI INTERNAL		KOREKSI BPK		LO AUDITED
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	
1	2	3	4	5	6	7

Kepala Bagian Penatausahaan
BMN



Ditandatangani secara elektronik
Ery Sunandar

Kepala Bagian Umum DJPb



Ditandatangani secara elektronik
Adi Nugroho

Ketua Tim Auditor BPK



Rio Harjuno Aryo Sakti

Ketua Tim Auditor BPK



Theresia Yulia Baniarti



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ESELON I : 015.08 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

URAIAN	LPE UNAUDITED	KOREKSI INTERNAL		KOREKSI BPK		LPE AUDITED
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	
1	2	3	4	5	6	7
EKUITAS AWAL	40,653,782,064,617	-	-	-	-	40,653,782,064,617
SURPLUS/DEFISIT - LO	13,674,233,776,636	23,045,802,167	3,901,682,750	20,433	-	13,655,089,636,786
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	-	-	-	-	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	819,537,475	-	-	-	-	756,477,974
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	(252,230,220)	-	-	-	-	(252,230,220)
Koreksi Atas Reklasifikasi	-	-	-	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset	-	-	-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(20,035,435)	425,130,000	425,130,000	4,086,500	4,086,500	(20,035,435)
Lain-lain	1,091,803,130	63,059,501	-	1,237,505,000,000	1,237,505,000,000	1,028,743,629
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,374,208,524,399	-	-	-	-	1,374,208,524,399
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	15,049,261,838,510	-	-	-	-	15,030,054,639,159
EKUITAS AKHIR	55,703,043,903,127	23,533,991,668	4,326,812,750	1,237,509,106,933	1,237,509,086,500	55,683,836,703,776

Jakarta, 2024
 Kepala Bagian Akuntansi dan
 Pelaporan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
 Eko Kusdaryanto

Kepala Bagian Keuangan
 DJPb



Ditandatangani secara elektronik
 Y. Kus Suhanthro

Tim Reviu Inspektorat
 Jenderal



Ditandatangani secara elektronik
 Gomgom P. Sianturi

Kepala Bagian Penatausahaan
 BMN



Ditandatangani secara elektronik
 Ery Sunandar

Kepala Bagian Umum DJPb



Ditandatangani secara elektronik
 Adi Nugroho

Ketua Tim Auditor BPK

Rio Harjuno Aryo Sakti

Ketua Tim Auditor BPK

Theresia Yulia Baniarti



NERACA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ESELON I : 015.08 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NAMA PERKIRAAN	NERACA UNAUDITED	KOREKSI INTERNAL		KOREKSI BPK		NERACA AUDITED
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	
1	2	3	4	5	6	7
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Bendahara Pengeluaran	26,999,593	-	-	-	-	26,999,593
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	9,574,327,126	309,786,342	65,978,850	-	-	9,818,134,818
Kas pada Badan Layanan Umum	31,810,970,608,178	676,516,411	5,683,508,920	1,237,505,000,000	1,237,505,000,000	31,805,963,615,669
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	10,104,606,195,682	-	-	-	1,237,505,000,000	8,867,103,195,682
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	2,102,836,297,392	334,296,898	13,890,448,958	-	-	2,089,282,144,332
Uang Muka Belanja (prepayment)	57,197,160	-	-	-	-	57,197,160
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	587,152,018,374	91,137,482	63,059,501	-	-	587,180,096,355
Piutang Perpajakan	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	-	-	-	-	-	-
<i>Piutang Perpajakan (Netto)</i>	-	-	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak	252,118,506	-	-	4,086,500	-	256,205,006
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(252,118,506)	-	-	-	20,433	(252,138,939)
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	-	-	-	-	-	4,066,067
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(60,000)	-	-	-	-	(60,000)
<i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	11,940,000	-	-	-	-	11,940,000
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	6,694,408,609	12,071,729	259,935,000	-	-	6,446,545,338
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(33,472,043)	1,299,675	60,359	-	-	(32,232,727)
<i>Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)</i>	6,660,936,566	-	-	-	-	6,414,312,611
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	-	-	-	-	-	-
<i>Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)</i>	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
<i>Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya (Netto)</i>	-	-	-	-	-	-
Persediaan	16,979,669,050	-	-	-	-	16,979,669,050
JUMLAH ASET LANCAR	44,638,880,189,121					43,382,841,371,137
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	-	-	-	2,475,010,000,000	1,237,505,000,000	1,237,505,000,000
Dana Bergulir	1,299,891,235,129	8,501,550	-	-	-	1,299,899,736,679
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum	8,019,775,521,545	-	-	-	-	8,019,775,521,545
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	-	-	-	-	21,071,190,476	(21,071,190,476)
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(261,237,981,167)	-	563,682,375	-	-	(261,801,663,542)
Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih	(40,372,794,275)	-	-	-	-	(40,372,794,275)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	9,018,055,981,232					10,233,934,609,931
ASET TETAP						
Tanah	9,179,987,122,830	-	-	-	-	9,179,987,122,830
Peralatan dan Mesin	1,868,094,238,213	-	-	-	-	1,868,094,238,213
Gedung dan Bangunan	2,188,851,669,204	-	-	-	-	2,188,851,669,204
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,114,536,000	-	-	-	-	1,114,536,000
Aset Tetap Lainnya	12,881,015,778	-	-	-	-	12,881,015,778
Konstruksi Dalam Pengerjaan	37,867,671,459	-	-	-	4,086,500	37,863,584,959
Akumulasi Penyusutan	(2,091,517,794,503)	-	-	-	-	(2,091,517,794,503)
JUMLAH ASET TETAP	11,197,274,458,981					11,197,274,372,481
PIUTANG JANGKA PANJANG						
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	1,862,811,088	-	-	-	-	1,862,811,088
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(1,826,396,488)	-	-	-	-	(1,826,396,488)
<i>Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	34,414,600	-	-	-	-	34,414,600
Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
<i>Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)</i>	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	34,414,600					34,414,600
ASET LAINNYA						
Aset Tak Berwujud	874,687,439,306	425,130,000	-	-	-	875,112,569,306
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	1,348,604,387	-	-	-	-	1,348,604,387
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	21,009,926,971	-	-	-	-	21,009,926,971
Dana Kekolaan Badan Layanan Umum	13,091,627,564,792	-	8,501,550	21,071,190,476	-	13,112,690,253,718
Dana Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Aset Lain-lain	30,795,913,946	-	-	-	-	30,795,913,946
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(614,402,140,224)	-	286,935,000	-	-	(614,689,075,224)
JUMLAH ASET LAINNYA	13,405,067,309,178					13,426,268,193,104
JUMLAH ASET	78,259,316,353,112					78,240,352,961,253
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang kepada Pihak Ketiga	143,697,827,011	9,490,539	319,276,881	-	-	144,007,613,353
Utang yang Belum Diterima Tagihannya	-	-	-	-	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	-	-	-	-	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	1,186,095,245	-	-	-	-	1,186,095,245
Uang Muka dari KPPN	26,999,593	-	-	-	-	26,999,593
Utang Jangka Pendek Lainnya	67,206,670	65,978,850	-	-	-	1,227,820
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	144,978,128,519					145,221,936,011
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						

NAMA PERKIRAAN	NERACA UNAUDITED	KOREKSI INTERNAL		KOREKSI BPK		NERACA AUDITED
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	
1	2	3	4	5	6	7
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	22.411.294.321.466	-	-	1.237.505.000.000	1.237.505.000.000	22.411.294.321.466
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	22.411.294.321.466					22.411.294.321.466
JUMLAH KEWAJIBAN	22.556.272.449.985					22.556.516.257.477
EKUITAS						
EKUITAS						
Ekuitas	55.703.043.903.127	23.533.991.668	4.326.812.750	1.237.509.106.933	1.237.509.086.500	55.683.836.703.776
JUMLAH EKUITAS	55.703.043.903.127					55.683.836.703.776
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	78.259.316.353.112					78.240.352.961.253

TRUE

TRUE

Jakarta, 2024

Kepala Bagian Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Eko Kusdaryanto

Kepala Bagian Keuangan
DJPb



Ditandatangani secara elektronik
Y. Kus Suhanoro

Tim Reviu Inspektorat
Jenderal



Ditandatangani secara elektronik
Gomgom P. Sianturi

Kepala Bagian Penatausahaan
BMN



Ditandatangani secara elektronik
Ery Sunandar

Kepala Bagian Umum DJPb



Ditandatangani secara elektronik
Adi Nugroho

Ketua Tim Auditor BPK Ketua Tim Auditor BPK


Rio Harjuno Aryo Sakti


Theresia Yulia Baniarti



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

GEDUNG DJUANDA | LANTAI 8-10 JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230 PES 6248; FAKSIMILE (021) 3852146; LAMAN www.kemenkeu.go.id

BERITA ACARA

NOMOR : BA-5/SJ.11/2024

Pada hari Selasa, tanggal dua puluh Februari tahun dua ribu dua puluh empat telah diselenggarakan konfirmasi data penerimaan pinjaman dan/atau hibah untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 antara Biro Perencanaan dan Keuangan dengan Bagian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Konfirmasi dituangkan ke dalam Berita Acara Konfirmasi dengan dilampiri Laporan Hasil Konfirmasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Konfirmasi ini;
2. Sebagai bahan konfirmasi, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyampaikan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-10/SJ.1/2024 hal Permintaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LPK PHLN) dan Konfirmasi Penerimaan Hibah Langsung Triwulan IV Tahun 2023;
3. Berdasarkan konfirmasi yang telah dilakukan bersama, hasilnya telah sesuai antara Biro Perencanaan dan Keuangan dengan Bagian Keuangan, DJPb yaitu sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2023 DJPb **tidak menerima pinjaman dan hanya menerima hibah** sebagaimana laporan terlampir;
4. Dalam rangka melaksanakan amanat PMK 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan atas PMK 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah serta PMK 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah, Bagian Keuangan, DJPb akan selalu melakukan Konfirmasi Data Penerimaan Pinjaman dan/atau Hibah dengan Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika pada tahun 2023 terdapat hibah langsung yang diterima oleh DJPb, maka Bagian Keuangan akan segera melaporkannya kepada Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan format yang telah ditentukan dan melakukan penatausahaan penerimaan hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Bagian
Perencanaan,
Biro Perencanaan dan
Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Rachmad Arijanto

Perwakilan Bagian Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan,
Biro Perencanaan dan
Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Benny Fernando Panjaitan

Perwakilan Bagian Keuangan,
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan,



Ditandatangani secara elektronik
Oktana Yudha Sakti



LAPORAN HASIL KONFIRMASI
PENERIMAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH
JANUARI S.D. DESEMBER 2023

NO	REGISTER	NAMA PINJAMAN / HIBAH	SUMBER DANA	JENIS	PAGU DIPA 2023	REALISASI s.d. Q4				STATUS/KETERANGAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	
						BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	TOTAL	%			
HIBAH LANGSUNG												
1	2CTFBUMA	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA PERALATAN OLAHRAGA DAN SENI DARI BAPORNI KANWIL DJPB PROVINSI RIAU UNTUK KANWIL DJPB PROVINSI RIAU	OTHER ORGANIZATIONS	HIBAH LANGSUNG BARANG DALAM NEGERI				Rp	11.664.299		ADA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BAST-01/WPB.04/2023/HIBAH	DJPB
2	2R1LQXMA	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DIPERGUNAKAN UNTUK GEDUNG KANTOR YANG DIBERIKAN KEPADA KANWIL DJPB PROVINSI KEPULAUAN RIAU (325237) DARI PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA	PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA	HIBAH LANGSUNG BARANG DALAM NEGERI				Rp	500.288.000		ADA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG 000.2.3.2/BAST/BPKPD-UP.4/300/X/2023	DJPB
3	23TSV7CA	AUSTRALIAN INDONESIA PARTNERSHIP FOR ECONOMIC DEVELOPMENT (PROSPERA)	DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE (DFAT) - GOVERNMENT OF AUSTRALIA	HIBAH LANGSUNG JASA LUAR NEGERI				Rp	1.200.307.789		ADA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BA-2/PB.5/2023	DJPB
HIBAH TERENCANA												
4	2FPJR4SA	PROJECT SERVICE AND SUPPORT UNIT-PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT MULTI DONOR TRUST FUND PHASE III	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD)	HIBAH TERENCANA	Rp 4.441.329.000	Rp 1.695.022.770	-	Rp	1.695.022.770	38,16%	PENYERAPAN BELUM OPTIMAL, KARENA TERDAPAT GAGAL LELANG KEGIATAN TA FOR TREASURY BIG DATA	DJPB

Perwakilan Bagian Perencanaan
Biro Perencanaan dan Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Rachmad Arijanto

Perwakilan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Biro Perencanaan dan Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Benny Fernando Panjaitan

Perwakilan Bagian Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan,



Ditandatangani secara elektronik
Oktana Yudha Sakti



**DAFTAR MUTASI PIUTANG NEGARA (TUNTUTAN GANTI RUGI)
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PER 31 DESEMBER 2023**

(dalam rupiah)

No	Unit Pengelola	Debitor		Perjanjian/Keputusan		Tanggal Jatuh Tempo	Mata Uang	Jumlah Total TGR	Saldo KN Per 31 Des 2022	Penambahan/Koreksi Penambahan	Pembayaran/Koreksi Pengurangan	Saldo KN Per 31 DESEMBER 2023	Upaya Penagihan	Update Perkembangan Terakhir	Kualitas Piutang
	Nama	Nama	Kasus Kerugian Negara	Nomor	Tanggal										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KP DJPBN	Nyoman Udayana S	penerbitan bilyet giro atas beban APBN tidak sesuai ketentuan	S-67/MK.1/2009	12-Feb-09	-	Rp	1.500.000.000	1.279.201.289	0	18.000.000	1.261.201.289	Diserahkan ke DJKN	diserahkan ke DJKN dan dim proses pelunasan melalui PT TASPEN	MACET
2	KP DJPBN	R. Wiyatno & Yusuf Pada	tuntutan pihak ke3 atas pembatalan kontrak			-	Rp	102.178.692	102.178.692	0	0	102.178.692	dimintakan rekomendasi kpd BPK	dimintakan rekomendasi kpd BPK	MACET
3	KP DJPBN	Rd. Soejatna	pembayaran gaji tidak berdasarkan bukti SPMU			-	Rp	201.000.000	181.401.553	0	0	181.401.553	dimintakan rekomendasi kpd BPK	dimintakan rekomendasi kpd BPK	MACET
4	KP DJPBN	Etisyofia (Ahli waris Yuliardi, SE)	kehilangan kendaraan dinas roda 4	S-66/MK.1/2009	12-Feb-09	-	Rp	40.000.000	32.000.000	0	0	32.000.000	Diserahkan ke DJKN	Diserahkan ke DJKN	MACET
5	KP DJPBN	Philippus Butopoli KKN Waingapu	kekurangan perbendaharaan	S-456/SJ/2003	25-Jun-03	-	Rp	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	Diserahkan ke DJKN	Diserahkan ke DJKN	MACET
6	KP DJPBN	Wakidjo Dikun KKN Ambon	kekurangan perbendaharaan	S-456/SJ/2003	25-Jun-03	-	Rp	28.176.150	14.632.775	0	14.632.775	0	Diserahkan ke DJKN	dlm proses pengusulan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara (S-235/MK.1/2023)	MACET
7	KP DJPBN	Dina Lasti	tidak memenuhi wajib kerja pd kemenkeu				Rp	55.680.000	34.999.200	0	0	34.999.200		SP2KS dan SPN ke2 sudah disampaikan	DIRAGUKAN
8	KP DJPBN-KPPN Makassar I	S. Urang	TGR bdsd SKPGR 741/KMK.01/1983	SKPGR 741/KMK.01/1983			Rp	22.254.576	22.254.576	0	0	22.254.576		surat penolakan banding+SPN3 telah diterima ahli waris tanggal 20 Feb 2023	MACET
9	KP DJPBN-KPPN Makassar I	Soemadi	TGR bdsd SKPGR 743/KMK.01/1983	SKPGR 743/KMK.01/1983			Rp	30.855.485	30.103.985	0	0	30.103.985		keberadaan tidak diketahui	MACET
10	KP DJPBN-KPPN Makassar I	B. Kalalembang	TGR bdsd SKPGR 742/KMK.01/1983	SKPGR 742/KMK.01/1983			Rp	1.399.895	1.399.895	0	0	1.399.895		keberadaan tidak diketahui	MACET
11	KP DJPBN-KPPN Makassar I	Abdul Djalil Hamid	TGR bdsd SKPGR 739/KMK.01/1983	SKPGR 739/KMK.01/1983			Rp	27.724.417	27.724.417	0	0	27.724.417		surat penolakan banding+SPN3 telah diterima ahli waris tanggal 20 Feb 2023	MACET
12	KP DJPBN-KPPN Palopo	Markus Merapi	TGR bdsd SKPGR 745/KMK.01/1983	SKPGR 745/KMK.01/1983			Rp	53.636.442	53.636.442	0	0	53.636.442		surat penolakan banding+SPN3 telah diterima ahli waris tanggal 21 Feb 2023	MACET
13	KP DJPBN-KPPN Palopo	R. Mohammad Soerawinata	TGR bdsd SKPGR 744/KMK.01/1983	SKPGR 744/KMK.01/1983			Rp	8.013.282	8.013.282	0	0	8.013.282		keberadaan tidak diketahui	MACET
14	KP DJPBN-KPPN Palopo	MIR. Mangontan	TGR bdsd SKPGR 746/KMK.01/1983	SKPGR 746/KMK.01/1983			Rp	3.493.695	3.493.695	0	0	3.493.695		surat penolakan banding+SPN3 telah diterima ahli waris tanggal 21 Feb 2023	MACET
15	KP DJPBN-KPPN Palopo	Djamil Pasambon	TGR bdsd SKPGR 748/KMK.01/1983	SKPGR 748/KMK.01/1983			Rp	29.886.314	29.886.314	0	0	29.886.314		surat penolakan banding+SPN3 telah diterima ahli waris tanggal 21 Feb 2023	MACET
16	KP DJPBN-KPPN Palopo	Arie Atmadihardjo	TGR bdsd SKPGR 747/KMK.01/1983	SKPGR 747/KMK.01/1983			Rp	54.017.748	54.017.748	0	0	54.017.748		surat penolakan banding+SPN3 telah diterima ahli waris tanggal 21 Feb 2023	MACET
17	KPPN Cirebon	Ujang Sugino Yusuf	kehilangan kendaraan dinas roda 4	SPN-001/WPB.13/KP.09/2012	17-Sep-12	2026	Rp	177.000.000	41.000.000	0	12.000.000	29.000.000	potong uang pensiun PT Taspem	dalam proses pelunasan	LANCAR
Jumlah								2.338.816.696	1.919.443.863	0	44.632.775	1.874.811.088			

Penyajian pada Neraca Eselon I			31-Dec-22	31-Dec-23
152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		2.062.714.669	1.862.811.088
115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan		46.999.200	12.000.000
TOTAL Piutang TGR			2.109.713.869	1.874.811.088

D	KP DJPBN	Kanwil DKI Jkt	KPPN Cirebon						total
	1.845.811.088		17.000.000	0				0	1.862.811.088
D	0		12.000.000	0				0	12.000.000
	1.845.811.088	0	29.000.000	0				0	1.874.811.088

DAFTAR REKENING DJPb
PERIODE 31 DESEMBER 2023

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Nihil
	proses kliring oleh bank yang seharusnya terjadwal tanggal 30 Desember 2023 namun baru berhasil tanggal 02 Januari

710	2024
0.00	Nil

Adanya terjadi Akhir Tahun, Uang Makan dan Uang Lembur Yang Belum Dibayarkan, sehingga dibayarkan di tanggal 2 Januari 2024.

0.00	Nil
0.00	Nil

0.00	Nil
Rp0	Nil

0.00	Nil
0.00	Nil
0.00	Nil

	Nilai
300	retur wang makan pegawai (beda bank) a.n. Eko Kuswanto karena salah input nama penerima

0.00	Nil
0.00	Nil

0.00	Nil
0.00	Nil
0.00	Nil

0.00	Nil
0.00	Nil
0.00	Nil

0.00	Nil
0.00	Nil
0.00	Nil

Rep0	Nil
0.00	Nil

10.00	Nil
10.00	Nil
10.00	Nil

200	Nil
0,00	Nil
0,00	Nil

0,00	Nilai
0,00	Nilai

0.00	Nil
8.00	Nil

0.00	Nil
0.00	Nil
0.00	Nil

0.00	Nil
0.00	Nil
0.00	Nil

RepD	Nil
RepE	

0000	
0001	0000
0010	0001

Nil	Nil
0.00	Nil
0.00	Nil

0.00	Nihil
0.00	Nihil

0,00	Nihil
Rp0	Nihil

1.00	Saldó Nihil
2.00	Saldó Nihil
3.00	Saldó Nihil

CO	NIHIL
R ₂ O	NIHIL
O ₂	NIHIL

RepD	NHIL
D, OO	NHIL

8(p0)	NIHIL
8.00)	NIHIL

10.00	NIHIL
0.00	NIHIL
10.00	NIHIL

0.00	NHIL
8.00	NHIL

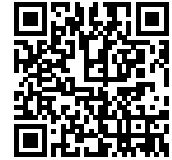
0.00	Nil
0.00	Nil

[illegible]

SBB	015	08	023	635120	KANTOR PELAYANAN PEBERKHAAN NEGARA BENTENG	650016512020000	BPK	BPK 155 0PN BENTENG	SR KC JAKARTA VETERAN	5 76/0PN 25/09/07/2019	19 Maret 2019	200	uang lembur menggunakan UP, cetur tersebut terjadi karena warna rekening berbeda dan pada waktu tengah malam di hari kerja tersebut, sehingga bertambah total sedang memuat peraparan rekening Bud17.000
-----	-----	----	-----	--------	--	-----------------	-----	---------------------	-----------------------	------------------------	---------------	-----	---

[illegible]

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2023



Tanggal : 15/05/24 1:06 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI
 Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

AKUN : 212112 Beban barang yang masih harus dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.015114	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	(1,972,414)
0.0	015.08.015115	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	0
0.0	015.08.015116	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN	(596,736)
0.0	015.08.015117	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS INVESTASI	(111,000)
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	(42,111,577)
0.0	015.08.330171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT	(2,231,100)
0.0	015.08.340249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	(2,681,316)
0.0	015.08.409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	(115,923,745,566)
0.0	015.08.439165	KOMITE STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH (KSAP)	(670,890)
0.0	015.08.439171	SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA	0
0.0	015.08.445371	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO	(6,510,275)
0.0	015.08.451531	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG II	(11,405,115)
0.0	015.08.451547	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II	(1,164,520)
0.0	015.08.451553	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II	(2,554,720)
0.0	015.08.451562	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II	(1,825,004)
0.0	015.08.451578	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II	(2,752,411)
0.0	015.08.451604	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU	(1,034,520)
0.0	015.08.452878	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO	(12,326,131)

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2023

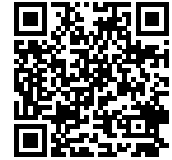


Tanggal : 15/05/24 1:06 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI
 Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

AKUN : 212112 Beban barang yang masih harus dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.497587	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATES	(10,603,531)
0.0	015.08.497593	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINJAI	(13,672,360)
0.0	015.08.497607	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BITUNG	(12,975,411)
0.0	015.08.497622	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA	(12,871,670)
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	(792,888,526)
0.0	015.08.527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	(161,847,698)
0.0	015.08.527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	(125,918,268)
0.0	015.08.527048	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II	(182,341,434)
0.0	015.08.527052	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA III	0
0.0	015.08.527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	(29,332,764)
0.0	015.08.527102	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I	(1,914,089)
0.0	015.08.527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	(14,519,601)
0.0	015.08.527137	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	(31,405,819)
0.0	015.08.527141	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA	(12,091,215)
0.0	015.08.527158	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKARTA	(11,711,490)
0.0	015.08.527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	(18,152,182)
0.0	015.08.527183	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG	(14,806,568)
0.0	015.08.527205	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GARUT	(8,759,002)

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2023



Tanggal : 15/05/24 1:06 PM
 Halaman : 3
 Prg ID : Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI
 Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

AKUN : 212112 Beban barang yang masih harus dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527230	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI	(10,744,406)
0.0	015.08.527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	(6,392,777)
0.0	015.08.527272	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I	(42,601,291)
0.0	015.08.527289	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA	(16,571,790)
0.0	015.08.527293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO	(14,580,860)
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	(13,310,546)
0.0	015.08.527315	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKALONGAN	(13,734,768)
0.0	015.08.527322	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PATI	(16,233,851)
0.0	015.08.527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	(11,284,464)
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	(8,384,233)
0.0	015.08.527357	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL	(16,789,842)
0.0	015.08.527361	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP	(14,208,480)
0.0	015.08.527399	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA	(968,641)
0.0	015.08.527411	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	(3,533,261)
0.0	015.08.527425	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I	(1,321,676)
0.0	015.08.527432	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG	(16,591,845)
0.0	015.08.527446	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI	(16,952,767)
0.0	015.08.527450	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN	(18,105,229)

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2023



Tanggal : 15/05/24 1:06 PM
 Halaman : 4
 Prg ID : Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI
 Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

AKUN : 212112 Beban barang yang masih harus dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527467	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO	(11,638,114)
0.0	015.08.527471	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN	(17,758,618)
0.0	015.08.527488	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOJONEGORO	(12,559,976)
0.0	015.08.527492	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI	(13,432,039)
0.0	015.08.527500	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MOJOKERTO	(15,030,530)
0.0	015.08.527514	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PACITAN	(9,416,620)
0.0	015.08.527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	(15,023,035)
0.0	015.08.527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	(3,142,055)
0.0	015.08.527560	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	(2,799,003)
0.0	015.08.527577	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH	(10,688,420)
0.0	015.08.527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	(13,770,553)
0.0	015.08.527598	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAK TUAN	(11,143,544)
0.0	015.08.527603	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOK SEUMAWE	(14,281,031)
0.0	015.08.527610	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE	(11,888,252)
0.0	015.08.527624	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON	(7,706,327)
0.0	015.08.527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0
0.0	015.08.527652	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I	(1,606,941)
0.0	015.08.527666	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR	(15,028,565)

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2023



Tanggal : 15/05/24 1:06 PM
 Halaman : 5
 Prg ID : Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI
 Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

AKUN : 212112 Beban barang yang masih harus dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527670	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG SIDEMPUAN	(9,446,073)
0.0	015.08.527687	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNG SITOLI	(11,129,733)
0.0	015.08.527691	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG BALAI	(13,058,657)
0.0	015.08.527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	(10,369,270)
0.0	015.08.527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	(12,684,188)
0.0	015.08.527734	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDIKALANG	(6,674,172)
0.0	015.08.527741	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI	(13,472,601)
0.0	015.08.527755	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIGE	(7,938,121)
0.0	015.08.527776	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	(29,702,731)
0.0	015.08.527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	(22,759,528)
0.0	015.08.527797	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI	(11,604,412)
0.0	015.08.527802	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIJUNJUNG	(7,871,793)
0.0	015.08.527819	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK	(12,028,747)
0.0	015.08.527823	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK SIKAPING	(9,271,938)
0.0	015.08.527844	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU	(15,275,220)
0.0	015.08.527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	(2,373,407)
0.0	015.08.527865	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT	(10,763,735)
0.0	015.08.527872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI	(12,651,258)

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2023

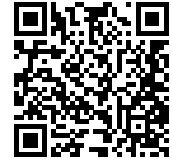


Tanggal : 15/05/24 1:06 PM
 Halaman : 6
 Prg ID : Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI
 Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

AKUN : 212112 Beban barang yang masih harus dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527890	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI	(18,952,978)
0.0	015.08.527908	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGAI PENUH	(8,485,505)
0.0	015.08.527912	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUARA BUNGO	(9,746,420)
0.0	015.08.527933	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	(2,057,513)
0.0	015.08.527940	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG	(350,882)
0.0	015.08.527954	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG	(14,796,438)
0.0	015.08.527961	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU	(11,735,356)
0.0	015.08.527975	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATURAJA	(13,852,837)
0.0	015.08.527982	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PANDAN	(14,321,609)
0.0	015.08.528001	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	(24,325,374)
0.0	015.08.528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	(15,939,944)
0.0	015.08.528022	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABUMI	(14,562,066)
0.0	015.08.528036	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA METRO LAMPUNG	(12,256,063)
0.0	015.08.528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	(19,331,049)
0.0	015.08.528061	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK	(14,521,231)
0.0	015.08.528078	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINTANG	(11,258,601)
0.0	015.08.528082	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KETAPANG	(11,564,919)
0.0	015.08.528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	(10,556,353)

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2023



Tanggal : 15/05/24 1:06 PM
 Halaman : 7
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI
 Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

AKUN : 212112 Beban barang yang masih harus dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.528104	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	(12,440,166)
0.0	015.08.528125	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA	(16,416,841)
0.0	015.08.528146	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUNTOK	(9,592,954)
0.0	015.08.528150	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKALAN BUN	(13,860,780)
0.0	015.08.528171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	(23,450,444)
0.0	015.08.528188	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN	(19,393,342)
0.0	015.08.528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	(12,192,076)
0.0	015.08.528200	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BARABAI	(12,233,034)
0.0	015.08.528221	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	(14,911,176)
0.0	015.08.528235	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN	(13,467,589)
0.0	015.08.528242	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIKPAPAN	(1,218,060)
0.0	015.08.528260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA	(2,382,726)
0.0	015.08.528277	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO	(12,397,134)
0.0	015.08.528281	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO	(19,150,196)
0.0	015.08.528298	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAHUNA	(10,850,394)
0.0	015.08.528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	(19,427,687)
0.0	015.08.528324	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUWUK	(13,101,654)
0.0	015.08.528331	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA POSO	(12,339,834)

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2023



Tanggal : 15/05/24 1:06 PM
 Halaman : 8
 Prg ID : Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI
 Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

AKUN : 212112 Beban barang yang masih harus dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI	(9,636,183)
0.0	015.08.528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	(570,350)
0.0	015.08.528370	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASAR I	(10,156,663)
0.0	015.08.528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE	(12,106,518)
0.0	015.08.528391	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANTA ENG	(14,444,070)
0.0	015.08.528409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALOPO	(10,600,945)
0.0	015.08.528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	(15,586,470)
0.0	015.08.528420	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE	(12,797,525)
0.0	015.08.528441	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI	(16,271,891)
0.0	015.08.528455	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU	(6,006,034)
0.0	015.08.528476	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU	(20,807,067)
0.0	015.08.528480	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	(2,424,811)
0.0	015.08.528497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE	(18,866,351)
0.0	015.08.528502	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL	(9,589,664)
0.0	015.08.528519	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAUMLAKI	(14,390,921)
0.0	015.08.528544	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI	(2,393,864)
0.0	015.08.528551	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR	(463,915)
0.0	015.08.528565	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGARAJA	(867,742)

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2023



Tanggal : 15/05/24 1:06 PM
 Halaman : 9
 Prg ID : Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI
 Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

AKUN : 212112 Beban barang yang masih harus dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.528586	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM	(18,544,879)
0.0	015.08.528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA	(12,941,151)
0.0	015.08.528608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	(14,430,171)
0.0	015.08.528629	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	(4,530,465)
0.0	015.08.528633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG	(1,745,552)
0.0	015.08.528640	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ENDE	(13,443,656)
0.0	015.08.528654	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAINGAPU	(1,433,121)
0.0	015.08.528661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RUTENG	(1,678,277)
0.0	015.08.528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	(4,002,771)
0.0	015.08.528696	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA	(338,550)
0.0	015.08.528701	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIAK	(213,564)
0.0	015.08.528718	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI	(1,676,100)
0.0	015.08.528722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SORONG	(1,222,464)
0.0	015.08.528739	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	(2,116,485)
0.0	015.08.528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	(21,736,886)
0.0	015.08.528750	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE	(14,904,764)
0.0	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	0
0.0	015.08.528785	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU	(13,865,164)

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2023



Tanggal : 15/05/24 1:06 PM
 Halaman : 10
 Prg ID : Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI
 Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

AKUN : 212112 Beban barang yang masih harus dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.528792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANNA	(10,032,993)
0.0	015.08.531293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV	(161,394)
0.0	015.08.539032	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM	(16,863,480)
0.0	015.08.539049	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERUI	(11,142,753)
0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	(29,725,101)
0.0	015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	(22,083,806)
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	(18,816,163)
0.0	015.08.613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	(16,464,283)
0.0	015.08.613764	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	(20,276,434)
0.0	015.08.613771	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	(25,742,396)
0.0	015.08.613785	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	(19,181,692)
0.0	015.08.613792	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	(22,013,702)
0.0	015.08.613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	(19,822,004)
0.0	015.08.613811	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(1,449,269)
0.0	015.08.613832	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIMIKA	(10,378,221)
0.0	015.08.615081	KOMITE INVESTASI PEMERINTAH	0
0.0	015.08.634256	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	(13,926,379)
0.0	015.08.634260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	(19,732,831)

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2023

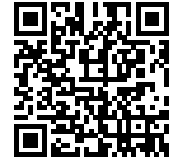


Tanggal : 15/05/24 1:06 PM
 Halaman : 11
 Prg ID : Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI
 Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

AKUN : 212112 Beban barang yang masih harus dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.634277	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	(37,482,270)
0.0	015.08.634409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN	(7,088,686)
0.0	015.08.634497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUALA TUNGKAL	(8,354,467)
0.0	015.08.634530	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LAHAT	(13,056,149)
0.0	015.08.634572	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA	(7,036,220)
0.0	015.08.634608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CURUP	(7,694,009)
0.0	015.08.634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	(16,352,270)
0.0	015.08.634661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN	(5,820,255)
0.0	015.08.634722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN	(11,580,807)
0.0	015.08.634792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WONOSARI	(14,166,204)
0.0	015.08.634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	(7,016,978)
0.0	015.08.634963	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG	(9,080,100)
0.0	015.08.634984	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG REDEP	(8,583,931)
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	(11,382,319)
0.0	015.08.635045	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA	(10,797,068)
0.0	015.08.635120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENTENG	(10,488,581)
0.0	015.08.635155	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA	(10,577,512)
0.0	015.08.635162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA	(9,062,500)

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2023



Tanggal : 15/05/24 1:06 PM
 Halaman : 12
 Prg ID : Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI
 Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

AKUN : 212112 Beban barang yang masih harus dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.635197	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMUBAGU	(3,754,651)
0.0	015.08.648741	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO	(24,738,492)
0.0	015.08.648762	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANGKO	(9,878,792)
0.0	015.08.648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	(11,058,670)
0.0	015.08.648783	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	(10,277,209)
0.0	015.08.648790	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMEDANG	(9,717,493)
0.0	015.08.648805	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SRAGEN	(13,105,424)
0.0	015.08.648812	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWODADI	(12,494,740)
0.0	015.08.648826	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA	(10,631,755)
0.0	015.08.648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	(13,884,070)
0.0	015.08.648847	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SELONG	(7,474,372)
0.0	015.08.648851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKALE	(7,912,670)
0.0	015.08.648868	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMPIT	(13,795,484)
0.0	015.08.648872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PELEIHARI	(9,907,552)
0.0	015.08.648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	(10,231,853)
0.0	015.08.648893	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU	(9,938,412)
0.0	015.08.652449	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI	(15,535,627)
0.0	015.08.652453	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ATAMBUA	(7,935,566)

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2023



Tanggal : 15/05/24 1:06 PM
Halaman : 13
Prg ID : Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI
Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

AKUN : 212112 Beban barang yang masih harus dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.652460	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MASOHI	(13,301,807)
0.0	015.08.662770	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LARANTUKA	(10,800,434)
0.0	015.08.662787	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA	(21,449,276)
0.0	015.08.662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	(35,292,293)
0.0	015.08.662789	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG SELOR	(2,779,783)
TOTAL			(119,661,380,738)

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2023

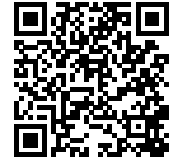


Tanggal : 15/05/24 1:06 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI
 Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

AKUN : 114112 Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1,434,884
0.0	015.08.340249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0
0.0	015.08.409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	2,089,191,562,177
0.0	015.08.497622	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA	0
0.0	015.08.527141	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA	0
0.0	015.08.527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	723,334
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	352,458
0.0	015.08.527488	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOJONEGORO	0
0.0	015.08.527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	723,333
0.0	015.08.527560	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	3,722,478
0.0	015.08.527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	1,178,931
0.0	015.08.527598	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAK TUAN	384,500
0.0	015.08.527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	3,895,068
0.0	015.08.527954	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG	0
0.0	015.08.528331	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA POSO	0
0.0	015.08.528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	0
0.0	015.08.528476	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU	462,029
0.0	015.08.528480	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	49,000,000

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2023



Tanggal : 15/05/24 1:06 PM
Halaman : 2
Prg ID : Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI
Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

AKUN : 114112 Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.528497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE	16,916,667
0.0	015.08.528502	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL	0
0.0	015.08.528608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	0
0.0	015.08.528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	213,548
0.0	015.08.528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	0
0.0	015.08.528750	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE	0
0.0	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	9,498,440
0.0	015.08.539032	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM	651,485
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	0
0.0	015.08.613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0
0.0	015.08.648741	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO	1,425,000
TOTAL			2,089,282,144,332

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 15/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 15/05/24 1:05 PM

Halaman : 1

lap_lo_es1

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	35,590,590,605,767	36,218,862,875,413	(628,272,269,646)	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	35,590,590,605,767	36,218,862,875,413	(628,272,269,646)	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	35,590,590,605,767	36,218,862,875,413	(628,272,269,646)	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	220,973,294,660	419,768,971,328	(198,795,676,668)	-
Beban Persediaan	15,571,035,582	19,128,041,784	(3,557,006,202)	-
Beban Barang dan Jasa	20,926,320,742,713	33,418,804,649,147	(12,492,483,906,434)	-
Beban Pemeliharaan	302,501,989,112	239,957,908,760	62,544,080,352	-
Beban Perjalanan Dinas	150,633,639,040	167,593,547,085	(16,959,908,045)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 15/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 15/05/24 1:05 PM

Halaman : 2

lap_lo_es1

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	312,966,366,427	298,675,373,107	14,290,993,320	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	103,401,534,071	48,805,993,969	54,595,540,102	-
Beban Transfer	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	22,032,368,601,605	34,612,734,485,180	(12,580,365,883,575)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	13,558,222,004,162	1,606,128,390,233	11,952,093,613,929	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(3,376,888,240)	(2,764,411,127)	(612,477,113)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2,375,416,012	4,600,313,586	(2,224,897,574)	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	5,752,304,252	7,364,724,713	(1,612,420,461)	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	100,244,520,864	98,975,674,437	1,268,846,427	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	100,433,320,167	100,363,623,208	69,696,959	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	188,799,303	1,387,948,771	(1,199,149,468)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	96,867,632,624	96,211,263,310	656,369,314	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	13,655,089,636,786	1,702,339,653,543	11,952,749,983,243	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	13,655,089,636,786	1,702,339,653,543	11,952,749,983,243	-

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 15/05/24 1:03 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424136	Pendapatan Investasi	252,666,941,000	263,379,033,609	0	263,379,033,609	104.24
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	34,430,680,000,000	32,393,330,489,134	0	32,393,330,489,134	94.08
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	166,344,743,000	204,555,952,778	0	204,555,952,778	122.97
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	34,849,691,684,000	32,861,265,475,521	0	32,861,265,475,521	94.29
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum					
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	37,921,982,000	224,703,422,899	0	224,703,422,899	592.54
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4242	37,921,982,000	224,703,422,899	0	224,703,422,899	592.54
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1,002,135,199,000	2,369,305,407,394	5,118,354,000	2,364,187,053,394	235.91
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	100,083,008,053	0	100,083,008,053	0
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	1,697,597,318	340,663,719	1,356,933,599	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	1,002,135,199,000	2,471,086,012,765	5,459,017,719	2,465,626,995,046	246.04
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	213,849,380	0	213,849,380	0
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	245,770,774	0	245,770,774	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,660,203,565	0	1,660,203,565	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	469,441,673	0	469,441,673	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5,650,000	1,293,216,202	0	1,293,216,202	22888.78
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	5,650,000	3,882,481,594	0	3,882,481,594	68,716.49
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	30,000,000	0	30,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	30,000,000	0	30,000,000	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 15/05/24 1:03 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	309,217,868	0	309,217,868	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	309,217,868	0	309,217,868	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	255,931,900	0	255,931,900	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	391,803,969	0	391,803,969	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	168,910,766	0	168,910,766	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	7,625,560	0	7,625,560	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	686,568,012	0	686,568,012	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	301,730,477	0	301,730,477	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	1,812,570,684	0	1,812,570,684	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	35,889,754,515,000	35,563,089,181,331	5,459,017,719	35,557,630,163,612	99.07
	JUMLAH PENDAPATAN	35,889,754,515,000	35,563,089,181,331	5,459,017,719	35,557,630,163,612	99.07

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 15/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 15/05/24 1:05 PM
Halaman : 1

lap_neraca_es1_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	26,999,593	7,721,142	19,278,451	249.68
Kas Lainnya dan Setara Kas	9,818,134,618	5,882,390,135	3,935,744,483	66.91
Kas pada Badan Layanan Umum	31,805,963,615,669	24,557,304,394,286	7,248,659,221,383	29.52
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	8,867,103,195,682	3,057,426,608,776	5,809,676,586,906	190.02
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	2,089,282,144,332	1,559,968,031,629	529,314,112,703	33.93
Uang Muka Belanja (prepayment)	57,197,160	1,019,845,910	(962,648,750)	(94.39)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	587,180,096,355	457,355,338,948	129,824,757,407	28.39
Piutang Bukan Pajak	256,205,006	412,966,823	(156,761,817)	(37.96)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(252,138,939)	(129,878,993)	(122,259,946)	94.13
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	4,066,067	283,087,830	(279,021,763)	(98.56)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	12,000,000	12,000,000	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(60,000)	(60,000)	0	0.00
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	11,940,000	11,940,000	0	0.00
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	6,446,545,338	0	6,446,545,338	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(32,232,727)	0	(32,232,727)	0.00
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	6,414,312,611	0	6,414,312,611	0.00
Persediaan	16,979,669,050	17,374,861,469	(395,192,419)	(2.27)
JUMLAH ASET LANCAR	43,382,841,371,137	29,656,634,220,125	13,726,207,151,012	46.28
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Dana Bergulir	1,299,899,736,679	1,332,605,202,696	(32,705,466,017)	(2.45)
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum	8,019,775,521,545	6,640,289,050,977	1,379,486,470,568	20.77
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	1,237,505,000,000	0	1,237,505,000,000	0.00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(261,801,663,542)	(167,148,325,297)	(94,653,338,245)	56.63
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	(21,071,190,476)	0	(21,071,190,476)	0.00
Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih	(40,372,794,275)	(33,201,445,255)	(7,171,349,020)	21.60
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	10,233,934,609,931	7,772,544,483,121	2,461,390,126,810	31.67
ASET TETAP				
Tanah	9,179,987,122,830	9,072,828,813,486	107,158,309,344	1.18
Peralatan dan Mesin	1,868,094,238,213	1,636,741,890,276	231,352,347,937	14.13
Gedung dan Bangunan	2,188,851,669,204	2,061,188,950,999	127,662,718,205	6.19
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,114,536,000	1,114,536,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	12,881,015,778	12,056,073,376	824,942,402	6.84
Konstruksi Dalam Pengerjaan	37,863,584,959	13,133,398,275	24,730,186,684	188.30
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,091,517,794,503)	(1,866,450,361,632)	(225,067,432,871)	12.06
JUMLAH ASET TETAP	11,197,274,372,481	10,930,613,300,780	266,661,071,701	2.44

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 15/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 15/05/24 1:05 PM
Halaman : 2

lap_neraca_es1_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	1,862,811,088	1,907,443,863	(44,632,775)	(2.34)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(1,828,396,488)	(1,639,612,264)	(188,784,224)	11.51
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	34,414,600	267,831,599	(233,416,999)	(87.15)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	34,414,600	267,831,599	(233,416,999)	(87.15)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	875,112,569,306	846,281,903,677	28,830,665,629	3.41
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	1,348,604,387	0	1,348,604,387	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	21,009,926,971	0	21,009,926,971	0.00
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	13,112,690,253,718	7,118,197,617,793	5,994,492,635,925	84.21
Aset Lain-lain	30,795,913,946	25,462,113,898	5,333,800,048	20.95
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(614,689,075,224)	(582,035,565,260)	(32,653,509,964)	5.61
JUMLAH ASET LAINNYA	13,426,268,193,104	7,407,906,070,108	6,018,362,122,996	81.24
JUMLAH ASET	78,240,352,961,253	55,767,965,905,733	22,472,387,055,520	40.30
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	144,007,613,353	21,556,184,910	122,451,428,443	568.06
Pendapatan Diterima Dimuka	1,186,095,245	1,505,831,273	(319,736,028)	(21.23)
Uang Muka dari KPPN	26,999,593	7,721,142	19,278,451	249.68
Utang Jangka Pendek Lainnya	1,227,820	22,232,325	(21,004,505)	(94.48)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	145,221,936,011	23,091,969,650	122,129,966,361	528.89
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	22,411,294,321,466	15,091,091,871,466	7,320,202,450,000	48.51
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	22,411,294,321,466	15,091,091,871,466	7,320,202,450,000	48.51
JUMLAH KEWAJIBAN	22,556,516,257,477	15,114,183,841,116	7,442,332,416,361	49.24
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	55,683,836,703,776	40,653,782,064,617	15,030,054,639,159	36.97
JUMLAH EKUITAS	55,683,836,703,776	40,653,782,064,617	15,030,054,639,159	36.97
JUMLAH EKUITAS	55,683,836,703,776	40,653,782,064,617	15,030,054,639,159	36.97
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	78,240,352,961,253	55,767,965,905,733	22,472,387,055,520	40.30

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 15/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 15/05/24 1:05 PM

Halaman : 3

lap_neraca_es1_komparatif

Keterangan :

FINAL

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2023



Tanggal : 15/05/24 1:11 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI
 Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

AKUN : 212111 Beban pegawai yang masih harus dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	(43,513,000)
0.0	015.08.451562	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II	0
0.0	015.08.451578	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II	(2,034,000)
0.0	015.08.451604	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU	0
0.0	015.08.452878	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO	0
0.0	015.08.497622	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA	(7,410,000)
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	0
0.0	015.08.527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	(1,482,000)
0.0	015.08.527048	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II	0
0.0	015.08.527137	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	0
0.0	015.08.527230	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI	(13,578,000)
0.0	015.08.527289	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA	(47,034,200)
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	(16,321,000)
0.0	015.08.527399	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA	0
0.0	015.08.527411	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	0
0.0	015.08.527467	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO	(7,953,000)
0.0	015.08.527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	(72,000)
0.0	015.08.527560	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	(560,000)

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2023



Tanggal : 15/05/24 1:11 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI
 Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

AKUN : 212111 Beban pegawai yang masih harus dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527577	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH	(25,639,000)
0.0	015.08.527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0
0.0	015.08.527666	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR	(665,000)
0.0	015.08.527670	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG SIDEMPUAN	0
0.0	015.08.527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	0
0.0	015.08.527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	0
0.0	015.08.527741	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI	0
0.0	015.08.527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	(11,660,000)
0.0	015.08.527961	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU	0
0.0	015.08.528221	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	(18,698,000)
0.0	015.08.528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	0
0.0	015.08.528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI	0
0.0	015.08.528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0
0.0	015.08.528370	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASAR I	(8,665,000)
0.0	015.08.528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE	(12,366,000)
0.0	015.08.528502	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL	(3,965,000)
0.0	015.08.528519	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAUMLAKI	(7,988,000)
0.0	015.08.528629	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2023



Tanggal : 15/05/24 1:11 PM
 Halaman : 3
 Prg ID : Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI
 Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

AKUN : 212111 Beban pegawai yang masih harus dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	0
0.0	015.08.528701	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIAK	0
0.0	015.08.528739	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	0
0.0	015.08.539049	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERUI	0
0.0	015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	0
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	(27,570,000)
0.0	015.08.613792	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0
0.0	015.08.634256	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	0
0.0	015.08.634661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN	0
0.0	015.08.634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	0
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	0
0.0	015.08.648783	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	0
0.0	015.08.648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	0
0.0	015.08.648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	0
0.0	015.08.652460	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MASOHI	0
TOTAL			(257,173,200)

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPB-E1 : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 15/05/24 6:00 AM
Tanggal : 15/05/24 12:45 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_es1

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	1,722,925	9,072,828,813,486	20,112	121,884,346,544	19,423	14,726,037,200	1,723,614	9,179,987,122,830
20101	TANAH PERSIL	1,692,377	9,025,605,925,486	19,886	121,684,573,544	19,423	14,726,037,200	1,692,840	9,132,564,461,830
20102	TANAH NON PERSIL	23,555	34,558,987,000	6	0	0	0	23,561	34,558,987,000
20103	LAPANGAN	6,993	12,663,901,000	220	199,773,000	0	0	7,213	12,863,674,000
132111	Peralatan dan Mesin	164,794	1,636,741,890,276	21,163	395,977,843,972	12,048	164,625,496,035	173,909	1,868,094,238,213
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	541	58,562,654,080	38	4,078,342,779	37	2,795,246,450	542	59,845,750,409
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1,199	181,706,926,860	181	58,495,307,512	150	36,351,698,371	1,230	203,850,536,001
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	184	292,060,427	61	135,273,999	48	101,123,214	197	326,211,212
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	29	2,049,225,506	1	4,518,314,400	0	0	30	6,567,539,906
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	57	133,580,636	1	1,155,000	1	181,000	57	134,554,636
30303	ALAT UKUR	477	1,338,154,445	17	49,890,000	12	35,640,000	482	1,352,404,445
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	7	43,656,000	7	43,656,000	0	0
30501	ALAT KANTOR	29,849	122,016,563,634	812	8,866,074,292	805	4,477,570,023	29,856	126,405,067,903
30502	ALAT RUMAH TANGGA	97,050	292,152,866,748	7,321	48,036,205,379	3,628	11,673,159,812	100,743	328,515,912,315
30601	ALAT STUDIO	4,463	115,215,062,278	658	54,669,868,049	439	21,925,685,981	4,682	147,959,244,346
30602	ALAT KOMUNIKASI	1,266	5,825,383,832	51	635,425,090	31	87,849,340	1,286	6,372,959,582
30603	PERALATAN PEMANCAR	112	28,842,206,064	31	10,997,685,000	23	6,771,975,986	120	33,067,915,078
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	152	561,327,695	115	359,449,531	105	318,236,501	162	602,540,725
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	8	19,181,080	4	174,870,550	4	176,689,550	8	17,362,080
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	32	76,342,290	32	76,342,290	0	0
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0	0	0	0	0	0	0	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	1	438,450,000	1	438,450,000	0	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0
30901	SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	12	159,077,990	12	159,077,990	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	17,193	225,688,224,551	9,711	119,953,460,471	5,651	66,765,833,994	21,253	278,875,851,028
31002	PERALATAN KOMPUTER	12,101	601,573,198,965	1,994	82,938,794,486	992	11,681,890,469	13,103	672,830,102,982
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
31301	SUMUR	4	172,326,000	0	0	0	0	4	172,326,000
31501	ALAT DETEKSI	0	0	1	3,401,193	1	3,401,193	0	0
31502	ALAT PELINDUNG	10	10,450,000	0	0	0	0	10	10,450,000
31503	ALAT SAR	19	98,310,000	19	58,875,000	15	45,000,000	23	112,185,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	0	0	47	641,080,071	47	641,080,071	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	6	55,207,800	6	55,207,800	0	0

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPB-E1 : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 15/05/24 6:00 AM
Tanggal : 15/05/24 12:45 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_es1

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	80	484,187,475	42	591,637,090	1	500,000	121	1,075,324,565
133111	Gedung dan Bangunan	4,066	2,061,188,950,999	81	163,721,525,276	82	36,058,807,071	4,065	2,188,851,669,204
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	907	1,450,963,629,152	15	93,872,217,865	17	15,796,253,534	905	1,529,039,593,483
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	2,958	571,082,488,944	61	68,450,395,173	61	20,012,859,537	2,958	619,520,024,580
40401	TUGU/TANDA BATAS	201	39,142,832,903	5	1,398,912,238	4	249,694,000	202	40,292,051,141
134111	Jalan dan Jembatan	1,463,875	479,879,000	0	0	0	0	1,463,875	479,879,000
50101	JALAN	1,463,801	479,879,000	0	0	0	0	1,463,801	479,879,000
50102	JEMBATAN	74	0	0	0	0	0	74	0
134112	Irigasi	7	133,819,000	0	0	0	0	7	133,819,000
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	3	26,979,000	0	0	0	0	3	26,979,000
50203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	0	0	0	0	0	0	0	0
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	1	4,671,000	0	0	0	0	1	4,671,000
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	3	102,169,000	0	0	0	0	3	102,169,000
134113	Jaringan	5	500,838,000	0	0	0	0	5	500,838,000
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	0	0	0	0	0	0	0	0
50303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	3	463,219,000	0	0	0	0	3	463,219,000
50309	INSTALASI PENGAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0
50310	INSTALASI LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
50401	JARINGAN AIR MINUM	2	37,619,000	0	0	0	0	2	37,619,000
50402	JARINGAN LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0
50403	JARINGAN TELEPON	0	0	0	0	0	0	0	0
50404	JARINGAN GAS	0	0	0	0	0	0	0	0
135111	Aset Tetap Renovasi	30	10,675,172,282	10	5,785,335,175	30	4,970,357,072	10	11,490,150,385
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	26	5,033,694,826	6	5,109,197,922	25	4,766,719,702	7	5,376,173,046
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	2	144,058,750	0	0	2	144,058,750	0	0
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	2	5,497,418,706	4	676,137,253	3	59,578,620	3	6,113,977,339
135121	Aset Tetap Lainnya	5,713	1,380,901,094	3	9,964,299	0	0	5,716	1,390,865,393
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	5,509	729,592,244	0	0	0	0	5,509	729,592,244
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	0	0	0	0	0	0	0	0
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	105	233,149,900	0	0	0	0	105	233,149,900

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPB-E1 : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 15/05/24 6:00 AM
Tanggal : 15/05/24 12:45 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_es1

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	93	352,230,550	3	9,964,299	0	0	96	362,194,849
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	6	65,928,400	0	0	0	0	6	65,928,400
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	3,249	25,264,635,498	4,769	44,992,440,549	4,855	39,461,162,101	3,163	30,795,913,946
20101	TANAH PERSIL	0	0	200	92,228,000	0	0	200	92,228,000
20103	LAPANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	6	66,664,000	23	1,149,979,518	14	727,045,344	15	489,598,174
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	10	736,139,501	71	7,472,774,872	61	6,362,769,660	20	1,846,144,713
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	3	4,733,740	2	1,015,300	3	2,565,200	2	3,183,840
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	3	4,635,000	1	181,000	1	181,000	3	4,635,000
30303	ALAT UKUR	1	1,650,000	0	0	1	1,650,000	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	714	3,647,741,971	565	2,912,281,952	688	2,944,004,937	591	3,616,018,986
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1,744	4,720,830,243	2,158	5,469,656,267	2,424	4,994,822,090	1,478	5,195,664,420
30601	ALAT STUDIO	73	6,387,472,271	209	3,159,551,517	200	2,324,363,807	82	7,222,659,981
30602	ALAT KOMUNIKASI	220	422,273,147	31	87,849,340	42	123,133,152	209	386,989,335
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	1	935,000	1	935,000	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	1	200,000	0	0	1	200,000	0	0
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	0	0	1	3,500,000	1	3,500,000	0	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	207	4,179,233,907	905	10,298,616,807	857	9,867,957,794	255	4,609,892,920
31002	PERALATAN KOMPUTER	222	4,444,529,488	579	5,170,167,476	543	4,712,976,617	258	4,901,720,347
31501	ALAT DETEKSI	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	1	500,000	1	500,000	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3	409,980,000	6	6,442,680,000	5	5,070,103,000	4	1,782,557,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	7	179,300,000	16	2,730,523,500	12	2,324,454,500	11	585,369,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	0	0	0	0	0	0	0	0
50101	JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0
50102	JEMBATAN	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPB-E1 : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 15/05/24 6:00 AM
Tanggal : 15/05/24 12:45 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_es1

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50309	INSTALASI PENGAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0
50310	INSTALASI LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
50402	JARINGAN LISTRIK	1	13,397,000	0	0	0	0	1	13,397,000
50403	JARINGAN TELEPON	0	0	0	0	0	0	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	30	1,930,230	0	0	0	0	30	1,930,230
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	0	0	0	0	0	0	0	0
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	0	0	0	0	0	0	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	4	43,925,000	0	0	0	0	4	43,925,000
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			12,809,194,899,635		732,371,455,815		259,841,859,479		13,281,724,495,971

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 15/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 15/05/24 1:05 PM

Halaman : 1

lap_lpe_es1

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	40,653,782,064,617	38,057,945,123,283	2,595,836,941,334	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	13,655,089,636,786	1,702,339,653,543	11,952,749,983,243	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	756,477,974	(231,788,347,392)	232,544,825,366	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(252,230,220)	0	(252,230,220)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	117,846,300	(117,846,300)	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(20,035,435)	(212,827,655,997)	212,807,620,562	-
LAIN-LAIN	1,028,743,629	(19,078,537,695)	20,107,281,324	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,374,208,524,399	1,125,285,635,183	248,922,889,216	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	15,030,054,639,159	2,595,836,941,334	12,434,217,697,825	-
EKUITAS AKHIR	55,683,836,703,776	40,653,782,064,617	15,030,054,639,159	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 15/05/24 1:03 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511129	Belanja Uang Makan PNS	60,077,748,000	51,890,899,000	49,569,790,430	12,999,350	49,556,791,080	95.5	2,334,107,920
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	60,077,748,000	51,890,899,000	49,569,790,430	12,999,350	49,556,791,080	95.5	2,334,107,920
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	21,603,041,000	27,207,290,000	25,795,918,050	28,502,350	25,767,415,700	94.71	1,439,874,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	21,603,041,000	27,207,290,000	25,795,918,050	28,502,350	25,767,415,700	94.71	1,439,874,300
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	1,110,000,000	0	0	0	0	1,110,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	0	1,110,000,000	0	0	0	0	1,110,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	81,680,789,000	80,208,189,000	75,365,708,480	41,501,700	75,324,206,780	93.91	4883982220
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	113,851,134,000	126,446,529,000	120,143,125,754	1,999,298	120,141,126,456	95.01	6,305,402,544
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	5,972,145,000	5,965,021,000	5,798,193,359	0	5,798,193,359	97.2	166,827,641
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,709,331,000	3,089,057,000	2,907,581,441	89,000	2,907,492,441	94.12	181,564,559
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	30,922,016,000	30,401,644,000	29,940,349,200	9,803,300	29,930,545,900	98.45	471,098,100
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	15,926,752,000	19,559,716,000	19,001,171,369	445,280	19,000,726,089	97.14	558,989,911
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	4,605,768,000	75,996,000	66,837,270	0	66,837,270	87.95	9,158,730
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	175,987,146,000	185,537,963,000	177,857,258,393	12,336,878	177,844,921,515	95.85	7,693,041,485
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	37,722,652,000	45,430,109,000	42,774,838,140	1,380,500	42,773,457,640	94.15	2,656,651,360
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5,815,690,000	4,746,241,000	4,616,330,000	72,547,500	4,543,782,500	95.73	202,458,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,546,015,000	4,574,354,000	4,376,276,509	3,300,000	4,372,976,509	95.6	201,377,491
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	134,609,000	293,475,000	286,813,250	0	286,813,250	97.73	6,661,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	47,218,966,000	55,044,179,000	52,054,257,899	77,228,000	51,977,029,899	94.43	3,067,149,101
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	15,376,701,000	16,043,074,000	15,676,432,642	400,000	15,676,032,642	97.71	367,041,358
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	605,000,000	10,546,000	10,165,680	0	10,165,680	96.39	380,320
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	15,981,701,000	16,053,620,000	15,686,598,322	400,000	15,686,198,322	97.71	367,421,678
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	35,790,580,000	36,998,861,000	36,726,620,292	1,097,452	36,725,522,840	99.26	273,338,160
522112	Belanja Langganan Telepon	5,047,105,000	4,037,724,000	3,936,784,495	53,391	3,936,731,104	97.5	100,992,896
522113	Belanja Langganan Air	2,401,671,000	2,928,539,000	2,849,384,068	0	2,849,384,068	97.3	79,154,932
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	295,129,000	568,184,000	500,392,188	0	500,392,188	88.07	67,791,812

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 15/05/24 1:03 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
522131	Belanja Jasa Konsultansi	297,400,000	111,974,000	75,750,000	0	75,750,000	67.65	36,224,000
522141	Belanja Sewa	4,421,178,000	5,442,915,000	5,359,597,956	0	5,359,597,956	98.47	83,317,044
522151	Belanja Jasa Profesi	8,930,425,000	6,941,380,000	5,307,194,895	855,000	5,306,339,895	76.45	1,635,040,105
522191	Belanja Jasa Lainnya	81,691,095,000	54,571,927,000	51,190,077,006	0	51,190,077,006	93.8	3,381,849,994
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,564,023,000	34,054,000	12,123,800	0	12,123,800	35.6	21,930,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	140,438,606,000	111,635,558,000	105,957,924,700	2,005,843	105,955,918,857	94.91	5,679,639,143
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	52,725,310,000	53,492,344,000	53,138,417,123	0	53,138,417,123	99.34	353,926,877
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,987,807,000	3,337,978,000	3,241,181,441	0	3,241,181,441	97.1	96,796,559
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	256,910,251,000	244,813,956,000	243,919,626,384	7,819,000	243,911,807,384	99.63	902,148,616
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	312,623,368,000	301,644,278,000	300,299,224,948	7,819,000	300,291,405,948	99.55	1,352,872,052
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97,649,456,000	98,133,904,000	93,179,075,051	54,056,569	93,125,018,482	94.9	5,008,885,518
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,167,210,000	5,622,903,000	5,076,805,160	1,098,000	5,075,707,160	90.27	547,195,840
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,008,768,000	11,185,496,000	10,715,197,770	7,470,000	10,707,727,770	95.73	477,768,230
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,741,182,000	6,165,338,000	6,091,227,300	560,000	6,090,667,300	98.79	74,670,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	111,566,616,000	121,107,641,000	115,062,305,281	63,184,569	114,999,120,712	94.96	6,108,520,288
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	816,300,000	2,345,326,000	2,150,487,399	5,685,800	2,144,801,599	91.45	200,524,401
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	816,300,000	2,345,326,000	2,150,487,399	5,685,800	2,144,801,599	91.45	200,524,401
5251	Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	131,216,384,000	159,766,614,000	145,698,826,680	817,000	145,698,009,680	91.19	14,068,604,320
525112	Belanja Barang	11,211,177,000	13,066,586,000	11,301,528,454	0	11,301,528,454	86.49	1,765,057,546
525113	Belanja Jasa	53,165,583,000	52,911,844,000	46,948,434,957	0	46,948,434,957	88.73	5,963,409,043
525114	Belanja Pemeliharaan	1,615,249,000	1,705,249,000	1,510,255,263	0	1,510,255,263	88.57	194,993,737
525115	Belanja Perjalanan	30,559,822,000	40,318,485,000	36,060,685,265	0	36,060,685,265	89.44	4,257,799,735
525117	Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	5,398,363,366,000	20,799,622,540,000	20,749,226,038,375	455,272,332	20,748,770,766,043	99.76	50,851,773,957
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	959,120,000	909,680,000	566,216,415	0	566,216,415	62.24	343,463,585
525151	Belanja Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup	2,471,198,000	207,634,671,000	207,406,480,901	0	207,406,480,901	99.89	228,190,099
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	248,258,000	50,742,000	12,347,601	0	12,347,601	24.33	38,394,399
525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	127,356,000	84,013,000	0	0	0	0	84,013,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	5,629,937,513,000	21,276,070,424,00	21,198,730,813,91	456,089,332	21,198,274,724,57	99.63	77,795,699,421
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,434,570,216,000	22,069,438,989,00	21,967,798,870,85	624,749,422	21,967,174,121,43	99.54	102264867569
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531111	Belanja Modal Tanah	0	199,903,000	199,773,000	0	199,773,000	99.93	130,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 15/05/24 1:03 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	0	199,903,000	199,773,000	0	199,773,000	99.93	130,000
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	192,539,546,000	195,667,074,000	195,294,503,102	0	195,294,503,102	99.81	372,570,898
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	182,983,000	182,867,283	0	182,867,283	99.94	115,717
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	192,539,546,000	195,850,057,000	195,477,370,385	0	195,477,370,385	99.81	372,686,615
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52,445,369,000	55,443,383,000	54,844,936,119	707,129,772	54,137,806,347	97.65	1,305,576,653
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	46,854,591,000	75,407,027,000	74,664,460,233	636,000	74,663,824,233	99.01	743,202,767
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	99,299,960,000	130,850,410,000	129,509,396,352	707,765,772	128,801,630,580	98.43	2,048,779,420
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	28,835,997,000	54,870,024,000	54,639,603,954	0	54,639,603,954	99.58	230,420,046
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	0	942,177,000	937,377,896	0	937,377,896	99.49	4,799,104
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	28,835,997,000	55,812,201,000	55,576,981,850	0	55,576,981,850	99.58	235,219,150
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	3,535,813,000	19,729,399,000	17,240,566,051	0	17,240,566,051	87.39	2,488,832,949
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	38,046,317,000	37,364,274,160	0	37,364,274,160	98.21	682,042,840
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	1,958,855,000	2,878,605,000	2,875,520,387	0	2,875,520,387	99.89	3,084,613
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	5,494,668,000	60,654,321,000	57,480,360,598	0	57,480,360,598	94.77	3,173,960,402
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	326,170,171,000	443,366,892,000	438,243,882,185	707,765,772	437,536,116,413	98.68	5830775587
	JUMLAH BELANJA	6,842,421,176,000	22,593,014,070,00	22,481,408,461,51	1,374,016,894	22,480,034,444,62	99.5	112,979,625,376

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN PERBENDAHARAAN 08

Tgl Data : 15/05/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 15/05/24 1:05 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_es1_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	35,889,754,515,000	35,557,630,163,612	(332,124,351,388)	99	32,917,166,553,000	36,191,165,857,439	3,273,999,304,439	110
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	35,889,748,865,000	35,551,595,893,466	(338,152,971,534)	99	32,907,346,053,000	36,177,085,902,696	3,269,739,849,696	110
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,650,000	6,034,270,146	6,028,620,146	1068 01	9,820,500,000	14,079,954,743	4,259,454,743	143
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	35,889,754,515,000	35,557,630,163,612	(332,124,351,388)	99	32,917,166,553,000	36,191,165,857,439	3,273,999,304,439	110
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	22,593,014,070,000	22,480,034,444,624	(112,979,625,376)	99	37,669,071,894,000	37,611,414,506,019	(57,657,387,981)	100
1. Belanja Pegawai	80,208,189,000	75,324,206,780	(4,883,982,220)	94	289,080,277,000	286,815,947,635	(2,264,329,365)	99
2. Belanja Barang	22,069,438,989,000	21,967,174,121,431	(102,264,867,569)	100	37,207,473,778,000	37,153,042,889,627	(54,430,888,373)	100
3. Belanja Modal	443,366,892,000	437,536,116,413	(5,830,775,587)	99	172,517,839,000	171,555,668,757	(962,170,243)	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN PERBENDAHARAAN 08

Tgl Data : 15/05/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 15/05/24 1:05 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_es1_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	22,593,014,070,000	22,480,034,444,624	(112,979,625,376)	99	37,669,071,894,000	37,611,414,506,019	(57,657,387,981)	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2023



Tanggal : 15/05/24 1:11 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI
 Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

AKUN : 219211 Pendapatan Sewa Diterima di Muka

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	(514,733,278)
0.0	015.08.527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	0
0.0	015.08.527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	(316,377,333)
0.0	015.08.527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	0
0.0	015.08.527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	(4,043,750)
0.0	015.08.527137	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	0
0.0	015.08.527141	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA	(2,468,500)
0.0	015.08.527272	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I	(11,204,672)
0.0	015.08.527293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO	0
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	(17,328,500)
0.0	015.08.527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	(3,959,500)
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	(18,570,750)
0.0	015.08.527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	(18,088,000)
0.0	015.08.527741	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI	(14,573,000)
0.0	015.08.527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	(38,933,306)
0.0	015.08.528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	(31,297,500)
0.0	015.08.528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	(74,724,000)

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2023



Tanggal : 15/05/24 1:11 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI
 Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

AKUN : 219211 Pendapatan Sewa Diterima di Muka

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	(17,586,333)
0.0	015.08.528200	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BARABAI	(950,000)
0.0	015.08.528661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RUTENG	(26,499,306)
0.0	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	(4,661,542)
0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	(25,852,600)
0.0	015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	(25,250,000)
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	(3,000,000)
0.0	015.08.613771	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0
0.0	015.08.634722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN	(15,345,000)
0.0	015.08.648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	(648,375)
TOTAL			(1,186,095,245)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 8-10, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230 (20 saluran) Pes. 6248, 3812337; FAKSIMILIE (021) 3852146; LAMAN www.kemenkeu.go.id

Berita Acara Rekonsiliasi

Pada tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data Kerugian Negara Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan antara dua pihak:

1. Bagian Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Dengan

2. Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Kegiatan Rekonsiliasi Data Kerugian Negara dilaksanakan secara bersama-sama untuk periode penatausahaan tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 dengan melakukan proses pencocokan data terhadap 26 kasus kerugian negara dengan rincian sebagai berikut:

- a. 18 kasus kerugian negara dengan saldo sebesar Rp1.889.443.863,00 dicatat sebagai piutang dalam Laporan Keuangan;
- b. Untuk kasus kerugian negara dengan penanggungjawab Sdr. Wakidjo Dikun dengan saldo sebesar Rp14.632.775,00 telah dihapuskan secara bersyarat dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 163/KM.1/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara c.q Kementerian Keuangan Atas Nama Wakidjo Dikun dan diusulkan penghapusan mutlak melalui surat Nomor S235/MK.1/2023 tanggal 2 November 2023. Kasus ini dicatat pada Laporan Perkembangan Kerugian Negara dan tidak dicatat pada neraca Laporan Keuangan karena telah terbit KMK Penghapusan Bersyarat dan diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan;
- c. 3 kasus kerugian negara belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan telah dilunasi pada tahun 2016 dan 2019 sehingga belum dicatat dalam Laporan Perkembangan Kerugian Negara. Terhadap 3 kasus dimaksud, DJPB agar segera melaporkan kasus dimaksud kepada Menteri Keuangan sesuai ketentuan PMK Nomor 218/PMK.1/2017;
- d. 5 kasus kerugian negara yang sudah dilaporkan kepada Menteri Keuangan namun belum diperoleh dokumen pengakuan piutang (SKTJM/SKPGR) tercatat dalam Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara, DJPB agar segera menindaklanjuti kasus dimaksud sesuai ketentuan PMK Nomor 218/PMK.1/2017.

Dari hasil rekonsiliasi data kerugian negara **diketahui terdapat perbedaan pencatatan sebesar Rp14.632.775,00** hal ini terjadi diantaranya karena terdapat perbedaan prinsip dalam hal pencatatan. Biro Perencanaan dan Keuangan menghapus catatan kasus pada Laporan Perkembangan Kerugian Negara apabila telah terbit Keputusan Menteri Keuangan tentang penghapusan mutlak. Sedangkan pada Laporan Keuangan kasus kerugian negara yang telah terbit surat penghapusan secara bersyarat tidak dicatat pada neraca laporan keuangan.

Kedua belah pihak sepakat bahwa saldo kerugian negara yang dicatat dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2023 adalah sebesar **Rp1.874.811.088,00**. Sedangkan 8 kasus kerugian negara pada huruf b dan c di atas, diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Februari 2024

Perwakilan
Bagian Perbendaharaan
Biro Perencanaan dan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Frank Sinatra
NIP 196907011996031002

Perwakilan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Oktana Yudha Sakti
NIP 197310021994031002

Perwakilan
Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Biro Perencanaan dan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Benny F. Panjaitan
NIP 198109092009011012



Matriks Hasil Bahas LHP BA 015

No	Nomor TP	Entitas	Uraian Temuan Pemeriksaan	Butir	Rekomendasi BPK	Rencana Aksi	Bukti Dukung pada Ren ana Aksi	Tindak Lanjut	Status (Usul Selesai/Dalam Proses)	Hasil Pembahasan	Keterangan																																													
1	1.1.15	BPDPKS	BPDPKS Belum Menetapkan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual tentang Pungutan Ekspor, Kurang Bayar dan Lebih Bayar Pungutan Ekspor dan Terdapat Indikasi Kurang Penerimaan Pungutan Ekspor yang Belum Dilunasi Sebesar Rp16.99 Miliar serta Adanya Peluang Kurang Penerimaan Pungutan Ekspor Sebesar Rp67.23 Miliar	a	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Perbendaharaan untuk menginstruksikan Direktur Utama BPDPKS supaya: a. Menetapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual tentang pungutan ekspor, kurang bayar dan lebih bayar pungutan ekspor;	Menteri Keuangan atau yang mewakili memerintahkan kepada Dirjen Perbendaharaan untuk menginstruksikan Direktur Utama BPDPKS: a. Menetapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual tentang pungutan ekspor, kurang bayar dan lebih bayar pungutan ekspor;	Bukti Pendukung a. Instruksi Menteri Keuangan atau yang mewakili b. Disposisi Dirjen Perbendaharaan c. Perdirut BPDPKS tentang Kebijakan Akuntansi	Telah diterbitkan Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor PER-7/DPKS/2023 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi atas Beban, Pendapatan Pungutan Ekspor, Piutang, dan Kewajiban Jangka Pendek pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, per tanggal 1 Desember 2023 (terlampir).	Usul Sesuai	Usul Sesuai	-																																													
		BPDPKS		b	menginstruksikan Direktur Penghimpunan Dana supaya memantau penerimaan pungutan ekspor senilai Rp16.998.631.140,00 yang belum dilunasi; dan	b. Memerintahkan Direktur Penghimpunan Dana akan memantau penerimaan pungutan ekspor senilai Rp16.998.631.140,00 yang belum dilunasi; dan	Bukti Setor pelunasan	Terhadap Pungutan Ekspor yang belum dilunasi, telah dilakukan pemantauan dan ditindaklanjuti sebagai berikut: TEMUAN BPK PERIODE EKSPOR TAHUN 2022 Total Temuan BPK Atas Ekspor Tahun 2022 Rp.16.998.631.140 Validasi BPDPKS atas Temuan BPK Rp.17.698.511.000 <table><tr><th>URAIAN</th><th>JUMLAH SPPEK</th><th>NOMINAL (Rp)</th></tr><tr><td>Yang Telah Dibayarkan</td><td>31</td><td>6.346.901.000</td></tr><tr><td>Belum Bayar</td><td>13</td><td>4.480.242.000</td></tr><tr><td>Proses Pengeluaran</td><td>6</td><td>6.235.400.000</td></tr><tr><td>Belum Bayar</td><td>13</td><td>99.678.000</td></tr><tr><td>Mayat Dibayar</td><td>7</td><td>47.028.000</td></tr><tr><td>GRAND TOTAL</td><td></td><td>17.698.511.000</td></tr></table>	URAIAN	JUMLAH SPPEK	NOMINAL (Rp)	Yang Telah Dibayarkan	31	6.346.901.000	Belum Bayar	13	4.480.242.000	Proses Pengeluaran	6	6.235.400.000	Belum Bayar	13	99.678.000	Mayat Dibayar	7	47.028.000	GRAND TOTAL		17.698.511.000	Dalam Proses	Dalam Proses																									
URAIAN	JUMLAH SPPEK	NOMINAL (Rp)																																																						
Yang Telah Dibayarkan	31	6.346.901.000																																																						
Belum Bayar	13	4.480.242.000																																																						
Proses Pengeluaran	6	6.235.400.000																																																						
Belum Bayar	13	99.678.000																																																						
Mayat Dibayar	7	47.028.000																																																						
GRAND TOTAL		17.698.511.000																																																						
		BPDPKS		c	menginstruksikan Direktur Penghimpunan Dana supaya melakukan koordinasi dengan Direktorat terkait pada Ditjen Bea dan Cukai dalam rangka rekonsiliasi data pembayaran pungutan ekspor dan validasi atas peluang kurang penerimaan sebesar Rp67.228.100.830,78 atas SPPEK/SPKPBK yang diterbitkan KPPBC TMP C Kuala Tanjung sebesar Rp14.282.254.510,26 KPPBC TMP B Dumai sebesar Rp52.738.424.298,02, dan KPUBC Tipe A Tanjung Priok sebesar Rp207.422.022,50.	c. Menginstruksikan Direktur Penghimpunan Dana akan melakukan koordinasi dengan Direktorat terkait pada Ditjen Bea dan Cukai dalam rangka rekonsiliasi data pembayaran pungutan ekspor dan validasi atas peluang kurang penerimaan senilai Rp67.228.100.830,78 atas SPPEK/SPKPBK yang diterbitkan KPPBC TMP C Kuala Tanjung senilai Rp14.282.254.510,26 KPPBC TMP B Dumai senilai Rp52.738.424.298,02, dan KPUBC Tipe A Tanjung Priok senilai Rp207.422.022,50.	BA rekonsiliasi BPDPKS dengan DJBC (khusus untuk yang Rp67.228.100.830,78) dan penetapan sesuai hasil rekon	Telah dilakukan koordinasi antara Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS dengan DJBC dengan hasil sebagai berikut: KURANG BAYAR ATAS SPPEK KPPBC DUMAI PERIODE TAHUN 2022 Total Potensi Kurang Bayar atas Temuan BPK Rp. 57.948.586.379,52 Hasil Validasi BPDPKS Rp.31.102.088,277 <table><tr><th>URAIAN</th><th>JUMLAH SPPEK</th><th>NOMINAL (Rp.)</th></tr><tr><td>Yang Telah Dibayarkan</td><td>6</td><td>20.225.086.000</td></tr><tr><td>Keterangan Diterima</td><td>3</td><td>812.485.792</td></tr><tr><td>Hasil Banding Yang Diterima</td><td>19</td><td>49.314.176.065</td></tr><tr><td>GRAND TOTAL</td><td></td><td>61.362.049.377</td></tr> KURANG BAYAR ATAS SPPEK KPPBC KUALA TANJUNG PERIODE TAHUN 2022 Total Potensi Kurang Bayar atas Temuan BPK Rp. 14.282.254.510,264 Hasil Validasi BPDPKS Rp.14.530.177,310 <table><tr><th>URAIAN</th><th>JUMLAH SPPEK</th><th>NOMINAL (Rp.)</th></tr><tr><td>Yang Telah Dibayarkan</td><td>59</td><td>13.216.132.000</td></tr><tr><td>Keterangan Diterima</td><td>5</td><td>250.490.230</td></tr><tr><td>Belum Dibayarkan</td><td>3</td><td>593.870.475</td></tr><tr><td>Belum Bayar Dalam Proses</td><td>9</td><td>484.702.241</td></tr><tr><td>GRAND TOTAL</td><td></td><td>14.545.304.436</td></tr> KURANG BAYAR ATAS SPPEK/KPU BC TANJUNG PRIOK PERIODE TAHUN 2022 Total Potensi Kurang Bayar atas Temuan BPK Rp. 207.422.022,5 Hasil Validasi BPDPKS Rp.5.210.563.872,5 <table><tr><th>URAIAN</th><th>JUMLAH SPPEK</th><th>NOMINAL (Rp.)</th></tr><tr><td>Yang Telah Dibayarkan</td><td>3</td><td>5.008.150.000</td></tr><tr><td>Hasil Banding Yang Diterima</td><td>3</td><td>202.413.871</td></tr><tr><td>GRAND TOTAL</td><td></td><td>5.210.563.871</td></tr></table></table></table>	URAIAN	JUMLAH SPPEK	NOMINAL (Rp.)	Yang Telah Dibayarkan	6	20.225.086.000	Keterangan Diterima	3	812.485.792	Hasil Banding Yang Diterima	19	49.314.176.065	GRAND TOTAL		61.362.049.377	URAIAN	JUMLAH SPPEK	NOMINAL (Rp.)	Yang Telah Dibayarkan	59	13.216.132.000	Keterangan Diterima	5	250.490.230	Belum Dibayarkan	3	593.870.475	Belum Bayar Dalam Proses	9	484.702.241	GRAND TOTAL		14.545.304.436	URAIAN	JUMLAH SPPEK	NOMINAL (Rp.)	Yang Telah Dibayarkan	3	5.008.150.000	Hasil Banding Yang Diterima	3	202.413.871	GRAND TOTAL		5.210.563.871	Usul selesai	Usul selesai Catatan: Dilengkapi BA Rekonsiliasi	
URAIAN	JUMLAH SPPEK	NOMINAL (Rp.)																																																						
Yang Telah Dibayarkan	6	20.225.086.000																																																						
Keterangan Diterima	3	812.485.792																																																						
Hasil Banding Yang Diterima	19	49.314.176.065																																																						
GRAND TOTAL		61.362.049.377																																																						
URAIAN	JUMLAH SPPEK	NOMINAL (Rp.)																																																						
Yang Telah Dibayarkan	59	13.216.132.000																																																						
Keterangan Diterima	5	250.490.230																																																						
Belum Dibayarkan	3	593.870.475																																																						
Belum Bayar Dalam Proses	9	484.702.241																																																						
GRAND TOTAL		14.545.304.436																																																						
URAIAN	JUMLAH SPPEK	NOMINAL (Rp.)																																																						
Yang Telah Dibayarkan	3	5.008.150.000																																																						
Hasil Banding Yang Diterima	3	202.413.871																																																						
GRAND TOTAL		5.210.563.871																																																						
2	1.2.2	DJPB	Denda Keterlambatan Penyelesaian Pengadaan Jasa Pengiriman Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan untuk menginstruksikan PPK dikenakan denda keterlambatan senilai Rp36.987.480,00 kepada PT PI dan disetorkan ke Kas Negara.	-	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Perbendaharaan untuk menginstruksikan PPK mengenakan denda keterlambatan senilai Rp36.987.480,00 kepada PT PI dan disetorkan ke Kas Negara.	Menteri Keuangan atau yang mewakili memerintahkan kepada Dirjen Perbendaharaan untuk menginstruksikan PPK Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan agar mengenakan denda keterlambatan senilai Rp36.987.480,00 kepada PT PI dan disetorkan ke Kas Negara.	a. Instruksi Menteri Keuangan atau yang mewakili b. Disposisi Dirjen Perbendaharaan c. Bukti setor senilai Rp36.987.480,00	Telah dilakukan penyetoran atas denda dimaksud dengan NTPN DB1BE48VSLM85PA pada tanggal 14 Juli 2023 sebesar Rp36.987.480,00. dokumen tambahan: Bukti Setor	Usul Selesai	Usul Selesai Catatan: Dilengkapi SS Disposisi kepada PPK	SS disposisi dari Setditjen kepada Kepala Bagian Umum selaku PPK terlampir																																													
3	1.2.8	BPDPKS	Terdapat Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Rakyat Sebesar Rp412,43 Juta Kepada Pekebun dengan Luas Lahan Tidak Sesuai Persyaratan	a	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Perbendaharaan untuk menginstruksikan Direktur Utama BPDPKS supaya: a. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dalam rangka menarik dana atas penerima dana PPKS yang luas lahannya tidak sesuai ketentuan sebesar Rp412.432.500,00.	Menteri Keuangan atau yang mewakili memerintahkan kepada Dirjen Perbendaharaan untuk menginstruksikan Direktur Utama BPDPKS: a. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dalam rangka menarik dana atas penerima dana PPKS yang luas lahannya tidak sesuai ketentuan sebesar Rp412.432.500,00;	a. Instruksi Menteri Keuangan atau yang mewakili b. Disposisi Dirjen Perbendaharaan c. Bukti pengembalian dana senilai Rp412.432.500,00	Terhadap penerima dana PPKS yang luas lahannya tidak sesuai ketentuan, telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Dari nilai yang harus dikembalikan Rp412.432.500, telah disetorkan kembali seluruhnya ke rekening BPDPKS.	Usul Selesai	Usul Selesai	-																																													
		BPDPKS		b	Menginstruksikan Direktur Penghimpunan Dana BPDKS bersama Direktur Umum, Keuangan, Kepatuhan & Manajemen Risiko agar mengevaluasi dan mengembangkan sistem aplikasi PSR Online yang mampu memfilter secara otomatis usulan luasan lahan terhadap database penerima dana PPKS per NIK dalam rangka meneliti kesesuaian data luas lahan pekebun Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) dengan ketentuan yang berlaku.	b. Menginstruksikan Direktur Penghimpunan Dana BPDKS bersama Direktur Umum, Keuangan, Kepatuhan & Manajemen Risiko agar mengevaluasi dan mengembangkan sistem aplikasi PSR Online yang mampu memfilter secara otomatis usulan luasan lahan terhadap database penerima dana PPKS per NIK dalam rangka meneliti kesesuaian data luas lahan pekebun Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) dengan ketentuan yang berlaku.	Screenshot hasil pengembangan aplikasi PSR Online	Aplikasi PSR akan di-reengineering agar sesuai standar dari Pusintek Kemenkeu, sehingga filter luasan lahan 4 Ha per NIK akan disusun ulang. Screenshot aplikasi PSR Online akan dilampirkan kemudian. Dokumen tambahan: Bukti screenshot aplikasi PSR Online per menu tahapan s.d. menu filter luasan lahan pekebun yang lebih dari 4 hektar per NIK.	Dalam Proses	Dalam Proses	-																																													

4	1.2.9	BPD PKS	Penilaian Kelayakan Pembiayaan Proposal Kajian Porang Sebagai Tanaman Sela di Tanaman Belum Menghasilkan Kelapa Sawit pada Pusat Perkebunan Kelapa Sawit Kurang Cermat	-	Menteri Keuangan atau yang mewakili memerintahkan Dirjen Perbendaharaan untuk menginstruksikan Direktur Utama BPD PKS supaya memastikan Berita Acara Hasil Penilaian Proposal yang disampaikan oleh Direktur Penyaluran Dana telah memuat persetujuan atau penolakan pemberian dukungan dana dari Komite Litbang secara kolektif sesuai ketentuan yang berlaku.	Menteri Keuangan atau yang mewakili memerintahkan Dirjen Perbendaharaan untuk menginstruksikan Direktur Utama BPD PKS supaya memastikan Berita Acara Hasil Penilaian Proposal yang disampaikan oleh Direktur Penyaluran Dana telah memuat persetujuan atau penolakan pemberian dukungan dana dari Komite Litbang secara kolektif sesuai ketentuan yang berlaku.	a. Instruksi Menteri Keuangan atau yang mewakili b. Disposisi Dirjen Perbendaharaan c. Nota Dinas dari Dirut BPD PKS ke Direktur Penyaluran Dana dan contoh bukti implementasinya	Berita Acara Hasil Penilaian Proposal yang dibuat oleh Komite Riset disampaikan oleh Direktur Penyaluran Dana kepada Direktur Utama dengan memuat kalimat "persetujuan atau penolakan pemberian dukungan dana dari Komite Litbang" secara kolektif sesuai ketentuan yang berlaku per 9 Agustus 2023.	Usul Selesai	Usul Selesai	-
5	1.2.10	BPD PKS	Pengendalian atas Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dalam Perjanjian Kerja Sama Kegiatan Promosi dan Kemitraan Kelapa Sawit Belum Memadai	-	BPK merekomendasikan Kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Perbendaharaan untuk menginstruksikan Direktur Utama BPD PKS supaya menyesuaikan Peraturan Direktur Utama BPD PKS tentang Tata Cara Pengajuan, Penilaian, Penetapan, Monitoring, dan Evaluasi Dukungan Pendanaan Kegiatan Promosi Perkebunan Kelapa Sawit sehingga memuat klausul yang mewajibkan mitra penerima dana menyampaikan laporan penggunaan.	Menteri Keuangan atau yang mewakili memerintahkan kepada Dirjen Perbendaharaan untuk menginstruksikan Direktur Utama BPD PKS supaya menyesuaikan Peraturan Direktur Utama BPD PKS tentang Tata Cara Pengajuan, Penilaian, Penetapan, Monitoring, dan Evaluasi Dukungan Pendanaan Kegiatan Promosi Perkebunan Kelapa Sawit termasuk memuat klausul yang mewajibkan mitra penerima dana menyampaikan laporan penggunaan	a. Instruksi Menteri Keuangan atau yang mewakili b. Disposisi Dirjen Perbendaharaan c. Revisi Perdirut tentang Tata Cara Pengajuan, Penilaian, Penetapan, Monitoring, dan Evaluasi Dukungan Pendanaan Kegiatan Promosi Perkebunan Kelapa Sawit dan contoh implementasinya	Telah diterbitkan Peraturan Direktur Utama Nomor PER-2/DPKS/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Utama Nomor PER-3/DPKS/2022 tentang Tata Cara Pengajuan, Penilaian, Penetapan, Monitoring dan Evaluasi Dukungan Pendanaan Kegiatan Promosi Perkebunan Kelapa Sawit, per tanggal 4 September 2023. Sesuai rekomendasi, sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 ayat (2) "Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat antara lain huruf f. tata cara pencairan dana, termasuk lampiran dokumen pencairan dana yang memuat rekapitulasi pengeluaran . Hal ini yang mengatur bahwa mitra penerima dana diwajibkan untuk menyampaikan laporan penggunaan. Disamping itu, dalam Pasal 12 ayat (1) dan (3), disebutkan bahwa dalam rangka akuntabilitas dukungan pendanaan kegiatan promosi perkebunan kelapa sawit, maka dilakukan monitoring dan evaluasi oleh BPD PKS dhi. Direktorat Kemitraan dengan memeriksa laporan kegiatan . (PER-2/DPKS/2023, terlampir)	Usul Selesai	Usul Selesai	-
6	1.2.12	DJPB	Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Sebesar Rp1,59 Miliar	d	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan: d. Dirjen Perbendaharaan menginstruksikan PPK Renovasi Interior Gedung Prijadi Praptosuhardjo untuk menagih dan menyertakan kelebihan pembayaran ke kas negara senilai Rp14.711.720,00;	DJPB poin d: Menteri Keuangan atau yang mewakili menginstruksikan kepada Dirjen Perbendaharaan untuk memerintahkan PPK Renovasi Interior Gedung Prijadi Praptosuhardjo untuk menagih dan menyertakan kelebihan pembayaran ke kas negara senilai Rp14.711.720,00;	a. Instruksi Menteri Keuangan atau yang mewakili b. Disposisi Dirjen Perbendaharaan c. Bukti setor senilai Rp14.711.720,00	Telah dilakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran dengan total penyetoran senilai Rp14.711.720,00. dengan rincian sbb: 1. Tanggal 9 Juni 2023, NTPN F5632G4VGDPS9700 senilai Rp3.538.800,00; 2. Tanggal 22 Juli 2023, NTPN A00048VVSLUN004 senilai Rp11.172.900,00; 3. Tanggal 22 Juli 2023, NTPN C9DE53CIFB3IBAF3 senilai Rp20,00; dokumen tambahan: Bukti Setor	Usul Selesai	Usul Selesai	SS disposisi dari Setditjen kepada Kepala Bagian Umum selaku PPK terlampir
		DJPB		f	Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak, Dirjen Perbendaharaan, Sekjen Kementerian Keuangan, dan Dirjen PPR untuk menginstruksikan kepada PPK terkait supaya lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.	poin f: DJPB: Dirjen Perbendaharaan memerintahkan KPA untuk memberikan pembinaan kepada PPK terkait supaya lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.	a. Disposisi Dirjen Perbendaharaan b. Nota Dinas Pembinaan dari KPA kepada PPK satker Kantor Pusat DJPB	Telah diterbitkan nota dinas Sekretaris Dirjen Perbendaharaan No-2854/PB.1/2023 terkait tindak lanjut LHP atas LK Tahun 2022 pada Kanpus DJPB, yaitu instruksi kepada PPK terkait supaya lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen Tambahan: BA Pembinaan	Usul Selesai	Usul Selesai	-
7	1.3.2	BPD LH	Pengelolaan Uang Kas Tunai pada Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) Kurang Memadai	a	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Perbendaharaan untuk menginstruksikan Direktur BPD LH supaya: a. Memberikan pembinaan kepada Bendahara Pengeluaran atas kekurangoptimalannya, dan selanjutnya supaya Bendahara Pengeluaran menatausahakan seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya sesuai ketentuan;	Menteri Keuangan atau yang mewakili memerintahkan Dirjen Perbendaharaan untuk menginstruksikan Direktur Utama BPD LH supaya: a. Memberikan pembinaan kepada Bendahara Pengeluaran atas kekurangoptimalannya, dan selanjutnya supaya Bendahara Pengeluaran menatausahakan seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya sesuai ketentuan;	a. Instruksi Menteri Keuangan atau yang mewakili b. Disposisi Dirjen Perbendaharaan c. Nota Dinas Pembinaan	Telah diterbitkan Nota Dinas Dirut BPD LH Nomor-94/BPD LH/2023 tanggal 21 Mei 2023 hal Penatausahaan Uang/Kas Tunai dan Surat Berharga yang Dikelola Bendahara Pengeluaran secara Tertib dan Cermat sesuai dengan Ketentuan. Dokumen tambahan: BA Pembinaan	Usul Selesai	Usul Selesai	-
		BPD LH		b	Merevisi Perdirut BPD LH Nomor 01 Tahun 2020 untuk mengatur batas maksimal saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014.	b. Melakukan revisi Peraturan Dirut BPD LH Nomor 1/BPD LH/2020 tentang Pedoman Mekanisme Pembayaran Belanja atas Beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup mengenai pengaturan batas maksimal saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 dan ketentuan lain yang terkait dengan memperhatikan kebutuhan kas tunai Bendahara Pengeluaran.	Revisi Perdirut BPD LH Nomor 01 Tahun 2020	Telah dilakukan revisi sesuai dengan rekomendasi BPK melalui Peraturan Direktur Utama BPD LH Nomor 10/BPD LH/2023 tentang Pedoman Mekanisme Pembayaran Belanja atas Beban DIPA pada BLU BPD LH, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ketentuan dimaksud batas maksimal saldo kas tunai senilai Rp50.000.000,00. Tambahan: Perdirjen PB nomor Per-3/PB/2014	Usul Selesai	Usul Selesai	-

8	1.3.10	DJPB	Pengelolaan Persediaan pada DJP, DJPb, BKF, BPPK, dan DJA Belum Tertib dan Terdapat Item/Barang pada Laporan Persediaan yang Tidak Dapat Dipergunakan Lagi	a	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan: a. Dirjen Pajak, Dirjen Perbendaharaan, Kepala BKF, dan Kepala BPPK untuk menginstruksikan Sekretaris DJP, DJPb, BKF, dan BPPK supaya memberikan pembinaan kepada: 1) Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja terkait atas kekurangoptimalannya, dan selanjutnya agar lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pengelolaan barang persediaan; 2) Pengelola persediaan atas kekurangcermatannya, dan selanjutnya agar mempedomani ketentuan dalam pengelolaan persediaan	Menkeu atau yang mewakili akan memerintahkan untuk: DJPb rekomendasi a Menteri Keuangan atau yang mewakili memerintahkan Dirjen Perbendaharaan untuk menginstruksikan Sesditjen untuk memberikan pembinaan kepada: 1) Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja terkait agar mengendalikan dan mengawasi pengelolaan barang persediaan secara optimal. 2) Pengelola persediaan atas kekurangcermatannya, dan selanjutnya agar mempedomani ketentuan dalam pengelolaan persediaan	a. Disposisi Dirjen Perbendaharaan b. Nota Dinas Pengendalian Persediaan oleh Sesditjen PB	Telah diterbitkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : ND-1878/PB.1/2023 tanggal 15 Juni 2023 hal Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2022 berupa Pengelolaan Persediaan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Dokumen tambahan: BA Pembinaan	Usul Selesai	Usul Selesai Catatan: Dilengkapi sertifikat pelatihan	Sertifikat pelatihan terlampir
9	1.3.12	DJPB	Pengelolaan Aset Tetap pada DJBC, DJP, dan DJPb Belum Memadai	a	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan: a. Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak dan Dirjen Perbendaharaan untuk menginstruksikan Sekretaris DJBC, DJP dan DJPb supaya memberikan pembinaan kepada masing-masing Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja terkait atas kekurangoptimalannya, dan selanjutnya agar lebih optimal dalam pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dalam penguasaannya; DJPB poin a Dirjen Perbendaharaan menginstruksikan Sekretaris DJPb supaya memberikan pembinaan kepada masing-masing Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja terkait atas kekurangoptimalannya, dan selanjutnya agar lebih optimal dalam pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dalam penguasaannya	Menteri Keuangan atau yang mewakili memerintahkan Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak dan Dirjen Perbendaharaan untuk: DJPB poin a Dirjen Perbendaharaan menginstruksikan Sekretaris DJPb supaya memberikan pembinaan kepada masing-masing Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja terkait atas kekurangoptimalannya, dan selanjutnya agar lebih optimal dalam pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dalam penguasaannya	Nota Dinas Pembinaan oleh Sekretaris DJPb kepada Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja terkait atas kekurangoptimalannya, dan selanjutnya agar lebih optimal dalam pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dalam penguasaannya	Telah diterbitkan Nota Dinas Sekretaris Dirjen Perbendaharaan Nomor : ND-3743/PB.1/2023 hal Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2022 berupa Pengelolaan Aset Tetap Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Kondisi Rusak Berat dan Sudah Tidak Digunakan Belum Diperbaiki atau Dihentikan dari Penggunaan/ Operasional, berkaitan dengan pembinaan kepada masing-masing Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja terkait atas kekurangoptimalannya, dan selanjutnya agar lebih optimal dalam pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dalam penguasaannya. Dokumen tambahan: BA Pembinaan	Usul Selesai	Usul Selesai	-
		DJPB		c	c. Dirjen Pajak dan Dirjen Perbendaharaan untuk memerintahkan Kuasa Pengguna Barang terkait menindaklanjuti hasil identifikasi atas Aset Tetap dengan kondisi rusak berat sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp76.653.231.918,00 yaitu pada DJP senilai Rp22.869.466.327,00 dan pada DJPb senilai Rp53.783.765.591,00; dan	DJPB rekomendasi c Dirjen Perbendaharaan menginstruksikan Sekretaris DJPb untuk memerintahkan Kuasa Pengguna Barang terkait untuk menindaklanjuti hasil identifikasi atas Aset Tetap dengan kondisi rusak berat sesuai ketentuan yang berlaku senilai Rp53.783.765.591,00;	Tindak Lanjut hasil inventarisasi	DJPb telah melakukan identifikasi atas aset tetap dengan kondisi rusak berat secara keseluruhan, tidak hanya yang menjadi temuan BPK RI untuk dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan. Dokumen tambahan: BA Inventarisasi ND perintah Inventarisasi SK Tim Inventarisasi/ Surat Tugas/ sejenisnya	Usul Selesai	Usul Selesai	-
10	1.3.13	DJPB	Terdapat Aset Tanah yang Belum Dimanfaatkan dan Dimanfaatkan Pihak Lain Secara Tidak Sah	b	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak dan Dirjen Perbendaharaan untuk: b. Memberikan pembinaan kepada Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja terkait atas kekurangoptimalannya dan selanjutnya supaya lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pengelolaan aset tetap dengan melakukan pengamanan hukum terhadap aset-aset yang dikuasai oleh pihak lain.	Menteri Keuangan atau yang mewakili menginstruksikan Dirjen Pajak dan Dirjen Perbendaharaan untuk: DJPB poin b Dirjen Perbendaharaan menginstruksikan Sekretaris DJPb untuk memerintahkan Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja terkait untuk lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pengelolaan aset tetap dengan melakukan pengamanan hukum terhadap aset-aset yang dikuasai oleh pihak lain.	a. Disposisi Dirjen Perbendaharaan b. Nota Dinas Sesditjen PB kepada Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja terkait untuk lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pengelolaan aset tetap dengan melakukan pengamanan hukum terhadap aset-aset yang dikuasai oleh pihak lain	Telah diterbitkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : ND-2384/PB.1/2023 tanggal 27 Juli 2023 hal Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2022 berupa Terdapat Aset Tanah yang Belum Dimanfaatkan dan Dimanfaatkan Pihak Lain Secara Tidak Sah. Dokumen tambahan: BA Pembinaan Satker Kanwil Sumsel dan Kanwil Jatim	Usul Selesai	Usul Selesai	-